



## **LAPORAN AKTUALISASI**

### **KONSEP *ECONOMIC OUTLOOK 2020* DENGAN METODE *FINANCIAL PROGRAMMING POLICY* TERINTEGRASI BUKU PREDIKSI ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO**

**Disusun Oleh:**

**Nama : Nadya Ahda, S.E.**  
**NIP : 19960308 201903 2 001**  
**Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian  
DPR RI**

**PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN III  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
2019**




## LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN AKTUALISASI

### KONSEP *ECONOMIC OUTLOOK* 2020 DENGAN METODE *FINANCIAL PROGRAMMING POLICY* TERINTEGRASI BUKU PREDIKSI ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

Disusun Oleh:

Nama : Nadya Ahda, S.E.  
NIP : 19960308 201903 2 001  
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian  
DPR RI

Peserta Diklat

  
Nadya Ahda, S.E.  
199603082019032001

Menyetujui

Mentor,

  
Rastri Paramita, S.E., M.M.  
198001262014022002

Coach,

  
Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.  
196804011998032003



## LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKTUALISASI

### KONSEP *ECONOMIC OUTLOOK 2020* DENGAN METODE *FINANCIAL PROGRAMMING POLICY* TERINTEGRASI BUKU PREDIKSI ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

Disusun Oleh:

Nama : Nadya Ahda, S.E.

NIP : 19960308 201903 2 001

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian  
DPR RI

Peserta Diklat,

Nadya Ahda, S.E.  
199603082019032001

Menyetujui

Mentor,

Rastri Paramita, S.E., M.M.  
198001262014022002

Coach,

Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.  
196804011998032003

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat, taufik, serta hidayah-Nya yang sangat besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan laporan aktualisasi ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan aktualisasi ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan, dorongan, saran, dan nasihat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H., M.M. selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
2. Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si. selaku Kepala Pusat Kajian Anggaran;
3. Rastri Paramita, S.E., M.M. selaku mentor;
4. Sulasi Rongiyati, S.H., M.H. selaku *coach*.

Laporan aktualisasi ini menyajikan tentang serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penulis sebagai Analis APBN Ahli Pertama di Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN, yakni Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi (ANEKA), serta Peran dan Kedudukan ASN. Laporan aktualisasi ini diharapkan dapat memberi kontribusi inovasi, serta memperkaya referensi dan literatur bagi pihak-pihak yang terkait. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang penulis susun dalam laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 7 Oktober 2019

Nadya Ahda

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	viii
BAB I: PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
BAB II: PROFIL ORGANISASI .....	3
A. Visi Misi Unit Kerja .....	3
B. Struktur Organisasi .....	4
C. Penjelasan Tugas dan Fungsi .....	4
BAB III: RANCANGAN AKTUALISASI .....	7
A. Identifikasi Isu .....	7
B. Pemilihan Isu Prioritas: Teknik USG .....	15
C. Gagasan Pemecahan Isu .....	16
D. Rancangan Aktualisasi .....	19
BAB IV: PELAKSANAAN AKTUALISASI .....	38
A. Penjelasan Pelaksanaan Aktualisasi .....	38
B. Stakeholders .....	64
C. Kendala dan Strategi Mengatasi Kendala .....	64
D. Analisis Dampak .....	66

### Manajemen ASN $\Rightarrow$

Pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik dan KKN

- hak & kewajiban ASN
  - melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab
  - menunjukkan integritas & keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang

### • kode etik

- melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi
- melaksanakan tugas dengan cermat & disiplin
- melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan
- memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan
- ~~menjaga~~ memegang teguh nilai ASN & menjaga reputasi & integritas ASN

### Whole of Government :

Sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik

- 1) Koordinasi
- 2) Integrasi
- 3) Kedekatan & pelibatan

### Pelayanan Publik $\Rightarrow$

segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat & daerah dalam bentuk barang/jasa baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat

Prinsip  $\Rightarrow$  pelayanan prima

- partisipatif
- aksesibel
- responsif
- akuntabel
- tidak diskriminatif
- berkeadilan
- mudah & murah
- efektif & efisien

E. Jadwal Kegiatan .....	72
BAB V: PENUTUP .....	75
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76
LAMPIRAN .....	77

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Kajian Anggaran.....	4
Gambar 2. Laman Infografis pada Website Pusat Kajian Anggaran.....	11
Gambar 3. Laman Videografis pada Website Pusat Kajian Anggaran.....	11
Gambar 4. Laman Data Indikator pada Website Pusat Kajian Anggaran .....	13
Gambar 5. Alur Kegiatan dan Tahapan Kegiatan Aktualisasi .....	31
Gambar 6. Konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran.....	38
Gambar 7. Konsultasi Awal dengan Mentor .....	39
Gambar 8. Kegiatan Presentasi Internal .....	56
Gambar 9. Konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran.....	57

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Analisis USG.....	16
Tabel 2. Rancangan Aktualisasi .....	19
Tabel 3. Perbedaan Kegiatan dan Tahapan Kegiatan pada Rancangan dan Laporan Aktualisasi..	32
Tabel 4. Keterkaitan Kegiatan 1 pada Mata Pelatihan, Visi-Misi Organisasi, dan Nilai Organisasi .	41
Tabel 5. Daftar Data dan Sumber yang Digunakan .....	44
Tabel 6. Keterkaitan Kegiatan 2 pada Mata Pelatihan, Visi-Misi Organisasi, dan Nilai Organisasi .	47
Tabel 7. Keterkaitan Kegiatan 3 pada Mata Pelatihan, Visi-Misi Organisasi, dan Nilai Organisasi .	52
Tabel 8. Keterkaitan Kegiatan 4 pada Mata Pelatihan, Visi-Misi Organisasi, dan Nilai Organisasi .	58
Tabel 9. Keterkaitan Kegiatan 5 pada Mata Pelatihan, Visi-Misi Organisasi, dan Nilai Organisasi .	62
Tabel 10. Kendala dan Strategi Mengatasi Kendala.....	64
Tabel 11. Dampak bagi Proyek Aktualisasi jika Kegiatan Dilakukan dan Tidak Dilakukan .....	68
Tabel 12. <i>Time Table</i> Kegiatan Aktualisasi.....	72

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Tahapan Kegiatan 1.1 Laporan Singkat Kepala Pusat Kajian Anggaran .....	77
Lampiran 2: Tahapan Kegiatan 1.2 Laporan Singkat Mentor .....	78
Lampiran 3: Tahapan Kegiatan 1.3 <i>Outline</i> Pedoman .....	79
Lampiran 4: Tahapan Kegiatan 1.4 <i>Resume</i> Referensi .....	80
Lampiran 5: Tahapan Kegiatan 2.1 Kompilasi Data .....	83
Lampiran 6: Tahapan Kegiatan 2.2 dan 2.3 Visualisasi Data dan Analisis Singkat .....	98
Lampiran 7: Tahapan Kegiatan 2.4 Laporan Singkat Mentor .....	114
Lampiran 8: Tahapan Kegiatan 3.1 <i>Draft Economic Outlook</i> 2020 .....	115
Lampiran 9: Tahapan Kegiatan 3.2 <i>Layout</i> .....	138
Lampiran 10: Tahapan Kegiatan 3.3 Pedoman Penyusunan Artikel .....	139
Lampiran 11: Tahapan Kegiatan 3.4 Laporan Singkat Mentor .....	145
Lampiran 12: Tahapan Kegiatan 4.1 Surat Undangan .....	146
Lampiran 13: Tahapan Kegiatan 4.2 <i>File</i> Presentasi, Catatan Notulensi, dan Daftar Hadir .....	147
Lampiran 14: Tahapan Kegiatan 4.3 <i>Revised Draft</i> .....	151
Lampiran 15: Tahapan Kegiatan 4.4 Laporan Singkat Mentor .....	160
Lampiran 16: Tahapan Kegiatan 5.3 Catatan Hasil Penyerahan Laporan .....	161

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah sebuah negara yang dikaruniai dengan sumber daya alam yang melimpah dan potensi sumber daya manusia yang besar. Tidak hanya itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara demokrasi terbesar dengan implementasi demokrasi yang relatif stabil. Di sisi lain, Indonesia masih mengalami berbagai hambatan pembangunan yang disebabkan oleh faktor-faktor multidimensi, salah satunya adalah belum maksimalnya peranan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memegang fungsi pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa.

Untuk memaksimalkan fungsi dan peranan ASN bagi pembangunan negara, dibutuhkan ASN yang profesional, yaitu PNS yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya, sehingga mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diselenggarakanlah pembinaan calon ASN melalui mekanisme pelatihan. Menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 63 ayat (3) dan (4) bahwa CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, serta memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang. Oleh karena itu, diperlukan sebuah penyelenggaraan pelatihan yang inovatif dan terintegrasi, yaitu penyelenggaraan pelatihan yang memadukan pembelajaran klasikal dan nonklasikal di tempat pelatihan dan di tempat kerja. Hal ini dimaksudkan agar peserta mampu menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktualisasikan, serta

membuatnya menjadi kebiasaan (habitulasi), serta merasakan manfaatnya, sehingga terpatrit dalam dirinya sebagai karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas dan mampu mengemban 3 fungsi ASN secara maksimal untuk mendukung pembangunan nasional.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
5. Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018;
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

## **BAB II**

### **PROFIL ORGANISASI**

#### **A. Visi Misi Unit Kerja**

Rumusan visi Pusat Kajian Anggaran mengacu pada visi Badan Keahlian DPR RI dengan fokus pada tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, yaitu sebagai unsur pendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI. Dengan demikian, visi Pusat Kajian Anggaran adalah:

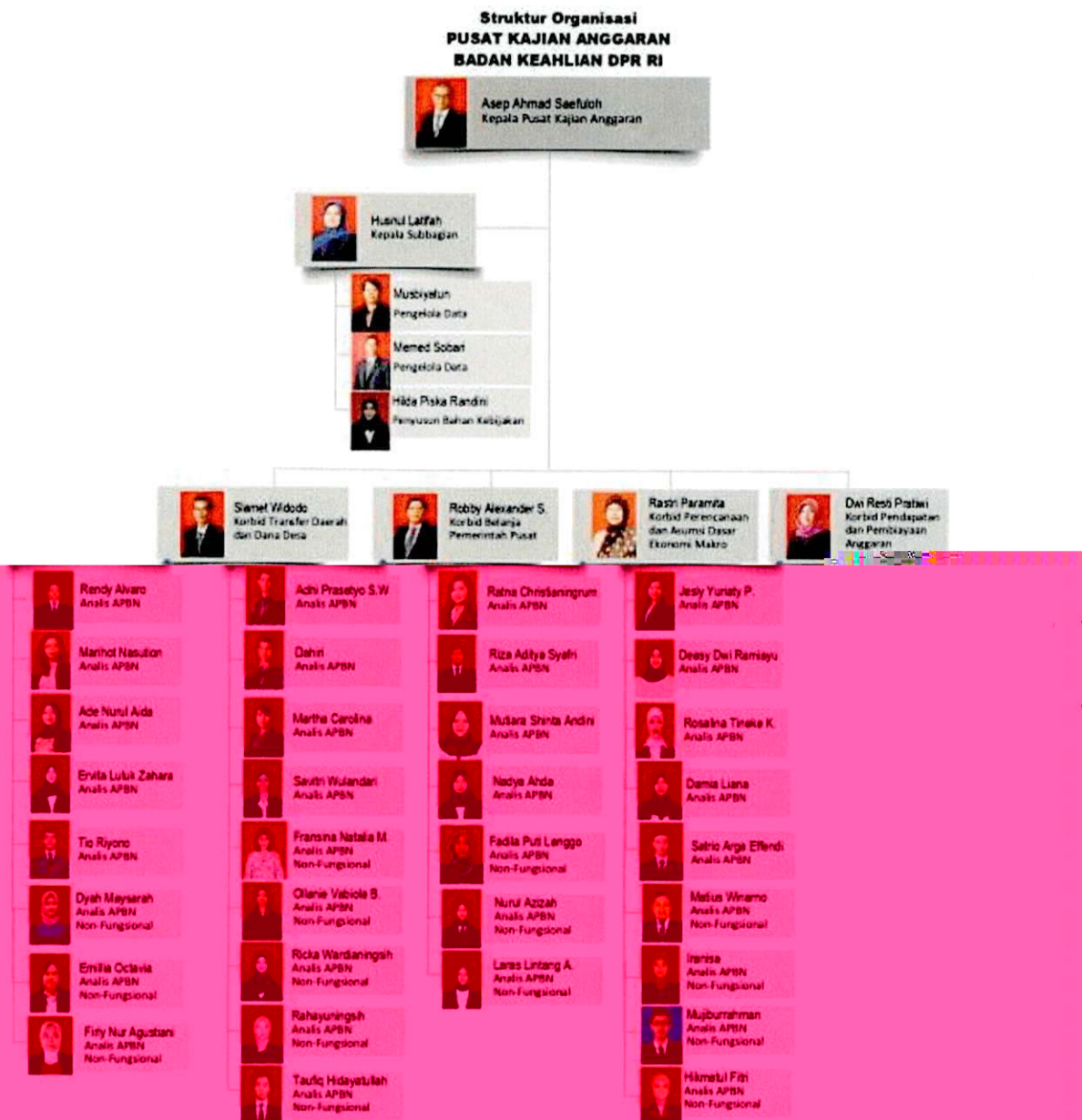
1. Pusat Kajian Anggaran yang **profesional**, mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Kajian Anggaran mempunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar, dan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM.
2. Pusat Kajian Anggaran yang **andal**, mempunyai makna bahwa Pusat Kajian Anggaran mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.
3. Pusat Kajian Anggaran yang **akuntabel**, mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi dukungan keahlian, Pusat Kajian Anggaran mampu bertanggung jawab atas tiap tindakan, keputusan, dan kebijakan, termasuk pula di dalamnya pemberian informasi kepada publik sesuai tugas dan fungsi DPR RI dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Pusat Kajian Anggaran menyusun misi sebagai berikut:

1. Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran dewan..
2. Memperkuat manajemen pengetahuan.

3. Memperkuat pengembangan profesi Analis APBN.

## B. Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Kajian Anggaran

## C. Penjelasan Tugas dan Fungsi

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permen PANRB RI)

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Analisis APBN), bahwa yang dimaksud dengan Analisis APBN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan analisis APBN. Analisis APBN berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Analisis APBN pada Sekretariat Jenderal DPR RI. Analisis APBN termasuk dalam rumpun jabatan fungsional dimana jenjang jabatan fungsional Analisis APBN terdiri dari Analisis APBN Ahli Pertama, Analisis APBN Ahli Muda, Analisis APBN Ahli Madya, dan Analisis APBN Ahli Utama.

Adapun uraian tugas Analisis APBN, antara lain:

- a. melakukan pembahasan internal dalam rangka persiapan mengikuti dan/atau mendampingi rapat-rapat DPR sesuai siklus APBN, BPK, dan DPD;
- b. mengumpulkan data dan informasi dalam rangka penyusunan laporan dalam rapat-rapat DPR RI sesuai siklus APBN, BPK, DPD;
- c. melakukan pendampingan dan dukungan keahlian dalam rangka rapat-rapat DPR RI sesuai siklus APBN, BPK, DPD;
- d. pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah/lembaga lainnya;
- e. menyusun analisis APBN, analisis hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD;
- f. menyusun referensi APBN, hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD, termasuk menyusun laporan kegiatan pendalaman materi, data dan informasi yang memerlukan penggalan data-data primer langsung dari sumber data, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, instansi negara, dan swasta dalam dan luar negeri;
- g. menyusun Analisis Ringkas Cepat (ARC);

- h. mengikuti diskusi mengenai analisis APBN, referensi APBN, BPK dan DPD, serta Analisis Ringkas Cepat (ARC);
- i. memberikan data dan informasi dengan tema berdasarkan permintaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI);
- j. melakukan pembahasan evaluasi dan pelaporan sesuai *output*. Adapun tugas tambahan yang dapat dikerjakan oleh seorang Analis APBN antara lain:
  - a. mengikuti seminar/lokakarya di bidang APBN;
  - b. membuat materi sebagai bahan diklat Analis APBN;
  - c. membuat karya tulis ilmiah di bidang APBN;
  - d. memberikan konsultasi/bimbingan di bidang APBN yang bersifat konseptual; dan,
  - e. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok jabatannya.

## **BAB III**

### **RANCANGAN AKTUALISASI**

#### **A. Identifikasi Isu**

**1. Belum maksimalnya kualitas substansi produk analisis APBN dari Pusat Kajian Anggaran sebagai salah satu bentuk dukungan keahlian kepada anggota DPR RI**

##### **a. Kondisi saat ini**

Pusat Kajian Anggaran memiliki fungsi pelaksanaan dukungan keahlian terhadap fungsi anggaran yang diemban oleh DPR RI. Dukungan keahlian tersebut berupa analisis APBN yang direalisasikan dalam bentuk berbagai *output* analisis, antara lain analisis, referensi, Analisis Ringkas Cepat (ARC), buletin, dan jurnal.

Untuk memastikan pelayanan dukungan keahlian yang terbaik, kualitas substansi *output* harus memenuhi standar ar

analisis yang sederhana akan menghasilkan kualitas analisis APBN yang kurang mendalam. Permasalahan ini diperkuat dengan pernyataan Kepala Pusat Kajian Anggaran, Bapak Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si. mengenai bagaimana kualitas produk dari Pusat Kajian Anggaran masih perlu ditingkatkan lagi dari segi keilmuan. Tidak hanya itu, selama satu tahun terakhir, Pusat Kajian Anggaran bekerja sama dengan World Bank Indonesia untuk berkonsultasi mengenai hasil analisis Pusat Kajian Anggaran, dan secara spesifik adalah hasil analisis buku PADEM 2020. Menurut konsultan ekonomi yang ditunjuk oleh World Bank Indonesia, Bapak Dhaniel Ilyas, bahwa analisis buku PADEM 2020 dari Pusat Kajian Anggaran belum cukup baik, hal ini dilihat dari analisis yang relatif sederhana, deskriptif, dan *straightforward*.

*“...the analyses are relatively simple, descriptive, and straightforward, lacking in explaining the relation between state (proposed) budget with its macroeconomic consequences... The macroeconomic team of BAC<sup>1</sup> are still lacking in macroeconomic theory understanding and they did not have advanced economic models similar to the ones used by Ministry of Finance, BAPPENAS, and The Central Bank...”* (Ilyas, 2019)

#### **b. Penyebab**

Belum optimalnya kualitas produk analisis APBN disebabkan oleh masih kurangnya kapabilitas sumber daya manusia (SDM) Analis APBN Pusat Kajian Anggaran dalam membuat analisis ilmiah yang sesuai dengan teori dan kaidah ekonomi. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya pelatihan dan habituasi/pembiasaan penyusunan analisis yang ilmiah bagi SDM Pusat Kajian Anggaran. Hal ini didukung oleh pernyataan konsultan dari World Bank Indonesia, Bapak Dhaniel Ilyas bahwa masih kurang maksimalnya kualitas

---

<sup>1</sup>Budget Analysis Center/Pusat Kajian Anggaran

produk analisis dari Pusat Kajian Anggaran disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman teori makroekonomi dan permodelan ekonomi yang *advanced* dari SDM Pusat Kajian Anggaran.

**c. Kondisi yang diharapkan**


Idealnya, untuk memaksimalkan peranan Pusat Kajian Anggaran dalam memberikan dukungan keahlian di bidang APBN, kualitas produk kajian harus dipastikan informatif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga produk-produk ini kemudian dapat dijadikan sebagai referensi yang valid bagi pengambilan berbagai keputusan oleh anggota DPR RI, terutama di bidang anggaran.

**d. Dampak apabila tidak diatasi**

Apabila permasalahan ini tidak diatasi, maka hal ini akan berdampak pada tidak berkembangnya kualitas substansi produk Pusat Kajian Anggaran, atau dengan kata lain, mengalami stagnasi. Apabila kualitas substansi produk analisis kurang mendalam dan ilmiah, maka produk ini tidak akan dapat menjadi referensi dan masukan yang valid dan informatif bagi anggota DPR RI, yang kemudian berujung pada keputusan yang *biased* dan pelaksanaan dukungan keahlian yang tidak optimal.

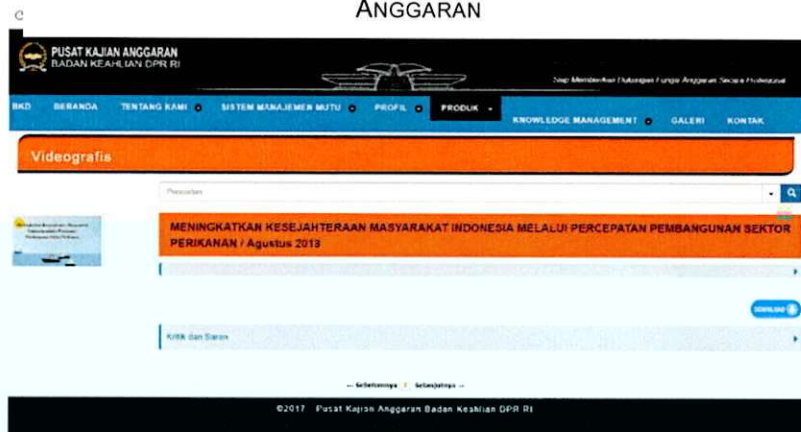
**e. Dukungan teoritik mata pelatihan**

Apabila dikaitkan dengan peranan dan kedudukan ASN, dukungan keahlian di bidang analisis APBN yang dilaksanakan oleh Pusat Kajian Anggaran merupakan salah satu bentuk pelayanan publik dengan anggota DPR RI sebagai *customer* dari pelayanan publik tersebut. Masih belum maksimalnya kualitas substansi produk analisis APBN merefleksikan pelayanan publik yang belum prima. Hal ini dapat dinilai apakah produk analisis yang dibuat oleh Pusat Kajian Anggaran mampu: 1) memenuhi kebutuhan dasar pengguna; 2) memenuhi harapan pengguna; dan 3) melebihi harapan pengguna jasa dan mengerjakan apa yang lebih dari yang diharapkan. Dalam konteks pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pusat Kajian

Anggaran, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi: 1) apakah kualitas analisis yang ada sekarang sudah memenuhi kebutuhan dasar anggota DPR RI?; 2) apakah kualitas analisis yang ada sekarang sudah memenuhi harapan anggota DPR RI? dan; 3) apakah kualitas analisis yang ada sekarang sudah melebihi harapan 



GAMBAR 2. LAMAN INFOGRAFIS PADA WEBSITE PUSAT KAJIAN ANGGARAN



GAMBAR 3. LAMAN VIDEOGRAFIS PADA WEBSITE PUSAT KAJIAN ANGGARAN

## b. Penyebab

Belum terstandarisasinya produk infografis untuk seluruh produk analisis disebabkan oleh tidak adanya *template* infografis yang mengandung ciri khas Pusat Kajian Anggaran. Selain itu, juga terdapat perbedaan kualitas desain infografis yang dipengaruhi oleh perbedaan keterampilan desain dari setiap SDM Pusat Kajian Anggaran. Sementara itu, belum tersedianya videografis untuk seluruh produk analisis juga disebabkan keterbatasan keterampilan videografis dari SDM Pusat Kajian Anggaran.

## c. Kondisi yang diharapkan

Idealnya, perlu diinisiasi pembuatan infografis dan videografis untuk produk analisis dari Pusat Kajian Anggaran yang

terstandardisasi secara kualitas desain dengan suatu *template* tertentu, sehingga *output* analisis terlihat lebih menarik untuk dibaca dan dipelajari oleh anggota DPR RI. Selain itu, perlu dipastikan bahwa pembuatan infografis dan/atau videografis ini dilakukan secara rutin untuk setiap analisis yang dibuat.

**d. Dampak apabila tidak diatasi**

Apabila isu ini tidak diatasi, maka produk analisis dari Pusat Kajian Anggaran hanya terpaku pada produk yang berbentuk artikel saja dan terkadang produk artikel dapat terkesan membosankan dan kurang informatif. Selain itu, apabila infografis yang dihasilkan terlihat berbeda-beda dari segi kualitas desain, maka akan terlihat kurang profesional.

**e. Dukungan teoritik mata pelatihan**

Apabila dikaitkan dengan kedudukan dan peranan ASN, penyajian produk analisis yang menarik dan terstandardisasi juga merupakan bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pusat Kajian Anggaran kepada *customer*-nya, yaitu anggota DPR RI. Penyajian produk analisis Pusat Kajian Anggaran yang kurang menarik dan belum terstandardisasi secara kualitas menjadi satu pertanyaan bagi implementasi pelayanan publik yang prima, yaitu apakah produk analisis dari Pusat Kajian Anggaran sudah melebihi harapan pengguna jasa, dan Pusat Kajian Anggaran sudah mengerjakan apa yang lebih dari yang diharapkan (daripada hanya produk analisis yang berbentuk artikel biasa)? Hal ini krusial bagi peningkatan kepuasan *customer* pelayanan publik Pusat Kajian Anggaran, yang dilaksanakan dengan upaya-upaya peningkatan kualitas *output* layanan yang diberikan, dalam hal ini adalah dalam bentuk analisis APBN yang lebih menarik.

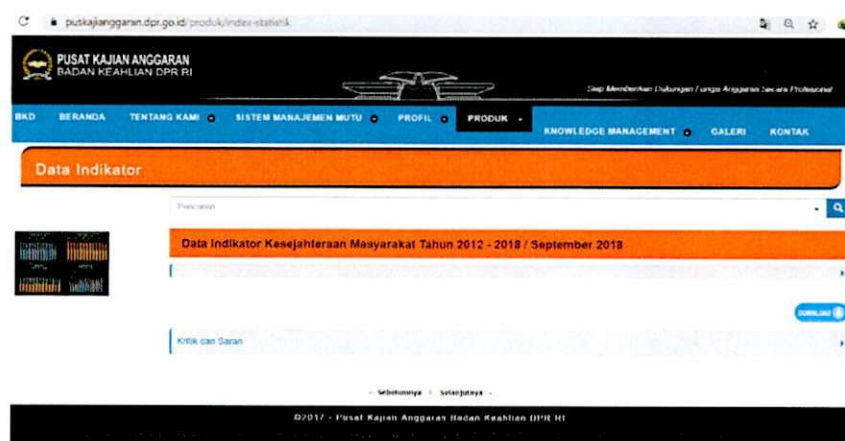
Selain itu, analisis APBN yang lebih menarik juga merupakan perwujudan prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan yang prima, yaitu efektif, artinya penyelenggaraan

pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya. Dalam konteks ini, penyajian analisis APBN kepada anggota DPR RI harus efektif, artinya tujuan Pusat Kajian Anggaran untuk memberikan referensi analisis yang bermanfaat benar-benar tercapai dan manfaatnya juga benar sampai pada anggota DPR RI. Untuk memastikan bahwa pesan dan manfaat dari sebuah analisis APBN dapat diambil, maka penyajiannya harus menarik, baik dalam bentuk infografis maupun videografis.

### 3. Belum tersedianya data mutakhir terkait APBN dalam *website* Pusat Kajian Anggaran

#### a. Kondisi saat ini

Pusat Kajian Anggaran memiliki *website* (<https://puskajiananggaran.dpr.go.id>) sebagai media penyajian informasi mengenai seluk-beluk Pusat Kajian Anggaran dan data mengenai APBN. Namun, *website* ini belum dikelola secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari tidak tersedianya data yang terkait dengan APBN di bagian sub-menu Data Indikator. Sub-menu ini hanya mengandung satu data dan data tersebut sudah tidak diperbarui (tidak mutakhir). Hal ini dapat dilihat dari *website* Pusat Kajian Anggaran pada bagian Produk Data Indikator (<https://puskajiananggaran.dpr.go.id/produk/index-statistik>).



GAMBAR 4. LAMAN DATA INDIKATOR PADA WEBSITE PUSAT KAJIAN ANGGARAN

**b. Penyebab**

Data yang tidak mutakhir pada *website* Pusat Kajian Anggaran disebabkan oleh kurangnya inisiasi untuk mencanangkan program pengunggahan dan pembaruan data mengenai APBN. Belum menyadari urgensi dalam memiliki *database* yang mutakhir bagi penyediaan informasi yang lebih baik, serta mendukung penyusunan analisis yang lebih cepat juga dinilai menjadi salah satu penyebab.

**c. Kondisi yang diharapkan**

Idealnya, sebagai salah satu media penyampaian informasi publik, *website* Pusat Kajian Anggaran memuat semua data mutakhir terkait dengan APBN dan data tersebut harus selalu rutin di-*update*. Hal ini didukung dengan tugas dan fungsi Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran yaitu analisis mengenai APBN, sehingga ketersediaan data APBN dalam *website* menjadi sangat penting untuk diinisiasi.

**d. Dampak apabila tidak diatasi**

Apabila isu ini tidak diatasi, maka tidak akan tersedia data mutakhir mengenai APBN dalam *website* Pusat Kajian Anggaran. Apabila data tersebut tidak tersedia, maka penyajian informasi publik menjadi tidak optimal. Selain itu, SDM Pusat Kajian Anggaran tidak akan merasakan manfaat dari *database* yang mutakhir, sehingga berujung pada inefisiensi pada proses penyusunan analisis yang membutuhkan data.

**e. Dukungan teoritik mata pelatihan**

Apabila dikaitkan dengan kedudukan dan peranan ASN, pemutakhiran data APBN secara tidak langsung berkorelasi dengan penerapan *Whole of Government* (WOG). WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai berbagai tujuan, salah satunya adalah manajemen program. Dalam manajemen program siklus APBN, dibutuhkan koordinasi kolaboratif dari instansi-

instansi terkait, misalnya DPR RI dan Kementerian Keuangan. Hal ini didukung dengan adanya dorongan untuk melaksanakan WOG dalam konteks siklus APBN, yaitu adanya ketimpangan kapasitas sektoral (dalam hal ini adalah instansi pemerintah) dalam hal integrasi data. Tidak hanya itu, perkembangan teknologi informasi di era saat ini mendorong pentingnya implementasi WOG dalam penghimpunan dan publikasi data APBN setiap siklus APBN di *website* masing-masing instansi.

Menyadari keterbatasan Pusat Kajian Anggaran terkait data lengkap mengenai APBN, data-data mengenai seluk-beluk APBN sebenarnya dapat diperoleh dari instansi pemerintah lain, misalnya Kementerian Keuangan. Dengan mengadakan kerjasama, koordinasi, dan kolaborasi dengan instansi pemerintah lain yang memiliki data-data terkait APBN, maka *database* terkait APBN akan tersedia lengkap dan mudah diakses melalui *website* sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak pihak, baik secara internal Pusat Kajian Anggaran maupun eksternal (publik). Ketika data APBN tersedia di *website* dan dapat diakses oleh publik, maka Pusat Kajian Anggaran juga menyelenggarakan pelayanan publik berupa ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan terbuka.

#### **B. Pemilihan Isu Prioritas: Teknik USG**

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik USG. USG terdiri dari:

1. *Urgency* yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti.
2. *Seriousness*, yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan.
3. *Growth*, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya.

Setiap kriteria diberikan nilai 1-5, dengan menuju angka 5 menunjukkan intensitas yang lebih besar, atau dengan kata lain

“sangat”. Misalnya, nilai *urgency* sebesar 5, maka artinya isu tersebut memiliki urgensi yang sangat tinggi untuk segera diatasi.

TABEL 1. ANALISIS USG

Isu	U	S	G	Kesimpulan
1. Belum maksimalnya kualitas substansi produk analisis APBN dari Pusat Kajian Anggaran sebagai salah satu bentuk dukungan keahlian kepada anggota DPR RI.	5	5	4	14*
2. Penyajian produk analisis Pusat Kajian Anggaran yang kurang menarik dan belum terstandardisasi secara kualitas.	3	3	3	9
3. Belum tersedianya data mutakhir terkait APBN dalam <i>website</i> Pusat Kajian Anggaran.	4	3	3	10

Berdasarkan hasil analisis dengan teknik USG di atas, maka isu prioritas yang akan diambil adalah belum maksimalnya kualitas substansi produk analisis APBN dari Pusat Kajian Anggaran sebagai salah satu bentuk dukungan keahlian kepada anggota DPR RI.

### C. Gagasan Pemecahan Isu

Untuk memecahkan isu pertama sebagai isu prioritas, maka kualitas substansi produk analisis APBN sebagai salah satu bentuk dukungan keahlian kepada anggota DPR RI harus dimaksimalkan melalui penyusunan konsep *Economic Outlook 2020* yang diintegrasikan ke dalam Buku Prediksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro.

#### 1. Judul Proyek Aktualisasi

Konsep *Economic Outlook 2020* dengan Metode *Financial Programming Policy* Terintegrasi Buku Prediksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro.

#### 2. Definisi Terkait Judul Proyek Aktualisasi

- a. *Economic Outlook* adalah sebuah artikel ilmiah yang memberikan ilustrasi mengenai prediksi kinerja perekonomian suatu negara di periode/masa yang akan datang. Kinerja perekonomian dinilai dengan menganalisis kinerja berbagai variabel ekonomi dari seluruh sektor perekonomian, dari sektor riil hingga sektor eksternal selama beberapa periode terakhir. Kemudian, analisis tersebut dikaitkan dengan kondisi perekonomian saat ini yang sekiranya dapat berpengaruh terhadap kinerja variabel-variabel ekonomi tersebut di masa yang akan datang.
- b. *Financial Programming Policy* (FPP) adalah sebuah kerangka analisis yang memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian terkini, proyeksi arah kinerja perekonomian, dan identifikasi mengenai kebijakan ekonomi apa saja yang akan mempengaruhi kinerja perekonomian (EDX Courses, tt). Selama 1 tahun terakhir, Pusat Kajian Anggaran telah menyelenggarakan kerjasama dengan World Bank Indonesia untuk memberikan pelatihan mengenai metode analisis FPP kepada Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran. Oleh karena itu, untuk mengaplikasikan metode baru, pembuatan konsep *Economic Outlook 2020* ini akan menggunakan metode FPP tersebut.
- c. Buku *Prediksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro* (Buku PADEM)  
Buku PADEM adalah sebuah *output* tahunan dari Bidang Perencanaan dan Asumsi Dasar Ekonomi Makro yang berisi tentang analisis proyeksi dan asumsi kinerja 7 variabel makroekonomi yang menjadi landasan penyusunan APBN di tahun depan. Tujuh variabel tersebut

adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, harga minyak mentah Indonesia (ICP), *lifting* minyak bumi, dan *lifting* gas bumi.

### **3. Tujuan Proyek Aktualisasi**

Penyusunan konsep *Economic Outlook 2020* ini akan meningkatkan kualitas analisis Buku PADEM dan memperkaya informasi yang disajikan dalam buku tersebut. Hal ini dikarenakan *Economic Outlook* memberikan informasi mengenai gambaran kondisi makroekonomi Indonesia secara keseluruhan dalam suatu *big picture*, sehingga nantinya dalam memahami proyeksi kinerja per variabel menjadi lebih mudah. Idealnya, sebelum masuk ke dalam analisis individual per variabel, gambaran besar mengenai hubungan antarvariabel ekonomi dapat disajikan terlebih dahulu melalui *Economic Outlook*.

### **4. Output Akhir Aktualisasi**

- a. Artikel *Economic Outlook 2020*;
- b. Pedoman penyusunan *Economic Outlook* yang berisi mengenai *outline* artikel, serta data dan sumber data yang digunakan.

#### D. Rancangan Aktualisasi

- Unit Kerja** : Pusat Kajian Anggaran
- Identifikasi Isu** : 1. Belum maksimalnya kualitas substansi produk analisis APBN dari Pusat Kajian Anggaran sebagai salah satu bentuk dukungan keahlian kepada anggota DPR RI.  
2. Penyajian produk analisis Pusat Kajian Anggaran yang kurang menarik dan belum terstandardisasi secara kualitas.  
3. Belum tersedianya data mutakhir terkait APBN dalam *website* Pusat Kajian Anggaran.
- Isu yang Diangkat** : Belum maksimalnya kualitas substansi produk analisis APBN dari Pusat Kajian Anggaran sebagai salah satu bentuk dukungan keahlian kepada anggota DPR RI.
- Gagasan Pemecahan Isu** : Kualitas substansi produk analisis APBN sebagai salah satu bentuk dukungan keahlian kepada anggota DPR RI yang lebih maksimal melalui penyusunan konsep *Economic Outlook 2020* yang diintegrasikan ke dalam Buku Prediksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro.

TABEL 2. RANCANGAN AKTUALISASI

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Konsultasi Rancangan Aktualisasi dan Pengayaan Materi	1.1. Melakukan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran 1.2. Melakukan konsultasi awal dengan mentor	1. Laporan Singkat (Lapsing) konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran 2. Laporan Singkat (Lapsing) konsultasi dengan mentor 3. <i>Outline</i> pedoman penulisan <i>Economic</i>	<b>Nilai Dasar PNS:</b> <b>a) Akuntabilitas</b> Adanya laporan kepada atasan, dalam hal ini adalah Kepala Pusat Kajian Anggaran dan Koordinator Bidang (mentor) disertai dengan penyusunan laporan	<b>Visi Pusat Kajian Anggaran:</b> <b>a) Profesional</b> Dengan melakukan pengayaan materi dan membaca referensi, maka visi Pusat Kajian Anggaran yang profesional terwujud.	<b>a) Akuntabilitas</b> Pelaporan kepada atasan dan penyusunan laporan singkat merupakan bentuk akuntabilitas penulis.

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<p>1.3. Melakukan pengayaan materi dengan mempelajari kembali metode <i>Financial Programming Policy</i> (FPP)</p> <p>1.4. Membaca referensi <i>Economic Outlook</i> dari berbagai lembaga kredibel</p>	<p><i>Outlook</i> dengan metode FPP</p> <p>4. <i>Resume</i> poin-poin yang dapat diambil dan dipelajari dari <i>Economic Outlook</i> berbagai lembaga kredibel</p>	<p>singkat merupakan bentuk akuntabilitas atas apa yang penulis kerjakan.</p> <p><b>b) Etika Publik</b> Melakukan konsultasi dengan atasan dengan memperhatikan etika dan sopan santun.</p> <p><b>c) Komitmen Mutu</b> Menginisiasi proyek aktualisasi yang dimulai dengan kegiatan ini merupakan sebuah pembaruan (<i>novelty</i>) yang bermanfaat (<i>expediency</i>) bagi unit kerja.</p> <p><b>Peran dan Kedudukan PNS:</b> <b>a) Manajemen ASN</b> Dalam mengerjakan proyek aktualisasi, termasuk pada tahapan-tahapan kegiatan ini, penulis selalu berpedoman pada kewajiban dan kode etik</p>	<p><b>b) Andal</b> Dengan melakukan koordinasi dengan atasan, maka visi Pusat Kajian Anggaran yang andal terwujud.</p> <p><b>c) Akuntabel</b> Dengan melapor kepada mentor dan menyusun laporan singkat, maka visi Pusat Kajian Anggaran yang akuntabel terwujud.</p> <p><b>Misi Pusat Kajian Anggaran:</b> <b>a) Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan</b> Tahapan-tahapan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penulis memberikan fungsi dukungan kajian anggaran yang maksimal bagi anggota DPR RI.</p>	<p><b>b) Profesionalitas</b> Upaya penulis mempelajari kembali metode analisis baru (FPP) dan berbagai referensi lainnya menguatkan nilai profesionalitas.</p> <p><b>c) Integritas</b> Melakukan koordinasi kepada atasan dengan kejujuran dan konsistensi menguatkan nilai integritas.</p>

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				<p>ASN yang melekat pada diri penulis.</p> <p><b>b) Pelayanan Publik</b> Memastikan produk pelayanan publik (dalam hal ini adalah pelayanan kepada anggota DPR RI) yang terbaik dengan menguatkan basis analisis, baik dari metode FPP yang matang dan referensi <i>Economic Outlook</i> yang kredibel.</p>	<p><b>b) Memperkuat manajemen pengetahuan</b> Mempelajari metode analisis baru, yaitu FPP, serta mempelajari berbagai referensi merupakan bentuk nyata dari upaya memperkuat manajemen pengetahuan.</p>	
2.	Pengumpulan dan Pengolahan Data	<p>2.1. Mencari data-data makroekonomi yang dibutuhkan untuk analisis dari sumber sekunder</p> <p>2.2. Mengolah data-data yang dibutuhkan untuk analisis dan</p>	<p>1. Kompilasi data-data makroekonomi yang dibutuhkan untuk analisis beserta <i>list</i> sumbernya</p> <p>2. Grafik/tabel hasil olahan data-data makroekonomi yang dibutuhkan untuk analisis</p> <p>3. <i>Brief analysis/highlight</i> singkat untuk setiap</p>	<p><b>Nilai Dasar PNS:</b></p> <p><b>a) Akuntabilitas</b> Adanya laporan kepada mentor disertai dengan penyusunan laporan singkat merupakan bentuk akuntabilitas atas apa yang penulis kerjakan.</p> <p><b>b) Etika Publik</b> Melakukan konsultasi dengan mentor dengan</p>	<p><b>Visi Pusat Kajian Anggaran:</b></p> <p><b>a) Profesional</b> Dengan mencari, mengolah, dan menganalisis data, maka visi Pusat Kajian Anggaran yang profesional terwujud.</p> <p><b>b) Andal</b> Dengan melakukan koordinasi dengan mentor, maka visi Pusat Kajian Anggaran yang andal terwujud.</p>	<p><b>a) Akuntabilitas</b> Pelaporan kepada mentor dan penyusunan laporan singkat merupakan bentuk akuntabilitas penulis.</p> <p><b>b) Profesionalitas</b> Upaya penulis melakukan</p>



No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				kewajiban dan kode etik ASN yang melekat pada diri penulis. <b>b) Pelayanan Publik</b> Memastikan produk pelayanan publik (dalam hal ini adalah pelayanan kepada anggota DPR RI) yang terbaik dengan menguatkan basis data yang andal dan proses pengolahan data yang <i>reliable</i> .	memperkuat manajemen pengetahuan.	
3.	Penyusunan Artikel Analisis dan Pedoman Penyusunan <i>Economic Outlook</i> 2020	3.1. Menyusun <i>draft</i> artikel analisis <i>Economic Outlook</i> 2020 3.2. Menyusun <i>layout</i> artikel analisis <i>Economic Outlook</i> 2020 3.3. Menyusun pedoman penyusunan artikel <i>Economic</i>	1. <i>Draft</i> artikel analisis <i>Economic Outlook</i> 2020 2. Hasil <i>layout</i> untuk artikel analisis <i>Economic Outlook</i> 2020 3. Pedoman Penyusunan artikel <i>Economic Outlook</i> 4. Laporan Singkat (Lapsing) konsultasi dengan mentor	<b>Nilai Dasar PNS:</b> <b>a) Akuntabilitas</b> Adanya laporan kepada mentor disertai dengan penyusunan laporan singkat merupakan bentuk akuntabilitas atas apa yang penulis kerjakan. <b>b) Etika Publik</b> Melakukan konsultasi dengan mentor dengan memperhatikan etika dan sopan santun.	<b>Visi Pusat Kajian Anggaran:</b> <b>a) Profesional</b> Dengan menyusun artikel analisis <i>Economic Outlook</i> 2020 beserta dengan pedoman penyusunannya, maka visi Pusat Kajian Anggaran yang profesional terwujud. <b>b) Andal</b> Dengan melakukan koordinasi dengan mentor, maka visi Pusat Kajian	<b>a) Akuntabilitas</b> Pelaporan kepada mentor dan penyusunan laporan singkat merupakan bentuk akuntabilitas penulis. <b>b) Profesionalitas</b> Upaya penulis melakukan proses

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<p>Outlook dengan metode FPP</p> <p>3.4. Melakukan konsultasi dengan mentor mengenai <i>draft</i> artikel analisis <i>Economic Outlook</i> 2020</p>		<p><b>c) Komitmen Mutu</b>  Menginisiasi proyek aktualisasi yang dilanjutkan dengan kegiatan ini merupakan sebuah pembaruan (<i>novelty</i>) yang bermanfaat (<i>expediency</i>) bagi unit kerja. Selain itu, menyusun <i>draft</i> artikel analisis <i>Economic Outlook</i> 2020 beserta dengan pedoman penyusunannya merupakan bentuk komitmen terhadap mutu <i>output</i> Pusat Kajian Anggaran yang berkelanjutan.</p> <p><b>Peran dan Kedudukan PNS:</b>  <b>a) Manajemen ASN</b>  Dalam mengerjakan proyek aktualisasi, termasuk pada tahapan-tahapan kegiatan ini, penulis selalu</p>	<p>Anggaran yang andal terwujud.</p> <p><b>c) Akuntabel</b>  Dengan melapor kepada mentor dan menyusun laporan singkat, maka visi Pusat Kajian Anggaran yang akuntabel terwujud.</p> <p><b>Misi Pusat Kajian Anggaran:</b>  <b>a) Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan</b>  Tahapan-tahapan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penulis memberikan fungsi dukungan kajian anggaran yang maksimal bagi anggota DPR RI.</p> <p><b>b) Memperkuat manajemen pengetahuan</b>  Menyusun <i>draft</i> analisis <i>Economic Outlook</i> 2020</p>	<p>penyusunan <i>draft</i> analisis <i>Economic Outlook</i> 2020 beserta dengan pedoman penyusunannya menguatkan nilai profesionalitas.</p> <p><b>c) Integritas</b>  Melakukan koordinasi kepada mentor, serta melakukan penyusunan artikel analisis dan pedoman penyusunannya dengan kejujuran (apa adanya) dan konsistensi menguatkan nilai integritas.</p>

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				<p>berpedoman pada kewajiban dan kode etik ASN yang melekat pada diri penulis.</p> <p><b>b) Pelayanan Publik</b> Memastikan produk pelayanan publik (dalam hal ini adalah pelayanan kepada anggota DPR RI) yang terbaik dengan menguatkan <i>draft</i> artikel analisis <i>Economic Outlook</i> 2020 yang informatif dengan <i>layout</i> yang menarik.</p>	beserta dengan pedoman penyusunannya merupakan bentuk nyata dari upaya memperkuat manajemen pengetahuan bersama.	
4.	Presentasi Internal Pusat Kajian Anggaran	4.1. Mengundang seluruh analis APBN di Pusat Kajian Anggaran untuk menghadiri presentasi internal sebagai bentuk <i>peer-review</i>	<p>1. Surat undangan kegiatan presentasi internal di Pusat Kajian Anggaran</p> <p>2. <i>File</i> presentasi <i>draft</i> artikel analisis <i>Economic Outlook</i> 2020 dan notulensi kegiatan presentasi, serta daftar hadir.</p>	<p><b>Nilai Dasar PNS:</b></p> <p><b>a) Akuntabilitas</b> Dengan mengadakan presentasi mengenai progres dan hasil sementara proyek aktualisasi kepada rekan kerja Analis APBN dan atasan merupakan bentuk akuntabilitas atas apa yang penulis</p>	<p><b>Visi Pusat Kajian Anggaran:</b></p> <p><b>a) Profesional</b> Dengan mempresentasikan <i>draft</i> artikel <i>Economic Outlook</i> 2020 dan melakukan revisi maka visi Pusat Kajian Anggaran yang profesional terwujud.</p> <p><b>b) Andal</b> Dengan melakukan presentasi di hadapan <i>peers</i></p>	<p><b>a) Akuntabilitas</b> Presentasi kepada <i>peers</i> dan atasan, serta pelaporan kepada mentor dan penyusunan laporan singkat merupakan bentuk</p>

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<p>4.2. Melakukan presentasi internal di depan seluruh Analis APBN Pusat Kajian Anggaran</p> <p>4.3. Melakukan revisi atas saran dan masukan dari <i>peers</i> Analis APBN Pusat Kajian Anggaran apabila ada</p> <p>4.4. Konsultasi dengan mentor mengenai artikel akhir yang sudah direvisi</p>	<p>3. <i>Draft</i> artikel analisis <i>Economic Outlook</i> 2020 yang sudah direvisi (apabila ada)</p> <p>4. Laporan Singkat (Lapsing) konsultasi dengan mentor</p>	<p>kerjakan. Selain itu, adanya laporan kepada mentor disertai dengan penyusunan laporan singkat juga merupakan bentuk akuntabilitas penulis.</p> <p><b>b) Nasionalisme</b> Menyelesaikan artikel <i>Economic Outlook</i> dengan segala perbaikan dan masukan, menjadikannya <i>output</i> dukungan keahlian dengan kualitas optimal bagi anggota dewan, sehingga dapat dijadikan referensi atas pengambilan keputusan mengenai segala kebijakan terkait APBN yang lebih objektif dan memihak kepada rakyat.</p> <p><b>c) Etika Publik</b> Melakukan presentasi di hadapan <i>peers</i> Analis</p>	<p>dan atasan, serta melakukan koordinasi dengan mentor, maka visi Pusat Kajian Anggaran yang andal terwujud.</p> <p><b>c) Akuntabel</b> Dengan melakukan presentasi di hadapan <i>peers</i> dan atasan, serta melapor kepada mentor dan menyusun laporan singkat, maka visi Pusat Kajian Anggaran yang akuntabel terwujud.</p> <p><b>Misi Pusat Kajian Anggaran:</b></p> <p><b>a) Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan</b> Tahapan-tahapan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penulis memberikan fungsi dukungan kajian</p>	<p>akuntabilitas penulis.</p> <p><b>b) Profesionalitas</b> Upaya penulis melakukan serangkaian kegiatan presentasi <i>Economic Outlook</i> 2020 menguatkan nilai profesionalitas.</p> <p><b>c) Integritas</b> Melakukan koordinasi kepada mentor, serta melakukan presentasi progres proyek aktualisasi dengan kejujuran (apa adanya) dan konsistensi menguatkan nilai integritas.</p>

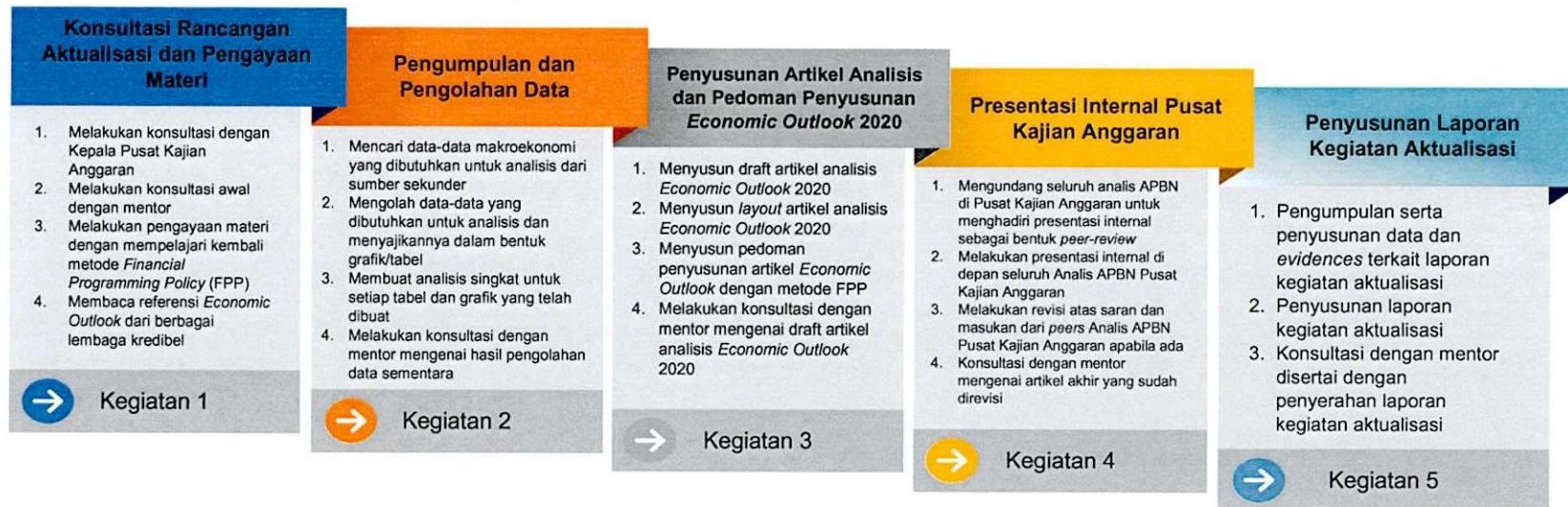
No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				<p>APBN dan atasan, serta konsultasi bersama mentor dengan memperhatikan etika dan sopan santun.</p> <p><b>d) Komitmen Mutu</b>  Menginisiasi proyek aktualisasi yang dilanjutkan dengan kegiatan ini merupakan sebuah pembaruan (<i>novelty</i>) yang bermanfaat (<i>expediency</i>) bagi unit kerja. Selain itu, mengadakan presentasi internal untuk mendapatkan <i>feedbacks</i> dari <i>peers</i> dan atasan merupakan bentuk komitmen penulis meningkatkan mutu artikel analisis.</p> <p><b>Peran dan Kedudukan PNS:</b>  <b>a) Manajemen ASN</b></p>	<p>anggaran yang maksimal bagi anggota DPR RI.</p> <p><b>b) Memperkuat manajemen pengetahuan</b>  Mengadakan presentasi <i>draft</i> artikel <i>Economic Outlook</i> 2020 dan melakukan revisi merupakan bentuk nyata dari upaya memperkuat manajemen pengetahuan.</p>	

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				<p>Dalam mengerjakan proyek aktualisasi, termasuk pada tahapan-tahapan kegiatan ini, penulis selalu berpedoman pada kewajiban dan kode etik ASN yang melekat pada diri penulis.</p> <p><b>b) Pelayanan Publik</b> Memastikan produk pelayanan publik (dalam hal ini adalah pelayanan kepada anggota DPR RI) yang terbaik dengan menguatkan kualitas dan mutu artikel melalui <i>feedbacks</i> dari <i>peers</i>, senior, dan atasan.</p> <p><b>c) Whole of Government (WOG)</b> Mengadakan presentasi di hadapan seluruh Analis APBN (PADEM, Pendapatan dan Pembiayaan, Belanja</p>		

No.	Kegiatan	1.	2.	Tahapan Kegiatan	3.	4.	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelajaran	5.	Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi	6.	Penguatan Nilai Organisasi
5.	Penyusunan Laporan Kegiatan Aktualisasi				5.1. Pengumpulan data dan <i>evidences</i> yang diperlukan dalam laporan kegiatan aktualisasi yang disajikan pada bagian Lampiran Laporan Aktualisasi 5.2. Penyusunan laporan kegiatan aktualisasi terkait laporan <i>evidences</i> data dan penyusunan serta pengumpulan data dan laporan kegiatan aktualisasi konsultasi dengan mentor disertai dengan penyerahan laporan	1. Tercumpulnya data dan <i>evidences</i> yang diperlukan dalam laporan kegiatan aktualisasi yang disajikan pada bagian Lampiran Laporan Aktualisasi 2. Laporan Kegiatan Aktualisasi 3. Catatan Hasil Penyerahan Laporan Aktualisasi	1. Tercumpulnya data dan <i>evidences</i> yang diperlukan dalam laporan kegiatan aktualisasi yang disajikan pada bagian Lampiran Laporan Aktualisasi 2. Laporan Kegiatan Aktualisasi 3. Catatan Hasil Penyerahan Laporan Aktualisasi	<p>Pemerintah Pusat, dan Transfer Daerah &amp; Dana Desa) untuk memperoleh masukan dari seluruh bidang di Pusat Kajian Anggaran, mewujudkan kolaborasi dari keberagaman bidang kerja.</p>	Nilai Dasar PNS: <b>a) Akuntabilitas</b> Dengan mengumpulkan data dan <i>evidences</i> untuk membuat laporan kegiatan aktualisasi yang sesuai dengan kondisi yang ada merupakan bentuk akuntabilitas atas apa yang penulis kerjakan. Selain itu, adanya laporan kepada mentor disertai dengan penyusunan laporan singkat juga merupakan bentuk akuntabilitas penulis. <b>b) Andal</b> Dengan melakukan koordinasi dengan mentor, maka visi Pusat Kajian Anggaran yang profesional. <b>c) Akuntabel</b> Dengan melapor kepada mentor dan menyusun laporan singkat, maka visi terwujud.	<b>a) Profesional</b> Mampu menyajikan laporan hasil kegiatan aktualisasi mewujudkan visi Pusat Kajian Anggaran yang profesional. <b>b) Andal</b> Dengan melakukan koordinasi dengan mentor, maka visi Pusat Kajian Anggaran yang andal terwujud. <b>c) Akuntabel</b> Dengan melapor kepada mentor dan menyusun laporan singkat, maka visi terwujud.	<b>a) Akuntabilitas</b> Penyusunan laporan kegiatan aktualisasi, serta pelaporan kepada mentor dan penyusunan laporan singkat merupakan bentuk akuntabilitas penulis. <b>b) Profesionalitas</b> Upaya melakukan serangkaian kegiatan	

put / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
4.	5.	6.	7.
	<p>b) <b>Etika Publik</b> Melakukan konsultasi dengan mentor dengan memperhatikan etika dan sopan santun.</p> <p>c) <b>Komitmen Mutu</b> Menginisiasi proyek aktualisasi yang diakhiri dengan kegiatan ini merupakan sebuah pembaruan (<i>novelty</i>) yang bermanfaat (<i>expediency</i>) bagi unit kerja.</p> <p><b>Peran dan Kedudukan PNS:</b></p> <p>a) <b>Manajemen ASN</b> Dalam mengerjakan proyek aktualisasi, termasuk pada tahapan-tahapan kegiatan ini, penulis selalu berpedoman pada kewajiban dan kode etik ASN yang melekat pada diri penulis.</p>	<p>Pusat Kajian Anggaran yang akuntabel terwujud.</p> <p><b>Misi Pusat Kajian Anggaran:</b></p> <p>a) <b>Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan</b> Tahapan-tahapan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penulis memberikan fungsi dukungan kajian anggaran yang maksimal bagi anggota DPR RI.</p>	<p>aktualisasi yang tertuang dalam laporan kegiatan aktualisasi secara umum mengasah kemampuan dan keahlian, yang kemudian menguatkan nilai profesionalitas.</p> <p>c) <b>Integritas</b> Menyusun laporan kegiatan aktualisasi serta melakukan koordinasi kepada mentor, dengan kejujuran (apa adanya sesuai dengan kondisi yang ada) dan konsistensi dalam pelaporan menguatkan nilai integritas.</p>

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Ou
1.	2.	3.	
		kegiatan aktualisasi	



GAMBAR 5. ALUR KEGIATAN DAN TAHAPAN KEGIATAN AKTUALISASI

Keterangan:



Tahapan kegiatan tambahan

Tahapan kegiatan dihapus



Tahapan kegiatan sama/ekuivalen

TABEL 3. PERBEDAAN KEGIATAN DAN TAHAPAN KEGIATAN PADA RANCANGAN DAN LAPORAN AKTUALISASI

No.	Rancangan Aktualisasi		Laporan Aktualisasi	
	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Kegiatan	Tahapan Kegiatan
1.	Konsultasi Rancangan Aktualisasi dan <i>Brainstorming</i>	Melakukan konsultasi dengan mentor	Konsultasi Rancangan Aktualisasi dan Pengayaan Materi	Melakukan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran
		Melakukan pengayaan materi dengan mempelajari kembali metode <i>Financial Programming Policy</i> (FPP) oleh World Bank		Melakukan konsultasi awal dengan mentor
				Melakukan pengayaan materi dengan mempelajari kembali metode <i>Financial Programming Policy</i> (FPP)
				Membaca referensi <i>Economic Outlook</i> dari berbagai lembaga kredibel

2.	Pengumpulan dan Pengolahan Data	Mencari data-data makroekonomi yang dibutuhkan untuk analisis dari sumber sekunder	Pengumpulan dan Pengolahan Data	Mencari data-data makroekonomi yang dibutuhkan untuk analisis dari sumber sekunder
		Melakukan kompilasi data-data makroekonomi yang dibutuhkan untuk analisis		Mengolah data-data yang dibutuhkan untuk analisis dan menyajikannya dalam bentuk grafik/tabel
		Mengolah data-data yang dibutuhkan untuk analisis dan menyajikannya dalam bentuk grafik/tabel		Membuat analisis singkat untuk setiap tabel dan grafik yang telah dibuat
		Konsultasi dengan mentor mengenai hasil pengolahan data sementara		Melakukan konsultasi dengan mentor mengenai hasil pengolahan data sementara
3.	Penyusunan Artikel Analisis	Menyusun <i>draft</i> artikel analisis	Penyusunan Artikel Analisis dan Pedoman Penyusunan <i>Economic Outlook</i> 2020	Menyusun <i>draft</i> artikel analisis <i>Economic Outlook</i> 2020
		Konsultasi dengan mentor		Menyusun <i>layout</i> artikel analisis <i>Economic Outlook</i> 2020
				Menyusun pedoman penyusunan artikel <i>Economic Outlook</i> dengan metode FPP
				Melakukan konsultasi dengan mentor mengenai <i>draft</i> artikel analisis <i>Economic Outlook</i> 2020

4.	Presentasi Internal	Mengundang seluruh Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran untuk hadir presentasi internal sebagai bentuk <i>peer-review</i>	Presentasi Internal Pusat Kajian Anggaran	Mengundang seluruh analis APBN di Pusat Kajian Anggaran untuk menghadiri presentasi internal sebagai bentuk <i>peer-review</i>
		Melakukan presentasi internal di depan seluruh Analis APBN Pusat Kajian Anggaran		Melakukan presentasi internal di depan seluruh Analis APBN Pusat Kajian Anggaran
		Melakukan revisi atas saran dan masukan dari <i>peers</i> apabila ada		Melakukan revisi atas saran dan masukan dari <i>peers</i> Analis APBN Pusat Kajian Anggaran apabila ada
		Konsultasi dengan mentor mengenai artikel final yang sudah direvisi		Konsultasi dengan mentor mengenai artikel akhir yang sudah direvisi
5.	Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan	Pengumpulan data terkait laporan hasil kegiatan	Penyusunan Laporan Kegiatan Aktualisasi	Pengumpulan serta penyusunan data dan <i>evidences</i> terkait laporan kegiatan aktualisasi
		Penyusunan laporan kegiatan		Penyusunan laporan kegiatan aktualisasi
		Konsultasi dengan mentor		Konsultasi dengan mentor disertai dengan penyerahan laporan kegiatan aktualisasi

Perubahan kegiatan dan tahapan kegiatan antara rancangan aktualisasi dan laporan aktualisasi adalah sebagai berikut:

**1. Kegiatan 1: Konsultasi Rancangan Aktualisasi dan Pengayaan Materi**

Pada rancangan aktualisasi, Kegiatan 1 terdiri dari 2 tahapan kegiatan. Namun pada laporan aktualisasi, kegiatan ini terdiri dari 4 tahapan kegiatan dengan 2 tahapan kegiatan tambahan, yaitu melakukan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran dan membaca referensi *Economic Outlook* dari berbagai lembaga kredibel. Pertimbangan penambahan tahapan kegiatan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran adalah karena proyek aktualisasi ini akan memberikan kontribusi inovasi kepada unit kerja, maka sudah sepatutnya bahwa proses pengerjaan proyek aktualisasi ini diketahui dan disetujui oleh pimpinan unit kerja, dalam hal ini adalah Kepala Pusat Kajian Anggaran. Selanjutnya, pertimbangan penambahan tahapan kegiatan membaca referensi *Economic Outlook* dari berbagai lembaga kredibel adalah untuk memberikan gambaran, mengenai *Economic Outlook* dan kemudian diadaptasi ke dalam konsep *Economic Outlook* dari Pusat Kajian Anggaran.

**2. Kegiatan 2: Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Pada rancangan aktualisasi, Kegiatan 2 memuat 4 tahapan kegiatan, sementara pada laporan aktualisasi, kegiatan ini juga memuat 4 tahapan kegiatan namun dengan 1 tahapan kegiatan yang berbeda. Pada rancangan aktualisasi, tahapan kegiatan ketiga adalah melakukan kompilasi data-data makroekonomi yang dibutuhkan untuk analisis. Tahapan kegiatan ini kemudian dihapus karena kompilasi data-data makroekonomi merupakan hasil/output dari tahapan kegiatan 1, yaitu mencari data-data makroekonomi yang dibutuhkan untuk analisis dari sumber sekunder (adanya tumpang tindih antara tahapan kegiatan 1 dan 2). Pada laporan aktualisasi, terdapat tahapan kegiatan baru, yaitu membuat analisis singkat untuk setiap tabel dan

grafik yang telah dibuat. Penambahan tahapan kegiatan ini antara lain dimaksudkan agar memberikan *highlight* singkat mengenai kesimpulan dari tabel/grafik yang telah dihasilkan. Perumusan *highlight* tersebut akan membantu memberikan gagasan-gagasan utama dalam artikel analisis *Economic Outlook* 2020 ini sehingga arah analisis dalam artikel menjadi lebih jelas.

### **3. Kegiatan 3: Penyusunan Artikel Analisis dan Pedoman Penyusunan *Economic Outlook* 2020**

Pada rancangan aktualisasi, Kegiatan 3 memuat 2 tahapan kegiatan. Akan tetapi, pada laporan aktualisasi, kegiatan ini memuat 4 tahapan kegiatan dengan 2 tahapan kegiatan tambahan, yaitu menyusun *layout* artikel analisis *Economic Outlook* 2020 dan menyusun pedoman penyusunan artikel *Economic Outlook* dengan metode FPP. Latar belakang ditambahkannya tahapan kegiatan penyusunan *layout* artikel analisis *Economic Outlook* 2020 ini adalah adanya kebutuhan penyusunan *layout* halaman untuk artikel *Economic Outlook* 2020 agar lebih menarik sehingga dapat menjadi *point of interest* dari buku PADEM. Yang dimaksud dalam *point of interest* adalah bagian dari buku PADEM yang menjadi *highlight* analisis yang mendasari analisis prediksi per variabel makroekonomi. Sementara, alasan penambahan tahapan kegiatan menyusun pedoman penyusunan artikel *Economic Outlook* dengan metode FPP adalah untuk memberikan pedoman bagi Analis APBN lain di Pusat Kajian Anggaran agar dapat menyusun *Economic Outlook* di periode berikutnya, sehingga ada keberlanjutan dari produk *Economic Outlook* ini untuk setiap periode penyusunan buku PADEM. Selain itu, pembuatan pedoman penyusunan artikel *Economic Outlook* ini memastikan bahwa manfaat proyek aktualisasi ini tidak hanya dirasakan oleh penulis, namun juga bagi Analis APBN lain dan Pusat Kajian Anggaran secara umum.

### **4. Kegiatan 4: Presentasi Internal Pusat Kajian Anggaran**

Baik pada rancangan aktualisasi dan laporan aktualisasi, Kegiatan 4 memuat 4 tahapan kegiatan yang sama/ekuivalen (tidak ada perubahan/penghapusan/penambahan tahapan kegiatan).

**5. Kegiatan 5: Penyusunan Laporan Kegiatan Aktualisasi**

Baik pada rancangan aktualisasi dan laporan aktualisasi, Kegiatan 5 memuat 3 tahapan kegiatan yang sama/ekuivalen (tidak ada perubahan/penghapusan/penambahan tahapan kegiatan).

Selain itu, hanya terdapat perbedaan minor pada redaksional di beberapa penamaan kegiatan/tahapan kegiatan yang tidak mengubah substansi dari kegiatan/tahapan kegiatan sehingga secara umum sama/ekuivalen dengan yang diajukan pada rancangan aktualisasi.

menangis ..... :')

:')      :')

## BAB IV

### PELAKSANAAN AKTUALISASI

#### A. Penjelasan Pelaksanaan Aktualisasi

##### 1. Kegiatan 1: Konsultasi Rancangan Aktualisasi dan Pengayaan Materi

Secara garis besar, kegiatan ini memuat konsultasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan pengayaan materi, yaitu mempelajari kembali materi mengenai metode analisis yang akan digunakan dan referensi artikel yang diterbitkan oleh berbagai lembaga nasional dan internasional.

##### 1.1. Melakukan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran

Konsultasi ini bertujuan untuk memaparkan rencana proyek aktualisasi CPNS Analis APBN kepada pimpinan unit kerja, yaitu Kepala Pusat Kajian Anggaran, Bapak Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si., sekaligus mengkonsultasikan feasibility dari proyek aktualisasi tersebut. Konsultasi dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 09.30 WIB di Ruang Rapat Kepala Pusat Kajian Anggaran.



GAMBAR 6. KONSULTASI DENGAN KEPALA PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Konsultasi sesi ini diikuti oleh 4 orang CPNS Analis APBN Angkatan Latsar II untuk mengkonsultasikan progres proyek aktualisasi mereka dan 6 orang CPNS Analis APBN Angkatan

Latsar III untuk mengkonsultasikan rencana proyek aktualisasi masing-masing. Hasil konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran dipaparkan secara ringkas pada Laporan Singkat (Lapsing) yang dicantumkan pada Lampiran 1.

1.2. Melakukan konsultasi awal dengan mentor

Konsultasi ini bertujuan untuk menginformasikan rencana kegiatan aktualisasi beserta dengan pembuatan dan penyusunan *evidences* yang berkaitan langsung dengan persetujuan mentor. Konsultasi dilaksanakan pada tanggal 3 September 2019 pukul 13.30 WIB di Ruang 603 Pusat Kajian Anggaran. Hasil konsultasi dengan mentor dipaparkan secara ringkas pada Laporan Singkat (Lapsing) yang dicantumkan pada Lampiran 2.



GAMBAR 7. KONSULTASI AWAL DENGAN MENTOR

1.3. Melakukan pengayaan materi dengan mempelajari kembali metode *Financial Programming Policy* (FPP)

Pengayaan materi dilaksanakan dengan tujuan menyegarkan kembali materi metode analisis *Financial Programming Policy* yang pernah disampaikan oleh konsultan yang ditunjuk oleh World Bank, Bapak Dhaniel Ilyas di Pusat Kajian Anggaran. Metode FPP inilah yang akan digunakan untuk membuat analisis *Economic Outlook* 2020. Tahapan kegiatan ini dilaksanakan secara mandiri sejak tanggal 2 September 2019 di ruang 603 Pusat Kajian Anggaran. *Output* dari tahapan kegiatan

pengayaan materi FPP adalah berupa *outline* pedoman penulisan *Economic Outlook* dengan metode FPP yang dicantumkan pada Lampiran 3.

1.4. Membaca referensi *Economic Outlook* dari berbagai lembaga kredibel

Membaca referensi *Economic Outlook* dari berbagai lembaga kredibel bertujuan untuk memberikan referensi, gambaran, dan pedoman penyusunan *Economic Outlook* yang ilmiah, informatif, dan menarik agar dapat diambil poin-poin kelebihan dan kekurangan masing-masing model *Economic Outlook* dari berbagai lembaga, dan kemudian diadaptasi ke dalam konsep *Economic Outlook* dari Pusat Kajian Anggaran. Tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29-30 Agustus 2019 secara mandiri di ruang 603 Pusat Kajian Anggaran. Berikut adalah daftar referensi *Economic Outlook* dari lembaga lain yang sudah dibaca, dipelajari, dan diadaptasi:

- a. *Indonesia Economic Quarterly: Oceans of Opportunity* dari World Bank;
- b. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2019 dari Bank Indonesia;
- c. Laporan Kebijakan Moneter: Ekonomi, Moneter, dan Keuangan Triwulan II 2019 dari Bank Indonesia;
- d. *Indonesia Economic Outlook Q3-2019* dari LPEM FEB UI;
- e. *Indonesia's Economic Outlook 2019 and Key Economic Challenges* dari paparan PT Bank Mandiri (Persero);

*Output* dari tahapan kegiatan ini adalah *resume* poin-poin yang dapat diambil dan dipelajari dari *Economic Outlook* berbagai lembaga kredibel yang dicantumkan pada Lampiran 4.

TABEL 4. KETERKAITAN KEGIATAN 1 PADA MATA PELATIHAN, VISI-MISI ORGANISASI, DAN NILAI ORGANISASI

Kegiatan 1	Nilai Dasar PNS dan Peran dan Kedudukan ASN	Visi-Misi Organisasi	Nilai Organisasi
	Akuntabilitas	Profesional	Akuntabilitas
	Etika Publik	Andal	Profesionalitas
	Komitmen Mutu	Akuntabel	Integritas
	Manajemen ASN	Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran dewan	
	Pelayanan Publik	Memperkuat manajemen pengetahuan	

Kegiatan ini sangat erat berkaitan dengan nilai **akuntabilitas**, karena dengan melapor kepada atasan dan mentor mengenai proyek aktualisasi yang akan dikerjakan selama 30 hari kerja ke depan, serta pengerjaan Lapsing dari sesi konsultasi kepada atasan dan mentor merupakan bentuk akuntabilitas dari penulis. Akuntabilitas adalah sebuah bentuk kewajiban pertanggungjawaban atas sesuatu yang dikerjakan, oleh karena itu, pelaporan kepada atasan dan mentor yang disertai dengan dokumen bukti pendukung merupakan perwujudan nilai akuntabilitas. Akuntabilitas yang dilaksanakan oleh penulis adalah bentuk sederhana dari akuntabilitas vertikal kepada atasan. Tidak hanya terkait dengan nilai akuntabilitas, tahapan kegiatan ini juga berkaitan dengan nilai **etika publik**. Hal ini dilatarbelakangi bahwa untuk mengadakan pertemuan konsultasi dengan atasan dan mentor, sangat penting untuk memperhatikan etika dasar dalam setiap prosesnya, misalnya pada saat melakukan *arrangement* pertemuan dengan atasan dan mentor harus memperhatikan jadwal dan kesibukan atasan. Contoh lainnya, gagasan proyek aktualisasi harus disampaikan

dengan bahasa yang sopan, lugas, dan informatif, begitu juga saat menjawab pertanyaan dan masukan dari atasan dan mentor. Kegiatan ini juga berkaitan dengan nilai **komitmen mutu**, karena hal yang dikonsultasikan kepada atasan dan mentor merupakan ide yang mengandung pembaruan (ide ini belum ada sebelumnya di unit kerja) dan mengandung unsur kebermanfaatan (manfaatnya jelas, yaitu memperkaya *output* yang sudah ada menjadi lebih ilmiah dan informatif). Selain itu, dengan mempelajari kembali metode analisis yang akan digunakan dan memperkaya diri dengan membaca referensi artikel sejenis turut memastikan bahwa artikel yang akan dibuat memenuhi standar mutu yang baik, sehingga dapat menjadi referensi yang valid bagi anggota dewan. Apabila dilihat keterkaitannya dengan peran dan kedudukan ASN, kegiatan ini berkaitan dengan **manajemen ASN**, karena dalam pelaksanaan kegiatan ini, penulis tetap berpegang teguh pada kewajiban dan kode etik ASN yang terkait. Sebagai contoh adalah pada kode etik; 1) melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi; 2) melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; 9) memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Kegiatan ini juga terkait dengan nilai **pelayanan publik**. Hal ini didasari bagaimana memastikan produk dukungan keahlian kepada anggota dewan, dalam hal ini adalah artikel analisis, merupakan output terbaik yang bisa dihasilkan oleh penulis (atau unit kerja secara umum) dengan memastikan metode dan referensi yang digunakan kuat dan *reliable*.

Apabila dilihat dari keterkaitan terhadap visi dan misi unit kerja, kegiatan ini berhubungan dengan visi **profesional**, karena dalam pelaksanaan kegiatan ini, penulis mempunyai kompetensi

untuk memahami metode analisis serta artikel *economic outlook* sejenis dan penulis juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan tersebut. Tidak hanya terkait dengan visi profesional, kegiatan ini juga terkait dengan visi andal, karena penulis mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana kegiatan dan tahapan kegiatan aktualisasi kepada atasan dan mentor sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta rencana kerja tersebut dapat diimplementasikan. Kegiatan ini juga mewujudkan visi akuntabel, karena penulis mampu mengadakan pertanggungjawaban atas kegiatan ini berupa *evidences* yang dikumpulkan dan dilampirkan di dalam laporan ini. Terkait misi organisasi, kegiatan ini mewujudkan misi **memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran dewan**, karena kegiatan 1 ini merupakan tahapan awal bagi penulis dan unit kerja secara umum untuk mewujudkan dukungan kajian anggaran yang lebih optimal melalui artikel *economic outlook* yang memperkaya *output* tahunan buku PADEM. Selain itu, kegiatan ini juga membantu mewujudkan misi **memperkuat manajemen pengetahuan**. Hal ini dilatarbelakangi bahwa mempelajari metode analisis yang telah disampaikan oleh World Bank, serta membaca referensi terkait mampu memperkaya pengetahuan dan wawasan penulis selaku Analis APBN.

Apabila dilihat keterkaitannya dengan nilai organisasi, kegiatan ini berkaitan dengan **akuntabilitas**, karena dengan melakukan pelaporan kepada atasan dan mentor yang disertai dengan Lapsing merupakan bentuk pertanggungjawaban dari penulis. Kegiatan ini juga berkaitan dengan nilai **profesionalitas**, karena dengan mempelajari metode analisis baru dan membaca referensi terkait mampu meningkatkan

profesionalitas sebagai bekal kemampuan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi selanjutnya. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga membantu perwujudan nilai organisasi **integritas**, yaitu bagaimana berkonsultasi dengan atasan dan mentor dilakukan dengan kejujuran dan konsistensi dalam penyampaian gagasan.

## 2. Kegiatan 2: Pengumpulan dan Pengolahan Data

Secara garis besar, kegiatan ini memuat tahapan-tahapan kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengolahan data sebagai dasar penyusunan artikel *Economic Outlook 2020* yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

### 2.1. Mencari data makroekonomi yang dibutuhkan untuk analisis dari sumber sekunder

Tahapan kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data makroekonomi yang akan dianalisis dalam artikel. Artikel harus berlandaskan data untuk menghasilkan artikel yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Data makroekonomi yang akan digunakan antara lain:

TABEL 5. DAFTAR DATA DAN SUMBER YANG DIGUNAKAN

No.	Data	Sumber
1.	Pertumbuhan ekonomi dunia	IMF
2.	Pertumbuhan volume perdagangan dunia	IMF
3.	Indeks harga global seluruh komoditas	IMF
4.	Harga minyak dunia: WTI Crude dan Brent	IMF
5.	Indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi dunia	<i>Economic Policy Uncertainty</i>
6.	Pertumbuhan ekonomi ASEAN	ICAEW
7.	Pertumbuhan ekonomi Indonesia	IMF
8.	Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia	ADB, World Bank, IMF
9.	Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulanan	BPS
10.	Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut komponen pengeluaran	BPS
11.	Distribusi PDB Indonesia menurut komponen pengeluaran	BPS
12.	Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut komponen lapangan usaha	BPS

13.	Distribusi PDB Indonesia menurut komponen lapangan usaha	BPS
14.	Laju pertumbuhan PDRB setiap provinsi	BPS
15.	Tingkat inflasi	BPS
16.	Tingkat pengangguran terbuka	BPS
17.	TPT menurut tingkat pendidikan	BPS
18.	Tingkat suku bunga	BI, IMF
19.	Nilai tukar rupiah-USD	IMF
20.	Jumlah uang beredar	BI
21.	Defisit neraca pembayaran Indonesia	BI
22.	Defisit transaksi berjalan	BI
23.	Defisit neraca perdagangan	Kementerian Perdagangan
24.	Ekspor-Impor Indonesia	Kementerian Perdagangan
25.	Posisi cadangan devisa	BI
26.	Postur APBN	Kementerian Keuangan

Tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4-6 September 2019 secara mandiri di ruang 603 Pusat Kajian Anggaran. *Output* dari kegiatan ini berupa kompilasi data yang sudah dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk tabel sederhana, yang terlampir pada Lampiran 5.

2.2.) Mengolah data-data yang dibutuhkan untuk analisis dan menyajikannya dalam bentuk grafik/tabel

Tahapan kegiatan ini bertujuan untuk mengolah data menjadi lebih presentable dan informatif melalui penggunaan berbagai jenis grafik dan tabel untuk dilengkapi dalam badan artikel. Beberapa data disajikan tetap dalam bentuk atas dasar alasan bahwa tidak semua data dapat disajikan baik dalam bentuk grafik, sekaligus sebagai bentuk variasi visualisasi data. Data yang tetap dipertahankan dalam bentuk tabel, antara lain data pertumbuhan volume perdagangan dunia, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, tingkat pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan, dan postur APBN. Pengolahan data menjadi grafik dan tabel dilakukan dengan memanfaatkan fitur dari Microsoft Word. Tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9-10 September 2019 secara mandiri di ruang 603 Pusat

Kajian Anggaran. *Output* dari tahapan kegiatan ini adalah berupa grafik dan tabel yang akan dimasukkan ke dalam artikel, yang dicantumkan pada bagian Lampiran 6.

2.3. Membuat analisis singkat untuk setiap tabel dan grafik yang telah dibuat

Tahapan kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan bantuan *outline* untuk penulisan badan artikel. Dengan sudah tersedianya tabel dan grafik hasil pengolahan data, disertai dengan analisis singkat dari tabel dan grafik tersebut, maka penulisan artikel akan menjadi lebih mudah karena sudah ada gambaran *outline*-nya. Tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 September 2019 secara mandiri di ruang 603 Pusat Kajian Anggaran. *Output* dari tahapan kegiatan ini adalah berupa analisis singkat dari setiap tabel dan grafik yang akan dimuat dalam artikel, dilampirkan pada bagian Lampiran 6.

2.4. Melakukan konsultasi dengan mentor mengenai hasil pengolahan data sementara

Tahapan kegiatan ini bertujuan untuk berkonsultasi mengenai progres pengerjaan aktualisasi hingga kegiatan 2. Konsultasi dilakukan pada Kamis, 12 September 2019 pukul 13.00-selesai di ruang 603 Pusat Kajian Anggaran, membahas *list* data makroekonomi yang akan digunakan. Gambaran mengenai hasil konsultasi disajikan dalam bentuk Lapsing pada Lampiran 7.

TABEL 6. KETERKAITAN KEGIATAN 2 PADA MATA PELATIHAN, VISI-MISI ORGANISASI, DAN NILAI ORGANISASI

Kegiatan 2	Nilai Dasar PNS dan Peran dan Kedudukan ASN	Visi-Misi Organisasi	Nilai Organisasi
	Akuntabilitas	Profesional	Akuntabilitas
	Etika Publik	Andal	Profesionalitas
	Komitmen Mutu	Akuntabel	Integritas
	Manajemen ASN	Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran dewan	
	Pelayanan Publik	Memperkuat manajemen pengetahuan	

Kegiatan ini terkait dengan nilai akuntabilitas. Hal ini didasari dengan pelaporan progres pelaksanaan aktualisasi kepada mentor yang disertai dengan penyusunan Lapsing sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis atas tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kegiatan ini juga terkait dengan nilai etika publik, karena dalam melakukan konsultasi kepada mentor harus tetap didasarkan pada nilai etika, misalnya mengadakan *arrangement* pertemuan dengan memperhatikan kesibukan mentor, serta menyampaikan progres aktualisasi dengan sopan dan informatif. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga terkait dengan komitmen mutu. Hal ini karena dalam penyusunan artikel, penulis berupaya memastikan bahwa data yang akan dianalisis merupakan data yang representatif terhadap isu/topik yang akan ditulis dan data yang dapat dipercaya. Dengan menggunakan data yang berkualitas, kemudian disertai dengan visualisasi data yang informatif, maka artikel yang ditulis akan menjadi artikel yang bermutu dan layak untuk diberikan kepada anggota dewan. Secara umum, pelaksanaan kegiatan 2 merupakan kegiatan yang mendukung

upaya penulis mewujudkan proyek pembaruan yang membawa manfaat bagi unit kerja, sehingga berkaitan dengan esensi nilai komitmen mutu. Apabila dilihat dari peran dan kedudukan ASN, kegiatan ini berkaitan dengan manajemen ASN, yaitu bagaimana penulis tetap berpegang teguh pada kode etik dan kewajiban ASN. Sebagai contoh adalah pada kode etik; 1) melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi; 2) melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; 9) memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Kemudian, kegiatan ini juga berkaitan dengan pelayanan publik, yaitu dengan memastikan bahwa bentuk pelayanan Pusat Kajian Anggaran (berupa artikel analisis) merupakan bentuk pelayanan yang terbaik dengan memastikan penggunaan basis data yang andal dan *reliable*.

Apabila dilihat dari visi-misi organisasi, kegiatan ini membantu mewujudkan visi **profesional**, karena penulis selaku Analis APBN memiliki kompetensi untuk mencari, menghimpun, mengolah, serta menganalisis data makroekonomi yang dibutuhkan. Penulis juga berkomitmen untuk terus mengembangkan kemampuan *dealing with data* karena kemampuan itu merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang Analis APBN. Kegiatan ini juga berkaitan dengan visi **andal**, yaitu bagaimana penulis dapat berkoordinasi, mengadakan integrasi dan sinkronisasi mengenai progres pelaksanaan kegiatan 2 kepada mentor dan hingga pada tahap ini, segala rencana *feasible* dan dapat diimplementasikan. Bukti bahwa rencana kerja dapat diimplementasikan tercantum pada lampiran berupa seluruh *evidences* pelaksanaan kegiatan 2. Selain itu, kegiatan ini juga mewujudkan visi **akuntabel**, yaitu bagaimana mengadakan tahapan kegiatan konsultasi dengan

mentor yang membahas progres pelaksanaan aktualisasi dan disertai dengan penyusunan Lapsing sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis. Kemudian, terkait dengan misi organisasi, kegiatan 2 ini mewujudkan misi **memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran dewan** karena kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penulis untuk menguatkan fungsi dukungan kajian anggaran dari Pusat Kajian Anggaran berupa peningkatan kualitas *output* tahunan buku PADEM. Dengan memastikan data yang digunakan berkualitas dan disajikan dengan baik, maka secara tidak langsung akan menguatkan fungsi dukungan kajian anggaran kepada dewan karena *output* yang dihasilkan nantinya juga akan berkualitas. Selain itu, kegiatan ini juga merealisasikan misi **memperkuat manajemen pengetahuan**, karena pengetahuan dan keahlian pengolahan data yang diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan 2 ini akan memperkuat pengetahuan dan keahlian penulis selaku Analis APBN yang akan bermanfaat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi di kemudian hari.

Apabila dilihat dari nilai organisasi, kegiatan 2 ini membantu perwujudan nilai **akuntabilitas**, karena terdapat tahapan kegiatan pelaporan kepada mentor dan penyusunan Lapsing sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis atas tahapan kegiatan tersebut. Tidak hanya nilai akuntabilitas, kegiatan ini juga terkait dengan nilai **profesionalitas**, bagaimana proses manajemen data yang dilaksanakan pada kegiatan ini meningkatkan profesionalitas selaku Analis APBN yang juga akan bermanfaat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi ke depannya. Selain itu, kegiatan ini juga terkait dengan nilai **integritas** karena pada saat melakukan pengolahan dan penyajian data, harus dilaksanakan dengan jujur apa adanya,

artinya dalam melakukan penyajian data, data tersebut ditampilkan apa adanya tanpa ada modifikasi substansi data sedikitpun. Dengan penyajian data yang jujur, maka informasi yang terkandung dalam artikel akan valid dan objektif. Selain itu, dalam melakukan tahapan kegiatan konsultasi mentor juga harus dilaksanakan dengan jujur dan konsisten dalam penyampaian gagasan.

### 3. Kegiatan 3: Penyusunan Artikel Analisis dan Pedoman Penyusunan *Economic Outlook* 2020

#### 3.1. Menyusun *draft* artikel analisis *Economic Outlook* 2020

Tahapan kegiatan ini bertujuan untuk menyusun artikel pertama yang akan dipresentasikan di hadapan Analis APBN Pusat Kajian Anggaran. *Draft* pertama terdiri dari 19 halaman A4 dan terdiri dari sekitar 4.700 kata. *Draft* pertama kemudian di-*submit* kepada mentor dan tercantum pada bagian Lampiran 8. Tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13-23 September 2019 secara mandiri di ruang 603 Pusat Kajian Anggaran.

#### 3.2. Menyusun *layout* artikel analisis *Economic Outlook* 2020

Tahapan kegiatan ini bertujuan untuk menjadikan artikel *Economic Outlook* 2020 lebih menarik, presentable, dan profesional layaknya artikel publikasi dari lembaga-lembaga kredibel seperti IMF, World Bank, atau Bank Indonesia. Penulis menyajikan *Economic Outlook* dalam bentuk artikel biasa tanpa *layout* sehingga dapat disesuaikan dengan *layout* buku PADEM dan juga dengan *layout* apabila terdapat opsi menjadikan artikel ini *attachment* dari buku PADEM. Penyusunan desain *layout* dilakukan dengan bantuan *software* Adobe Illustrator CC. Hasilnya, artikel menjadi berjumlah sekitar 8 halaman. Tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 September 2019 secara mandiri di ruang 603 Pusat Kajian Anggaran. *Output* dari

tahapan kegiatan ini adalah berupa artikel yang sudah di-*layout*, dan terlampir pada bagian Lampiran 9.

3.3) Menyusun pedoman penyusunan artikel *Economic Outlook* dengan metode FPP

Tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24-25 September 2019 secara mandiri di ruang 603 Pusat Kajian Anggaran. Tahapan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Analis APBN cara penyusunan artikel *Economic Outlook* yang akan menjadi bagian dari *output* tahunan Pusat Kajian Anggaran. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan bahwa yang dapat menyusun artikel seperti ini tidak hanya penulis dan transfer pengetahuan dapat dilakukan pada rekan Analis APBN lain, sehingga manfaat dan dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pribadi penulis saja, tetapi juga pada unit kerja secara umum. Pedoman disajikan dalam bentuk artikel pedoman biasa dan dalam bentuk *leaflet* singkat 1 lembar dalam kemasan yang lebih padat dan menarik. *Output* tahapan kegiatan ini, baik artikel pedoman maupun *leaflet*, dicantumkan pada Lampiran 10.

3.4) Melakukan konsultasi dengan mentor mengenai *draft* artikel analisis *Economic Outlook* 2020

Tahapan ini bertujuan untuk melakukan pelaporan dan konsultasi kepada mentor mengenai progres pengerjaan aktualisasi hingga pada kegiatan 3. Tahapan ini dilaksanakan pada Kamis, 26 September 2019 pada pukul 13.30-selesai di ruang 603 Pusat Kajian Anggaran, membahas mengenai progres pembuatan *draft Economic Outlook* 2020 dan rencana presentasi internal pada Senin, 30 September 2019. *Output* dari tahapan kegiatan ini berupa Lapsing yang dilampirkan pada Lampiran 11.

TABEL 7. KETERKAITAN KEGIATAN 3 PADA MATA PELATIHAN, VISI-MISI ORGANISASI, DAN NILAI ORGANISASI

Kegiatan 3	Nilai Dasar PNS dan Peran dan Kedudukan ASN	Visi-Misi Organisasi	Nilai Organisasi
	Akuntabilitas	Profesional	Akuntabilitas
	Etika Publik	Andal	Profesionalitas
	Komitmen Mutu	Akuntabel	Integritas
	Manajemen ASN	Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran dewan	
	Pelayanan Publik	Memperkuat manajemen pengetahuan	

Pelaksanaan kegiatan 3 berkaitan dengan nilai akuntabilitas, yaitu dengan adanya tahapan kegiatan pelaporan dan konsultasi kepada mentor disertai dengan Lapsing, hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban penulis. Selain itu, penulisan artikel yang berbasis data yang *reliable* dan dapat dipertanggungjawabkan, jelas sumber datanya dan disertai daftar pustaka untuk seluruh referensi juga merupakan bentuk akuntabilitas penulis. Selain akuntabilitas, kegiatan 3 ini juga terkait dengan nilai etika publik, yaitu bagaimana melakukan konsultasi kepada mentor dengan tetap memperhatikan etika, misalnya dengan melakukan *arrangement* waktu konsultasi menyesuaikan dengan kesibukan mentor, serta menyampaikan progres aktualisasi dengan sopan. Selain itu, kegiatan ini juga terkait dengan komitmen mutu. Hal ini karena menyusun artikel informatif yang disajikan dengan *layout* menarik merupakan upaya meningkatkan mutu *output* unit kerja. Tidak hanya itu, penyusunan pedoman penyusunan *Economic Outlook* juga merupakan upaya peningkatan mutu output Pusat Kajian Anggaran yang berkelanjutan dengan melakukan transfer

pengetahuan yang lebih mudah kepada rekan Analis APBN lainnya. Secara umum, artikel *Economic Outlook* dan pedoman penyusunannya merupakan suatu pembaruan di unit kerja yang membawa manfaat yang besar, sehingga menyentuh esensi dari komitmen mutu. Apabila dilihat dari peran dan kedudukan ASN, kegiatan 3 ini berkaitan dengan manajemen ASN, yaitu upaya penulis tetap berpegang teguh pada kewajiban dan kode etik ASN dalam setiap pelaksanaan tahapan kegiatan. Sebagai contoh adalah pada kode etik; 1) melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi; 2) melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; 9) memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Selain itu, kegiatan ini juga berkaitan dengan pelayanan publik, yaitu bagaimana memastikan dukungan kajian anggaran terbaik dengan menghasilkan artikel yang informatif dan terkemas dengan menarik, sehingga pesan dan informasi yang ingin disampaikan pada artikel dapat sampai dan mudah diterima oleh anggota dewan.

Apabila terkait dengan visi dan misi organisasi, kegiatan 3 berkaitan dengan nilai **profesional**, karena penulis memiliki kompetensi dalam menulis karya ilmiah, menyusun *layout* artikel, serta menyusun pedoman. Penulis juga akan terus berkomitmen untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan di atas agar dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi ke depannya. Kegiatan ini juga berkaitan dengan nilai **andal**, karena penulis dapat melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan mentor terkait progres pelaksanaan aktualisasi, dan hingga pada kegiatan 3, semua rencana kerja dapat dilaksanakan dan bukti pelaksanaannya tercantum pada lampiran. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga membantu

mewujudkan nilai **akuntabel**, yaitu dengan melakukan pelaporan dan penyusunan Lapsing adalah bentuk pertanggungjawaban atas tahapan kegiatan yang penulis laksanakan. Terkait misi, kegiatan 3 ini membantu perwujudan misi **memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran dewan**, karena tahapan kegiatan penyusunan artikel, *layout*, hingga penyusunan pedoman merupakan kegiatan yang berkontribusi terhadap optimalisasi fungsi dukungan kajian anggaran melalui peningkatan kualitas *output* tahunan Pusat Kajian Anggaran. Selain itu, kegiatan ini juga terkait dengan misi **memperkuat manajemen pengetahuan**, karena dengan menyusun pedoman penyusunan *Economic Outlook* maka akan memperkuat pengetahuan seluruh Analis APBN di bidang PADEM, yang akan bermanfaat bagi keberlanjutan penyusunan artikel ini.

Apabila dilihat dari nilai organisasi, kegiatan ini membantu mewujudkan nilai **akuntabilitas**, karena dengan adanya tahapan kegiatan pelaporan kepada mentor disertai dengan penyusunan Lapsing, merupakan bentuk pertanggungjawaban dari penulis atas tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nilai **profesionalitas** juga terwujud dengan kegiatan 3, yaitu bagaimana proses penyusunan artikel, *layout-ing*, dan penyusunan pedoman mampu memberikan pengetahuan dan keahlian yang lebih bagi penulis sehingga akan memperkaya penulis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ke depan. Nilai **integritas** pun juga terwujud, yaitu bagaimana menyusun artikel ilmiah ini dengan jujur, apa adanya sesuai dengan analisis data dan fakta yang sebenarnya, serta konsisten dari segi substansi analisis. Selain itu, nilai ini juga terwujud melalui tahapan kegiatan konsultasi dengan mentor yang dilaksanakan dengan

jujur dan konsisten pada saat penyampaian gagasan dan progres aktualisasi.

#### 4. Kegiatan 4: Presentasi Internal Pusat Kajian Anggaran

4.1. Mengundang seluruh Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran untuk menghadiri presentasi internal sebagai bentuk *peer-review*

Tahapan kegiatan ini bertujuan untuk mengundang seluruh Analis APBN datang ke sesi presentasi internal yang akan menyajikan *draft Economic Outlook*. Tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada 27 September 2019 di Pusat Kajian Anggaran. Harapannya, dengan diadakannya sesi presentasi ini, penulis memperoleh feedbacks, berupa masukan, kritik, dan saran yang membangun untuk *Economic Outlook* yang lebih baik. Undangan tidak hanya disebar pada bidang PADEM saja, tetapi juga bidang-bidang lain agar memperoleh *feedbacks* yang lebih banyak. *Output* dari tahapan kegiatan ini adalah surat undangan bagi seluruh Analis APBN, yang terlampir pada Lampiran 12.

4.2. Melakukan presentasi internal di depan seluruh Analis APBN Pusat Kajian Anggaran

Tahapan kegiatan ini bertujuan untuk mempresentasikan *draft Economic Outlook* di hadapan seluruh Analis APBN agar mendapatkan feedbacks yang memperkaya artikel. Tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 September 2019 pukul 14.00 di Ruang Rapat 611 Pusat Kajian Anggaran, dihadiri oleh 3 koordinator bidang dan sejumlah Analis APBN. Pada saat sesi tersebut, Kepala Pusat Kajian Anggaran tidak dapat hadir karena beliau sedang mengikuti rapat paripurna, sehingga pada saat sesi presentasi selesai, penulis menemui Kepala Pusat Kajian Anggaran untuk berkonsultasi secara langsung mengenai *draft* tersebut. Kegiatan presentasi berjalan lancar, dengan

catatan masukan dari 4 orang, yaitu Bapak Slamet Widodo S.E., M.E. selaku Koordinator Bidang Transfer Daerah dan Dana Desa, Bapak Robby Alexander Sirait, S.E., M.E., selaku Koordinator Bidang Belanja Pemerintah Pusat, Bapak Dahiri, S.Si., M.Sc., selaku Analis APBN, dan Ibu Rastri Paramita, S.E., M.M., selaku Koordinator Bidang Perencanaan dan Asumsi Ekonomi Makro. *Output* dari tahapan kegiatan ini antara lain *file* presentasi, catatan notulensi, serta daftar hadir yang terlampir pada Lampiran 13.



GAMBAR 8. KEGIATAN PRESENTASI INTERNAL



GAMBAR 9. KONSULTASI DENGAN KEPALA PUSAT  
KAJIAN ANGGARAN

4.3. Melakukan revisi atas saran dan masukan dari *peers* Analisis APBN Pusat Kajian Anggaran apabila ada

Tahapan kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki artikel berdasarkan masukan, kritik, dan saran dari audiens saat presentasi internal, sehingga artikel yang dihasilkan menjadi artikel yang lebih baik dari segi substansi. Tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada 1 Oktober 2019 secara mandiri di ruang 603 Pusat Kajian Anggaran. Seluruh masukan dan saran dimasukkan ke dalam artikel, kemudian ditata kembali pada *layout* yang sudah dibuat pada tahapan kegiatan 3.2. *Output* dari tahapan kegiatan ini adalah *revised draft* yang terlampir pada Lampiran 14.

4.4. Konsultasi dengan mentor mengenai artikel akhir yang sudah direvisi

Tahapan kegiatan ini bertujuan untuk melaporkan dan berkonsultasi mengenai progres, terutama *draft* yang sudah direvisi setelah sesi presentasi internal. Tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada 2 Oktober 2019 di Batam, Kepulauan Riau bersamaan dengan kegiatan tugas dinas luar. *Output* dari tahapan kegiatan ini berupa Lapsing yang terlampir pada Lampiran 15.

TABEL 8. KETERKAITAN KEGIATAN 4 PADA MATA PELATIHAN, VISI-MISI ORGANISASI, DAN NILAI ORGANISASI

Kegiatan 4	Nilai Dasar PNS dan Peran dan Kedudukan ASN	Visi-Misi Organisasi	Nilai Organisasi
	Akuntabilitas	Profesional	Akuntabilitas
	Nasionalisme	Andal	Profesionalitas
	Etika Publik	Akuntabel	Integritas
	Komitmen Mutu		
	Manajemen ASN	Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran dewan	
	Pelayanan Publik	Memperkuat manajemen pengetahuan	
	<i>Whole of Government (WOG)</i>		

Kegiatan 4 berkaitan dengan akuntabilitas. Hal ini dikarenakan adanya tahapan kegiatan presentasi kepada seluruh Analis APBN yang disertai dengan catatan notulensi dan daftar hadir merupakan bentuk pertanggungjawaban atas *draft* artikel yang sudah dibuat. Selain itu, dengan melakukan pelaporan dan konsultasi kepada atasan dan mentor, yang disertai dengan lapsing juga merupakan bentuk pertanggungjawaban dari penulis. Kegiatan ini juga berkaitan dengan nasionalisme. *Output* akhir/*final* dari aktualisasi ini diperoleh melalui kegiatan 4 yang merupakan artikel yang sudah memperoleh *feedbacks* dari *peers* Analis APBN. Artikel ini dapat meningkatkan kualitas dukungan keahlian oleh Pusat Kajian Anggaran berupa referensi yang ilmiah, valid, dan informatif, yang harapannya dapat berujung pada pengambilan keputusan yang objektif pula dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga berkaitan dengan etika

publik. Saat melakukan presentasi harus tetap memperhatikan etika, misalnya penggunaan bahasa yang sopan, gerak gerik dan gestur yang baik, serta mengucapkan terima kasih atas masukan dan saran dari audiens. Pada saat konsultasi kepada atasan dan mentor pun juga harus memperhatikan etika, baik dengan memperhatikan kesibukan beliau saat *arrangement* pertemuan maupun penyampaian gagasan yang baik dan sopan. Kegiatan ini juga berkaitan dengan komitmen mutu, yaitu bagaimana memperoleh *feedbacks* dari rekan Analis APBN, atasan, dan mentor dapat meningkatkan mutu dan kualitas dari tulisan. Secara umum, dengan menyusun artikel dan pedomannya melalui kegiatan 4 ini merupakan suatu pembaruan bagi unit kerja yang membawa manfaat yang besar. Apabila dilihat dari peran dan kedudukan ASN, kegiatan ini berkaitan dengan manajemen ASN, yaitu penulis berusaha terus memegang kewajiban dan kode etik ASN dalam pelaksanaan kegiatan 4. Kegiatan ini juga berkaitan dengan pelayanan publik. Hal ini diwujudkan dengan memperoleh *feedbacks* dari *peers*, atasan, dan mentor terkait substansi tulisan yang akan meningkatkan kualitas tulisan, sehingga secara tidak langsung dukungan keahlian kepada anggota akan semakin optimal. Tidak hanya manajemen ASN dan pelayanan publik, kegiatan ini juga terkait dengan whole of government, bagaimana *feedbacks* didapatkan dari Analis APBN semua bidang, mewujudkan sebuah kolaborasi di tengah keberagaman bidang untuk satu tujuan bersama, yaitu artikel *Economic Outlook* yang lebih bermutu dan berbobot.

Apabila dilihat dari visi dan misi organisasi, kegiatan ini membantu mewujudkan visi **profesional**, bahwa penulis memiliki kemampuan untuk mempresentasikan *draft* artikel dengan lugas dan informatif. Penulis juga akan mengembangkan

kemampuan tersebut sebagai bekal yang bermanfaat bagi pengerjaan tugas dan fungsi di kemudian hari. Visi **andal** juga terwujud dengan mengadakan koordinasi dengan bagian Tata Usaha terkait administrasi persuratan, koordinasi dengan audiens yang memberi masukan, serta dengan mentor terkait dengan progres aktualisasi hingga kegiatan 4. Visi **akuntabel** juga terwujud dengan adanya pertanggungjawaban atas kegiatan presentasi berupa catatan notulensi dan daftar hadir, serta atas kegiatan konsultasi dengan mentor berupa Lapsing. Apabila dilihat dari misi organisasi, kegiatan ini membantu perwujudan misi **memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran dewan**. Hal ini diwujudkan dengan finalisasi artikel *Economic Outlook* yang dihasilkan dari kegiatan 4, menjadikannya *output* yang memaksimalkan kualitas *output* tahunan Pusat Kajian Anggaran, sehingga secara tidak langsung memperkuat dukungan kajian anggaran kepada anggota dewan. Misi **memperkuat manajemen pengetahuan** juga dapat terwujud melalui sesi presentasi proyek yang menyebarkan pengetahuan mengenai *Economic Outlook* itu sendiri serta pengetahuan kerangka makroekonomi secara umum yang memperkaya pengetahuan dari seluruh Analis APBN.

Apabila dilihat dari nilai organisasi, kegiatan ini membantu mewujudkan nilai **akuntabilitas**, karena dengan adanya tahapan kegiatan pelaporan kepada mentor disertai dengan penyusunan Lapsing, merupakan bentuk pertanggungjawaban dari penulis atas tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nilai **profesionalitas** juga terwujud dengan kegiatan 4, yaitu bagaimana proses presentasi artikel mampu memberikan pengetahuan dan keahlian yang lebih bagi penulis sehingga

akan memperkaya penulis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ke depan. Nilai **integritas** pun juga terwujud, yaitu bagaimana menyampaikan artikel ilmiah ini dengan jujur, apa adanya sesuai dengan analisis data dan fakta yang sebenarnya, serta konsisten dari segi substansi analisis. Selain itu, nilai ini juga terwujud melalui tahapan kegiatan konsultasi dengan mentor yang dilaksanakan dengan jujur dan konsisten pada saat penyampaian gagasan dan progres aktualisasi.

## 5. Kegiatan 5: Penyusunan Laporan Kegiatan Aktualisasi

### 5.1. Pengumpulan serta penyusunan data dan *evidences* terkait laporan kegiatan aktualisasi

Tahapan kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan menghimpun seluruh data dan *evidences* untuk penyusunan laporan kegiatan aktualisasi. Tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada 3 Oktober 2019 secara mandiri di Batam, Kepulauan Riau bersamaan dengan kegiatan dinas luar. *Output* dari tahapan kegiatan ini adalah data dan *evidences* yang terlampir pada bagian lampiran laporan ini.

### 5.2. Penyusunan laporan kegiatan aktualisasi

Tahapan kegiatan ini bertujuan untuk menyusun laporan kegiatan aktualisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan aktualisasi selama 30 hari kerja. Penyusunan dilaksanakan pada tanggal 3-7 Oktober 2019. *Output* dari tahapan kegiatan ini adalah laporan kegiatan aktualisasi ini.

5.3. Konsultasi dengan mentor disertai dengan penyerahan laporan kegiatan aktualisasi

Tahapan kegiatan ini bertujuan untuk menyerahkan laporan kegiatan aktualisasi kepada mentor yang diketahui oleh Kepala Pusat Kajian Anggaran. Tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada 7 Oktober 2019. *Output* dari tahapan kegiatan ini adalah berupa catatan hasil penyerahan laporan aktualisasi yang dilampirkan pada Lampiran 16.

TABEL 9. KETERKAITAN KEGIATAN 5 PADA MATA PELATIHAN, VISI-MISI ORGANISASI, DAN NILAI ORGANISASI

Kegiatan 5	Nilai Dasar PNS dan Peran dan Kedudukan ASN	Visi-Misi Organisasi	Nilai Organisasi
	Akuntabilitas	Profesional	Akuntabilitas
	Etika Publik	Andal	Profesionalitas
	Komitmen Mutu	Akuntabel	Integritas
	Manajemen ASN	Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran dewan	

Kegiatan 5 berkaitan dengan nilai akuntabilitas, yaitu diwujudkan dengan pengumpulan data dan *evidences* untuk laporan kegiatan aktualisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Tidak hanya itu, penyusunan catatan hasil penyerahan laporan kegiatan juga bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan kepada mentor dan atasan. Kegiatan ini juga terkait dengan etika publik, yaitu tetap memperhatikan etika ketika menyerahkan laporan kegiatan kepada mentor dengan sepengetahuan atasan, baik dengan tutur kata maupun gestur yang baik. Kegiatan ini juga mewujudkan nilai komitmen mutu. Hal ini didasari dengan upaya menjaga mutu laporan kegiatan

aktualisasi dengan pengumpulan data dan evidences yang mendukung. Secara umum, mengakhiri proyek pembaruan yang bermanfaat bagi unit kerja dengan kegiatan 5 ini merupakan komitmen penulis terhadap mutu dukungan keahlian dari Pusat Kajian Anggaran. Apabila dinilai dari peran dan kedudukan ASN, kegiatan ini menyinggung manajemen ASN, yaitu bagaimana tetap memegang teguh kode etik dan kewajiban ASN dalam pelaksanaan kegiatan 5 ini.

Apabila dilihat dari visi dan misi organisasi, kegiatan ini membantu mewujudkan visi **profesional**, bahwa penulis memiliki kemampuan untuk menyusun laporan kegiatan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Penulis juga akan mengembangkan kemampuan tersebut sebagai bekal yang bermanfaat bagi pengerjaan tugas dan fungsi di kemudian hari. Visi **andal** juga terwujud dengan mengadakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan mentor dan atasan terkait dengan progres aktualisasi hingga kegiatan 5. Visi **akuntabel** juga terwujud dengan adanya pertanggungjawaban atas kegiatan penyerahan laporan kegiatan kepada mentor dengan sepengetahuan atasan berupa catatan hasil penyerahan laporan kegiatan. Apabila dilihat dari misi organisasi, kegiatan ini membantu perwujudan misi **memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran dewan**. Hal ini diwujudkan dengan finalisasi proyek aktualisasi dengan kegiatan 5, menjadikannya sebuah output yang *reliable*, sehingga secara tidak langsung memperkuat dukungan kajian anggaran kepada anggota dewan.

Apabila dilihat dari nilai organisasi, kegiatan ini membantu mewujudkan nilai **akuntabilitas**, karena dengan adanya tahapan kegiatan penyerahan laporan kegiatan aktualisasi kepada

mentor dan atasan disertai dengan penyusunan catatan hasil penyerahan, merupakan bentuk pertanggungjawaban dari penulis atas tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nilai **profesionalitas** juga terwujud dengan kegiatan 5, yaitu bagaimana proses penyusunan laporan mampu memberikan pengetahuan dan keahlian yang lebih bagi penulis sehingga akan memperkaya penulis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ke depan. Nilai **integritas** pun juga terwujud, yaitu bagaimana menyusun laporan kegiatan ini dengan jujur, apa adanya sesuai kondisi yang ada, serta konsisten. Selain itu, nilai ini juga terwujud melalui tahapan kegiatan penyerahan laporan kepada mentor dengan sepengetahuan atasan yang dilaksanakan dengan jujur dan konsisten pada saat penyampaian laporan tersebut.

## B. Stakeholders

Pelaksanaan aktualisasi ini melibatkan Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran, antara lain:

1. Kepala Pusat Kajian Anggaran selaku pimpinan unit kerja, untuk memperoleh konsultasi dan pengarahan;
2. Analis APBN, dalam hal ini secara khusus Analis APBN di Bidang Perencanaan dan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (PADEM). Hal tersebut dikarenakan bidang inilah yang akan melaksanakan keberlanjutan analisis *Economic Outlook* dalam buku PADEM untuk tahun-tahun mendatang.

## C. Kendala dan Strategi Mengatasi Kendala

TABEL 10. KENDALA DAN STRATEGI MENGATASI KENDALA

No.	Kendala	Strategi
1.	Ketersediaan data terbatas (belum ada data yang <i>updated</i> ) yang dapat dimanfaatkan untuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mencoba mencari sumber data lain</li> <li>b. Memanfaatkan data terakhir dan memproyeksikan perekonomian</li> </ol>

	penyusunan <i>Economic Outlook</i> 2020	2020 berdasarkan data terakhir yang tersedia
2.	Referensi contoh <i>Economic Outlook</i> terbatas dari lembaga-lembaga yang kredibel	Mencari referensi artikel/publikasi sejenis dari lembaga-lembaga kredibel yang dapat menjadi proksi bagi <i>Economic Outlook</i>
3.	Pelaksanaan aktualisasi tidak sesuai dengan <i>timeline</i> yang sudah direncanakan, mengingat pengerjaan aktualisasi ini bersamaan dengan pengerjaan <i>output</i> pekerjaan lain dan tugas dinas luar	Merancang <i>time-management</i> yang efektif dengan menyusun <i>timeline</i> dan selalu melakukan <i>monitoring</i> progres untuk masing-masing pekerjaan dengan konsisten

## D. Analisis Dampak

### 1. Hasil Inisiatif

#### a. Individu

Apabila aktualisasi ini dilaksanakan, maka penulis mendapatkan kesempatan habituasi keahlian pengolahan data dan metode analisis yang baru (FPP). Secara tidak langsung, proses pengerjaan aktualisasi ini akan meningkatkan kemampuan dan keahlian penulis yang akan bermanfaat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan di kemudian hari.

Apabila aktualisasi ini tidak dilaksanakan, dampak bagi individu penulis adalah tidak berkembangnya kemampuan dan keahlian penulis dalam metode analisis yang lebih *advanced* dan ilmiah, serta keahlian-keahlian lain yang melekat pada proses pengerjaan aktualisasi ini. Ketika keahlian tersebut tidak berkembang, maka hal tersebut akan berdampak bagi kualitas pekerjaan yang diemban oleh penulis di kemudian hari.

#### b. Unit Kerja

Apabila aktualisasi ini dilaksanakan, maka dampak bagi Pusat Kajian Anggaran adalah adanya peningkatan kualitas substansi produk analisis, secara khusus adalah produk analisis dari bidang Perencanaan dan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (PADEM). Peningkatan kualitas substansi produk ini akan memberikan referensi analisis yang ilmiah, valid, dan *reliable* bagi anggota DPR RI, sehingga harapannya anggota DPR RI puas dengan kinerja dukungan keahlian dari Pusat Kajian Anggaran.

Apabila aktualisasi ini tidak dilaksanakan, dampak bagi Pusat Kajian Anggaran adalah produk analisis, terutama yang dihasilkan oleh Bagian Perencanaan dan Asumsi Dasar Ekonomi Makro akan mengalami stagnasi pada kualitas substansi yang masih sederhana dan belum komprehensif. Belum maksimalnya kualitas analisis akan menurunkan kepuasan anggota DPR RI terhadap bantuan keahlian yang ditawarkan Pusat Kajian Anggaran.

c. Organisasi

Apabila aktualisasi ini dilaksanakan, maka secara umum kualitas dukungan keahlian di bidang analisis APBN terhadap anggota DPR RI akan meningkat, yang kemudian akan berdampak kepada peningkatan kepuasan anggota DPR RI kepada layanan Badan Keahlian DPR RI.

Apabila aktualisasi ini tidak dilaksanakan, maka secara umum pelaksanaan dukungan keahlian yang dilaksanakan oleh Badan Keahlian DPR RI akan mengalami stagnasi dari segi kualitas dan inovasi pelayanan, sehingga kepuasan anggota DPR RI terhadap produk dukungan keahlian dari Badan Keahlian DPR RI akan menurun.

TABEL 11. DAMPAK BAGI PROYEK AKTUALISASI JIKA KEGIATAN DILAKUKAN DAN TIDAK DILAKUKAN

No.	Kegiatan	Dampak Jika Dilakukan	Dampak Jika Tidak Dilakukan
1.	Konsultasi Rancangan Aktualisasi dan Pengayaan Materi	Artikel analisis didasarkan pada persetujuan pimpinan, dukungan teori, dan referensi yang valid	Artikel analisis tidak didasarkan pada persetujuan pimpinan, dukungan teori, dan referensi yang valid
2.	Pengumpulan dan Pengolahan Data	Artikel analisis didasarkan pada dukungan data yang ilmiah	Artikel analisis tidak didasarkan pada dukungan data yang ilmiah
3.	Penyusunan Artikel Analisis dan Pedoman Penyusunan <i>Economic Outlook</i> 2020	Artikel analisis tersusun dengan sistematis dan informatif, serta ilmu mengenai penyusunan <i>Economic Outlook</i> dapat ditransfer kepada Analisis APBN lainnya	Artikel analisis tidak tersusun dengan sistematis dan informatif, serta ilmu mengenai penyusunan <i>Economic Outlook</i> tidak dapat ditransfer kepada Analisis APBN lainnya
4.	Presentasi Internal Pusat Kajian Anggaran	Pimpinan dan rekan unit kerja mengetahui progres dan hasil proyek aktualisasi, serta artikel analisis memperoleh masukan dari Analisis APBN lainnya	Pimpinan dan rekan unit kerja tidak mengetahui progres dan hasil proyek aktualisasi, serta artikel analisis tidak memperoleh masukan dari Analisis APBN lainnya
5.	Penyusunan Laporan Kegiatan Aktualisasi	Terwujudnya pelaksanaan proyek aktualisasi yang akuntabel	Tidak terwujudnya pelaksanaan proyek aktualisasi yang akuntabel

## 2. Nilai Dasar ANEKA

### a. Akuntabilitas

Akuntabilitas, secara khusus adalah akuntabilitas personal, mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, konsistensi, integritas, moral dan etika. Apabila nilai akuntabilitas tidak diterapkan pada pelaksanaan aktualisasi, maka akan ada potensi ketidakjujuran pada proses pengumpulan data, penyusunan artikel, bahkan pada proses penyampaian presentasi hasil aktualisasi. Ketika pelaksanaan aktualisasi ini sudah diikuti dengan praktik-praktik yang tidak jujur, maka hasil analisis akan *biased* dan tidak valid. Ketika hasil analisis *biased*, maka akan berdampak pada pengambilan keputusan yang juga *biased* oleh anggota DPR RI.

### b. Nasionalisme

Nasionalisme, dalam hal ini adalah Nasionalisme Pancasila adalah suatu pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Apabila nilai nasionalisme tidak diterapkan pada pelaksanaan aktualisasi, maka akan muncul aneka permasalahan, misalnya upaya koordinasi yang baik dan berkelanjutan kepada pihak lain (misalnya saat berkoordinasi dengan mentor dan saat presentasi internal) akan terhambat. Sikap tenggang rasa, musyawarah untuk mufakat, saling menghargai, tidak memaksakan kehendak, serta menghormati pendapat orang lain merupakan beberapa esensi butir Pancasila yang harus diterapkan pada saat berkomunikasi dengan orang lain dan esensi nilai dari Pancasila merupakan inti dari nilai nasionalisme.

### c. Etika Publik

Etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan

keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Apabila nilai etika publik tidak diterapkan pada pelaksanaan aktualisasi, maka upaya koordinasi yang baik dan berkelanjutan kepada pihak lain (misalnya saat berkoordinasi dengan mentor dan presentasi internal) juga akan terhambat, sebagaimana nilai nasionalisme di atas. Ketika berkomunikasi dengan orang lain tanpa mengindahkan etika publik, maka komunikasi tersebut tidak akan berjalan efektif dan menghasilkan kesan yang buruk, sehingga akan berdampak bagi proses pengerjaan aktualisasi nantinya.

d. Komitmen Mutu

Komitmen mutu adalah komitmen pelaksanaan tugas/fungsi berorientasi pada mutu, yaitu salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Komitmen mutu dapat dicapai salah satunya dengan peningkatan inovasi dan kreatifitas. Apabila nilai komitmen mutu tidak diterapkan pada pelaksanaan aktualisasi, maka inovasi dan kreatifitas yang terlibat pada penyusunan *Economic Outlook* 2020 juga tidak akan muncul, karena konsep *Economic Outlook* 2020 ini merupakan buah dari inovasi dan kreatifitas. Apabila ide aktualisasi ini tidak muncul akibat absennya inovasi dan kreatifitas, maka kualitas substansi analisis dari Pusat Kajian Anggaran tidak akan berkembang pada mutu yang lebih baik.

e. Anti Korupsi

Nilai anti korupsi adalah nilai yang tertanam dalam diri seseorang untuk menjauhi perilaku penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan pihak-pihak tertentu, baik secara materi maupun nonmateri. Apabila nilai anti korupsi tidak diterapkan pada pelaksanaan aktualisasi, maka akan ada kontradiksi antara tujuan proyek aktualisasi itu

sendiri dengan dampak yang ditimbulkan dari perilaku korupsi. Tujuan proyek aktualisasi adalah memberikan manfaat dan kontribusi, sementara dampak dari perilaku koruptif adalah merugikan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, perilaku koruptif akan meniadakan esensi dari kegiatan aktualisasi itu sendiri.

## E. Jadwal Kegiatan

TABEL 12. *TIME TABLE* KEGIATAN AKTUALISASI

Kegiatan/Tahapan Kegiatan	Agustus			September																				Oktober							
	Tanggal			Tanggal																				Tanggal							
	28	29	30	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	1	2	3	4	7	8	
1. Konsultasi Rancangan Aktualisasi dan Pengayaan Materi																															
1.1. Melakukan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran																															
1.2. Melakukan konsultasi awal dengan mentor																															
1.3. Melakukan pengayaan materi dengan mempelajari kembali metode <i>Financial Programming Policy</i> (FPP)																															
1.4. Membaca referensi <i>Economic Outlook</i> dari berbagai lembaga kredibel																															
2. Pengumpulan dan Pengolahan Data																															
2.1. Mencari data-data makroekonomi yang dibutuhkan untuk analisis dari sumber sekunder																															
2.2. Mengolah data-data yang dibutuhkan untuk analisis dan																															





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penyusunan konsep *Economic Outlook* 2020 dengan metode *Financial Programming Policy* (FPP) yang terintegrasi buku Perencanaan dan Asumsi Dasar Ekonomi Makro merupakan proyek aktualisasi yang telah dilaksanakan selama 30 hari kerja. Proyek aktualisasi ini telah melalui beberapa proses, dari perumusan isu-isu strategis pada unit kerja, dalam hal ini adalah Pusat Kajian Anggaran, kemudian pemilihan isu dengan teknis analisis USG yang mengerucut pada isu belum maksimalnya kualitas substansi produk analisis APBN dari Pusat Kajian Anggaran sebagai salah satu bentuk dukungan

3. Penyusunan Artikel Analisis dan Pedoman Penyusunan *Economic Outlook* 2020, terkait dengan nilai dasar PNS yaitu nilai akuntabilitas, etika publik, dan komitmen mutu. Kegiatan ini juga terkait dengan peran dan kedudukan ASN, yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik.
4. Presentasi Internal Pusat Kajian Anggaran, terkait dengan nilai dasar PNS yaitu nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Kegiatan ini juga terkait dengan peran dan kedudukan ASN, yaitu manajemen ASN, *whole of government* (WOG), dan pelayanan publik.
5. Penyusunan Laporan Kegiatan Aktualisasi, terkait dengan nilai dasar PNS yaitu nilai akuntabilitas, etika publik, dan komitmen mutu. Kegiatan ini juga terkait dengan peran dan kedudukan ASN, yaitu manajemen ASN.

*Output* dari proyek aktualisasi ini adalah berupa artikel *Economic Outlook* dan pedoman penyusunannya. Harapannya, dengan dilaksanakannya proyek aktualisasi ini dapat memberikan kontribusi bagi unit kerja untuk dapat memaksimalkan kualitas dukungan keahlian di bidang kajian anggaran kepada anggota dewan.

## **B. Saran**

Menilai tujuan dan manfaat dari adanya proyek aktualisasi ini, diharapkan unit kerja, dalam hal ini Pusat Kajian Anggaran, dapat memberikan dukungan dan memfasilitasi keberlanjutan dari proyek aktualisasi ini menjadi bagian dari *output* rutin tahunan. Tidak hanya itu, ada baiknya bahwa transfer pengetahuan juga segera dilakukan, agar seluruh Analis APBN, terutama di bidang PADEM memiliki pengetahuan dan keahlian menyusun *Economic Outlook*. Sementara untuk penyelenggara, pelaksanaan Latsar sudah berjalan sangat baik hingga pada tahap pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Perbaikan-perbaikan *minor* pada koordinasi yang lebih baik dengan seluruh pihak terkait akan meningkatkan kelancaran kegiatan Latsar selanjutnya.

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1: TAHAPAN KEGIATAN 1.1 LAPORAN SINGKAT KEPALA PUSAT KAJIAN ANGGARAN



Pusat Kajian Anggaran  
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270  
Telp. (021) 5715730 Fax. (021) 5715933 Laman: [puskajiananggaran.dpr.go.id](http://puskajiananggaran.dpr.go.id)

#### LAPORAN SINGKAT KONSULTASI AKTUALISASI CPNS PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Hari, Tanggal	: Rabu, 20 Agustus 2019
Pukul	: 09.30 s/d 10.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Kepala Pusat Kajian Anggaran Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI
Acara	: Konsultasi Mengenai Gambaran Umum Konsep dan Tema Aktualisasi, Serta Implementasi dan Feasibility Produk Akhir Aktualisasi
Pimpinan	: Dr. Asep Ahmad Saefullah, S.E., M.Si.

#### 1. PEMBUKAAN

Agenda konsultasi mengenai rencana kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan Nadya Ahda selaku calon Analis APBN Ahli Pertama hingga awal Oktober 2019 mendatang dimulai pada pukul 09.30 WIB. Diskusi ini dihadiri oleh Kepala Pusat Kajian Anggaran, Dr. Asep Ahmad Saefullah, S.E., M.Si dan seluruh CPNS Analis APBN Pusat Kajian Anggaran Latsar Angkatan III sejumlah 6 orang. Secara garis besar, bahasan konsultasi yang dilaksanakan adalah mengenai gambaran umum konsep dan tema aktualisasi, serta implementasi dan feasibility produk akhir proyek yang akan diaktualisasikan oleh CPNS Analis APBN.

#### 2. POKOK-POKOK HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan konsultasi yang dilakukan, telah disepakati bahwa konsep aktualisasi yang akan dilaksanakan adalah penyusunan konsep artikel *Economic Outlook* 2020, yang berisi tentang gambaran proyeksi kerangka makroekonomi Indonesia di tahun depan. Produk akhir dari proyek aktualisasi ini adalah berupa artikel *Economic Outlook* 2020 dan pedoman penyusunan artikel *Economic Outlook*. Secara umum, proyek aktualisasi ini dinyatakan feasible selama produk ini bukanlah suatu output yang baru dan terdiri sendiri di Pusat Kajian Anggaran, serta proyek ini tidak berbasis anggaran. Oleh karena itu, *Economic Outlook* ini akan menjadi suatu bagian awal dalam output tahunan Pusat Kajian Anggaran, yaitu buku *Prediksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro (PADEM)* yang terbit pada siklus pendahuluan APBN. Dengan melekat pada buku *PADEM*, *Economic Outlook* ini akan


memberikan gambaran besar mengenai kondisi makroekonomi Indonesia sebelum membahas analisis prediksi per variabel. Adapun untuk jadwal tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 30 hari kerja ke depan adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Minggu ke-						
		Agt	Sept				Okt	
		IV	I	II	III	IV	I	
1.	Konsultasi Rancangan Aktualisasi dan Pengayaan Materi							
2.	Pengumpulan dan Pengolahan Data							
3.	Penyusunan Artikel Analisis dan Pedoman Penyusunan <i>Economic Outlook</i> 2020							
4.	Presentasi Internal Pusat Kajian Anggaran							
5.	Penyusunan Laporan Kegiatan Aktualisasi							

#### 3. PENUTUP

Demikianlah acara konsultasi aktualisasi Nadya Ahda dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran, dan rapat konsultasi ditutup pada pukul 10.30 wib.

Mengetahui,  
KEPALA PUSAT KAJIAN ANGGARAN

  
Dr. Asep Ahmad Saefullah, S.E., M.Si.  
NIP. 19710911 199703 1 003

## LAMPIRAN 2: TAHAPAN KEGIATAN 1.2 LAPORAN SINGKAT MENTOR



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

### LAPORAN SINGKAT KONSULTASI DENGAN MENTOR

Hari, tanggal : Selasa, 3 September 2019  
Pukul : 13.30 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang 603 Pusat Kajian Anggaran  
Kegiatan : Pembahasan rencana kegiatan dan tahapan kegiatan aktualisasi yang sedang dan akan dilaksanakan

#### I. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Pada sesi konsultasi pertama ini, topik pembahasan yang dilaksanakan adalah mengenai progres pengerjaan aktualisasi pada minggu pertama pelaksanaan, yaitu minggu ke-4 bulan Agustus 2019. Sejalan ini, progres yang sudah dilakukan adalah pelaksanaan Kegiatan 1, yaitu Konsultasi Rancangan Aktualisasi dan Pengayaan Materi, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. melakukan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran, dan tahapan kegiatan ini sudah dilaksanakan pada 28 Agustus 2019 dengan Lapsing yang akan terlampir dalam laporan;
2. melakukan konsultasi dengan mentor dan sedang berlangsung pada 3 September 2019 dengan Lapsing yang akan terlampir dalam laporan;
3. melakukan pengayaan materi dengan mempelajari kembali metode *Financial Programming Policy* (FPP) yang dilaksanakan pada 2 September 2019 dengan outline pedoman penulisan yang akan terlampir dalam laporan;
4. membaca referensi *Economic Outlook* dari berbagai lembaga kredibel yang dilaksanakan pada 29-30 Agustus 2019 dengan *resume* yang akan terlampir dalam laporan.

Selain itu, pada sesi konsultasi kali ini, dilakukan koordinasi mengenai rencana *evidences* yang akan dimuat dalam Laporan Aktualisasi yang membutuhkan persetujuan dan tanda tangan dari mentor, misalnya Lapsing dan dokumentasi.

#### II. PENUTUP

Demikianlah konsultasi dengan mentor dilaksanakan. Konsultasi ini ditutup pada pukul 14.30 WIB

Jakarta, 3 September 2019

Rastri Paramita, S.E., M.M.  
198001262014022002

### LAMPIRAN 3: TAHAPAN KEGIATAN 1.3 *OUTLINE* PEDOMAN

- I. Definisi dan tujuan metode analisis FPP.
- II. *Template Economic Outlook* yang diklasifikasikan per sektor perekonomian:
  - 1) kondisi perekonomian dunia dan ASEAN yang secara relevan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia secara umum;
  - 2) kondisi sektor riil;
  - 3) kondisi sektor moneter;
  - 4) kondisi sektor eksternal;
  - 5) kondisi sektor publik;
  - 6) arah kebijakan APBN 2019 dan RAPBN 2020; dan
  - 7) risiko ekonomi ke depan.
- III. *List* variabel ekonomi yang dijadikan pengukuran kinerja perekonomian untuk setiap sektor beserta dengan sumber data.
- IV. *Feature: highlight* isu perekonomian yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah.
- V. Ruang pengembangan metode analisis FPP yang lebih *advanced* oleh World Bank: sebuah *roadmap*.

#### LAMPIRAN 4: TAHAPAN KEGIATAN 1.4 RESUME REFERENSI

**1. *World Bank: Executive Summary of Indonesia Economic Quarterly: Oceans of Opportunity***

- a. Format tulisan:
  - 1) sektor riil: struktur pertumbuhan ekonomi/PDB;
  - 2) sektor eksternal: neraca berjalan, neraca pembayaran, dan aliran modal masuk/keluar;
  - 3) sektor riil: inflasi;
  - 4) sektor publik: kondisi fiskal;
  - 5) proyeksi kinerja per sektor;
  - 6) *feature*: isu yang perlu di-*highlight* oleh pemerintah.
- b. Artikel berjumlah 2 halaman dan terdiri dari 1300 kata.
- c. Tidak memuat analisis kondisi perekonomian dunia yang relevan dengan perekonomian Indonesia dan kondisi sektor moneter.
- d. Seluruh grafik dimuat di bagian akhir artikel.

**2. *Bank Indonesia: Ringkasan Eksekutif dari Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I 2019***

- a. Format tulisan:
  - 1) sektor riil: struktur pertumbuhan ekonomi/PDB;
  - 2) sektor eksternal: neraca berjalan, neraca pembayaran, aliran modal masuk/keluar, cadangan devisa;
  - 3) sektor moneter: nilai tukar;
  - 4) sektor riil: inflasi;
  - 5) sektor moneter: pasar keuangan dan perbankan;
  - 6) kebijakan yang ditempuh.
- b. Artikel berjumlah 6 halaman dan terdiri dari 4000 kata.
- c. Tidak memuat analisis kondisi perekonomian dunia yang relevan dengan perekonomian Indonesia dan sektor publik (hal ini karena ini adalah publikasi Bank Indonesia, maka lebih berfokus

pada sektor moneter). Analisis ini juga tidak memuat risiko-risiko ekonomi di masa depan.

d. Grafik ditampilkan di awal artikel dengan format infografis.

**3. Bank Indonesia: Ringkasan Eksekutif dari Laporan Kebijakan Moneter: Ekonomi, Moneter, dan Keuangan Triwulan II 2019**

a. Format tulisan:

- 1) kebijakan yang ditempuh;
- 2) kondisi perekonomian dunia yang relevan dengan perekonomian Indonesia;
- 3) sektor riil: struktur pertumbuhan ekonomi/PDB;
- 4) sektor eksternal: neraca pembayaran, neraca berjalan, cadangan devisa;
- 5) sektor moneter: nilai tukar rupiah;
- 6) sektor riil: inflasi;
- 7) sektor moneter: pasar keuangan dan perbankan.

b. Artikel berjumlah 3 halaman dan terdiri dari 1500 kata.

c. Tidak memuat kondisi sektor publik karena ini adalah publikasi Bank Indonesia, jadi hanya berfokus pada sektor moneter. Selain itu, juga tidak memuat risiko-risiko ekonomi ke depan.

d. Tanpa grafik, hanya artikel analisis.

**4. LPEM FEB UI: *Indonesia Economic Outlook Q3-2019***

a. Format tulisan:

- 1) kondisi perekonomian dunia yang relevan dengan perekonomian Indonesia;
- 2) sektor riil: struktur pertumbuhan ekonomi/GDP, inflasi;
- 3) sektor eksternal: *foreign direct investment*, neraca berjalan, neraca perdagangan;
- 4) sektor moneter: nilai tukar;
- 5) kebijakan yang ditempuh;
- 6) *feature*: isu yang menjadi *highlight*.

b. Artikel berjumlah 12 halaman dan terdiri dari 4000 kata.

- c. Tidak memuat sektor publik (fiskal) dan risiko-risiko ekonomi ke depan.
- d. Grafik-grafik diletakkan di dalam badan artikel.

**5. Paparan Bank Mandiri: *Indonesia's Economic Outlook 2019 and Key Economic Challenges***

- a. Format tulisan:
  - 1) kondisi perekonomian dunia yang relevan dengan kondisi perekonomian Indonesia;
  - 2) sektor eksternal: transaksi berjalan, neraca pembayaran;
  - 3) sektor riil: struktur pertumbuhan ekonomi/PDB;
  - 4) sektor publik: fiskal;
  - 5) sektor riil: tenaga kerja;
  - 6) sektor moneter: pasar keuangan dan perbankan;
  - 7) *feature*: isu yang menjadi *highlight*.
- b. Artikel dalam bentuk paparan sejumlah 51 *slides*.
- c. Risiko-risiko ekonomi ke depan dimasukkan ke dalam kondisi perekonomian dunia yang relevan dengan perekonomian Indonesia di awal paparan;
- d. Grafik-grafik di dalam badan paparan, menyesuaikan topik.

## LAMPIRAN 5: TAHAPAN KEGIATAN 2.1 KOMPILASI DATA

### Lampiran 5.1 Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Dunia (%)
2017	3.8
2018	3.6
2019*	3.2
2020*	3.5

\*) proyeksi

Sumber: IMF, 2019

### Lampiran 5.2 Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia

Tahun	Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia (%)		
	Dunia	Negara Maju	Negara Berkembang
2017	5.5	4.4	7.4
2018	3.7	3.1	4.7
2019*	2.5	2.2	2.9
2020*	3.7	3.1	4.8

\*) proyeksi

Sumber: IMF, 2019

### Lampiran 5.3 Indeks Harga Global Seluruh Komoditas

Tanggal	Indeks	Tanggal	Indeks	Tanggal	Indeks
2016-01-01	85,39	2017-04-01	111,10	2018-07-01	130,47
2016-02-01	87,39	2017-05-01	108,88	2018-08-01	128,26
2016-03-01	93,65	2017-06-01	105,67	2018-09-01	132,70
2016-04-01	96,66	2017-07-01	108,45	2018-10-01	133,71
2016-05-01	100,54	2017-08-01	111,28	2018-11-01	122,16
2016-06-01	103,15	2017-09-01	114,54	2018-12-01	116,15
2016-07-01	102,82	2017-10-01	116,08	2019-01-01	117,32
2016-08-01	103,25	2017-11-01	120,83	2019-02-01	119,34
2016-09-01	103,32	2017-12-01	122,54	2019-03-01	120,26
2016-10-01	106,73	2018-01-01	129,83	2019-04-01	123,84
2016-11-01	105,53	2018-02-01	127,00	2019-05-01	120,81
2016-12-01	111,56	2018-03-01	126,58	2019-06-01	115,82
2017-01-01	115,97	2018-04-01	128,54	2019-07-01	118,27
2017-02-01	116,51	2018-05-01	133,35	2019-08-01	112,80
2017-03-01	111,00	2018-06-01	132,22		

Sumber: Fred St Louis, 2019

**Lampiran 5.4. Harga Minyak Dunia: WTI Crude**

				USD/barel	
Tanggal	Harga	Tanggal	Harga	Tanggal	Harga
2016-01-01	31,70	2017-04-01	51,17	2018-07-01	70,99
2016-02-01	30,35	2017-05-01	48,56	2018-08-01	67,99
2016-03-01	37,77	2017-06-01	45,17	2018-09-01	70,19
2016-04-01	40,96	2017-07-01	46,67	2018-10-01	70,75
2016-05-01	46,85	2017-08-01	48,03	2018-11-01	56,57
2016-06-01	48,75	2017-09-01	49,71	2018-12-01	48,64
2016-07-01	44,89	2017-10-01	51,56	2019-01-01	51,36
2016-08-01	44,75	2017-11-01	56,71	2019-02-01	54,99
2016-09-01	45,17	2017-12-01	57,96	2019-03-01	58,15
2016-10-01	49,89	2018-01-01	63,56	2019-04-01	63,88
2016-11-01	45,62	2018-02-01	62,15	2019-05-01	60,73
2016-12-01	52,01	2018-03-01	62,86	2019-06-01	54,68
2017-01-01	52,56	2018-04-01	66,32	2019-07-01	57,51
2017-02-01	53,40	2018-05-01	69,89	2019-08-01	54,84
2017-03-01	49,58	2018-06-01	67,52		

Sumber: FRED St Louis, 2019

**Lampiran 5.5 Harga Minyak Dunia: Brent**

				USD/barel	
Tanggal	Harga	Tanggal	Harga	Tanggal	Harga
2016-01-01	30,80	2017-04-01	53,06	2018-07-01	74,44
2016-02-01	33,20	2017-05-01	50,87	2018-08-01	73,13
2016-03-01	39,07	2017-06-01	46,89	2018-09-01	78,86
2016-04-01	42,25	2017-07-01	48,69	2018-10-01	80,47
2016-05-01	47,13	2017-08-01	51,37	2018-11-01	65,17
2016-06-01	48,48	2017-09-01	55,16	2018-12-01	56,46
2016-07-01	45,07	2017-10-01	57,62	2019-01-01	59,27
2016-08-01	46,14	2017-11-01	62,58	2019-02-01	64,13
2016-09-01	46,19	2017-12-01	64,21	2019-03-01	66,41
2016-10-01	49,73	2018-01-01	68,99	2019-04-01	71,20
2016-11-01	46,44	2018-02-01	65,42	2019-05-01	70,53
2016-12-01	54,07	2018-03-01	66,45	2019-06-01	63,30
2017-01-01	54,89	2018-04-01	71,63	2019-07-01	64,00
2017-02-01	55,49	2018-05-01	76,65	2019-08-01	59,25
2017-03-01	51,97	2018-06-01	75,19		

Sumber: FRED St Louis, 2019

Lampiran 5.6 Indeks Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi Dunia

Tanggal	GEPU_current	GEPU_ppp	Tanggal	GEPU_current	GEPU_ppp
2016-01-01	153,73	153,36	2017-10-01	153,56	161,74
2016-02-01	161,60	164,20	2017-11-01	149,57	155,32
2016-03-01	170,79	177,84	2017-12-01	147,94	155,95
2016-04-01	145,31	151,23	2018-01-01	124,44	113,27
2016-05-01	137,00	137,71	2018-02-01	121,30	125,17
2016-06-01	251,41	246,55	2018-03-01	152,35	145,57
2016-07-01	262,83	264,83	2018-04-01	147,07	152,80
2016-08-01	150,83	157,26	2018-05-01	177,50	182,37
2016-09-01	160,51	171,94	2018-06-01	188,39	196,49
2016-10-01	140,42	140,57	2018-07-01	213,45	226,72
2016-11-01	268,55	266,22	2018-08-01	184,90	203,62
2016-12-01	255,52	280,56	2018-09-01	194,09	212,18
2017-01-01	280,82	304,74	2018-10-01	224,80	247,06
2017-02-01	214,79	230,49	2018-11-01	241,69	267,24
2017-03-01	230,73	248,23	2018-12-01	311,85	341,52
2017-04-01	182,17	186,00	2019-01-01	275,47	288,78
2017-05-01	183,79	195,91	2019-02-01	233,55	260,82
2017-06-01	165,05	168,70	2019-03-01	255,09	279,98
2017-07-01	129,98	126,47	2019-04-01	188,72	207,00
2017-08-01	139,94	142,51	2019-05-01	251,75	283,41
2017-09-01	153,95	160,19	2019-06-01	302,54	340,29

Sumber: *Economic Policy Uncertainty*, 2019

Lampiran 5.7 Pertumbuhan Ekonomi ASEAN

Tahun/Negara	2018	2019*	2020*
ASEAN	5,1	4,5	4,5
Indonesia	5,2	5	5
Malaysia	4,7	4,4	4
Filipina	6,2	5,6	5,8
Singapura	3,1	0,5	1,5
Thailand	4,1	2,9	3
Vietnam	7,1	6,7	6,3

\*) proyeksi

Sumber: ICAEW, 2019

#### Lampiran 5.8 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%)
2016	5,03
2017	5,07
2018	5,17
2019*	5.30
2020**	5.30

\*) APBN 2019

\*\*) RAPBN 2020

Sumber: FRED St Louis, 2019

#### Lampiran 5.9 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Lembaga	2019	2020
ADB	5.2	5.3
World Bank	5.1	5.2
IMF	5.2	5.2

Sumber: ADB, 2019; World Bank, 2019; IMF, 2019

#### Lampiran 5.10 Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan

Tahun	Kuartal	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2017	Q1	5,01
	Q2	5,01
	Q3	5,03
	Q4	5,07
2018	Q1	5,06
	Q2	5,17
	Q3	5,17
	Q4	5,17
2019	Q1	5,07
	Q2	5,06

Sumber: BPS, 2019

**Lampiran 5.11 Laju Pertumbuhan PDB Kumulatif (c-to-c)  
Menurut Komponen Pengeluaran**

Komponen	2017				2018				2019	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
C	4,94	4,95	4,93	4,94	4,94	5,05	5,03	5,05	5,02	5,1
LNPRT	8,08	8,31	7,52	6,93	8,1	8,43	8,48	9,08	16,95	16,09
G	2,69	0,03	1,28	2,13	2,71	4,12	4,92	4,8	5,21	6,93
I	4,77	5,06	5,75	6,15	7,94	6,88	6,91	6,67	5,03	5,02
ΔINV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-19,64
X	8,36	5,5	9,08	8,91	5,94	6,78	7,24	6,48	-1,86	-1,84
M	4,78	2,45	6,64	8,06	12,64	13,9	13,94	12,04	-7,36	-7,04

C : Konsumsi Rumah Tangga  
 LNPRT : Konsumsi Lembaga Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga  
 G : Konsumsi Pemerintah  
 I : Pembentukan Modal  
 ΔINV : Perubahan Inventori  
 X : Ekspor  
 M : Impor

Sumber: BPS, 2019

**Lampiran 5.12 Distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Menurut  
Komponen Pengeluaran**

Tahun	Distribusi terhadap PDB (%)						
	C	LNPRT	G	I	ΔINV	X	M
2016Q1	57.85	1.16	6.85	32.84	2.58	19.11	18.57
2016Q2	56.06	1.14	9.45	32.07	2.76	19.15	18.63
2016Q3	56.16	1.15	9.03	31.87	2.60	17.78	16.78
2016Q4	56.65	1.20	12.55	33.54	-2.66	20.33	19.39
2017Q1	56.93	1.19	6.55	31.54	3.06	20.42	18.69
2017Q2	55.67	1.18	8.60	31.36	2.88	18.96	17.74
2017Q3	55.74	1.16	8.77	31.85	1.99	20.19	18.83
2017Q4	56.26	1.20	12.22	33.84	-	21.16	21.34
2018Q1	56.74	1.22	6.43	32.07	3.40	20.79	20.75
2018Q2	55.23	1.21	8.52	31.13	3.77	20.05	20.87
2018Q3	55.03	1.19	8.68	32.07	2.02	21.85	22.76
2018Q4	56.01	1.26	12.09	33.84	0.07	21.13	23.70
2019Q1	56.81	1.36	6.35	32.15	2.89	18.54	18.84
2019Q2	55.79	1.34	8.71	31.25	2.59	17.61	18.53

C : Konsumsi Rumah Tangga  
 LNPRT : Konsumsi Lembaga Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga  
 G : Konsumsi Pemerintah  
 I : Pembentukan Modal  
 ΔINV : Perubahan Inventori  
 X : Ekspor  
 M : Impor

BPS, 2019

**Lampiran 5.13 Laju Pertumbuhan PDB Kumulatif (c-to-c) Menurut Komponen Lapangan Usaha**

Komponen	2017				2018				2019	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
1	7.11	5.10	4.29	3.87	3.34	4.06	3.92	3.91	1.82	3.66
2	-1.30	0.39	0.87	0.66	1.06	1.85	2.13	2.16	2.32	0.79
3	4.28	3.88	4.22	4.29	4.60	4.24	4.28	4.27	3.86	3.70
4	1.60	-0.50	1.29	1.54	3.31	5.42	5.48	5.47	4.12	3.15
5	4.39	4.02	4.29	4.60	3.65	3.79	4.61	5.46	8.95	8.65
6	5.96	6.46	6.64	6.80	7.35	6.53	6.27	6.09	5.91	5.80
7	4.61	4.03	4.43	4.46	4.99	5.11	5.16	4.97	5.27	4.95
8	8.06	8.44	8.59	8.49	8.56	8.63	7.59	7.01	5.25	5.52
9	5.35	5.48	5.49	5.39	5.17	5.39	5.56	5.66	5.87	5.69
10	10.48	10.78	10.10	9.63	7.76	6.41	7.00	7.04	9.06	9.33
11	6.01	5.97	6.02	5.47	4.23	3.64	3.47	4.17	7.32	5.93
12	3.66	3.69	3.66	3.66	3.19	3.13	3.36	3.58	5.46	5.60
13	6.83	7.54	8.16	8.44	8.04	8.47	8.54	8.64	10.36	10.15
14	0.24	0.10	0.30	2.06	5.79	6.50	6.98	7.02	6.40	7.62
15	4.10	2.46	2.87	3.70	4.84	4.94	5.50	5.36	5.60	5.95
16	7.11	6.74	7.02	6.84	6.06	6.56	6.89	7.13	8.59	8.84
17	7.97	8.28	8.66	8.73	8.43	8.83	8.95	8.99	9.99	10.37

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyedia Akomodasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estate
13. Jasa Perusahaan
14. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa Lainnya

Sumber: BPS, 2019

Lampiran 5.14 Distribusi PDB Indonesia Menurut Komponen Lapangan Usaha

Tahun	Distribusi terhadap PDB (%)																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2016Q1	13.50	6.96	21.08	1.10	0.07	10.45	13.42	5.12	3.02	3.63	4.27	2.95	1.75	3.80	3.22	1.08	1.74
2016Q2	14.40	6.84	20.68	1.13	0.07	10.13	13.30	4.97	2.92	3.60	4.17	2.84	1.69	3.91	3.43	1.06	1.69
2016Q3	14.44	6.92	20.10	1.15	0.07	10.20	13.00	5.32	2.85	3.58	4.16	2.75	1.67	3.75	3.23	1.02	1.67
2016Q4	11.61	7.99	20.30	1.21	0.07	10.74	13.06	5.38	2.92	3.68	4.19	2.78	1.71	3.90	3.57	1.10	1.72
2017Q1	13.58	7.93	20.50	1.20	0.07	10.22	13.18	5.20	2.93	3.83	4.28	2.87	1.76	3.51	3.12	1.07	1.77
2017Q2	13.92	7.32	20.28	1.17	0.07	10.11	13.01	5.28	2.85	3.84	4.21	2.84	1.74	3.60	3.22	1.05	1.75
2017Q3	13.96	7.15	19.94	1.19	0.07	10.24	12.95	5.58	2.78	3.72	4.20	2.76	1.73	3.58	3.18	1.04	1.74
2017Q4	11.20	7.92	19.97	1.22	0.07	10.93	12.95	5.56	2.84	3.74	4.13	2.80	1.77	3.96	3.60	1.10	1.78
2018Q1	13.25	8.11	20.23	1.19	0.07	10.47	13.11	5.39	2.85	3.80	4.25	2.83	1.81	3.55	3.13	1.07	1.82
2018Q2	13.63	7.97	19.80	1.18	0.07	10.17	12.97	5.45	2.77	3.69	4.10	2.73	1.79	3.60	3.18	1.05	1.80
2018Q3	13.52	8.21	19.63	1.18	0.07	10.35	13.01	5.27	2.71	3.76	4.10	2.66	1.77	3.50	3.14	1.03	1.78
2018Q4	10.88	8.03	19.82	1.21	0.07	11.11	13.00	5.39	2.79	3.83	4.17	2.74	1.83	3.94	3.54	1.11	1.84
2019Q1	12.65	7.77	20.06	1.16	0.07	10.75	13.20	5.52	2.82	3.95	4.34	2.85	1.90	3.57	3.15	1.09	1.91
2019Q2	13.57	7.38	19.52	1.13	0.07	10.37	12.95	5.57	2.74	3.89	4.10	2.75	1.89	3.72	3.22	1.08	1.92

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyedia Akomodasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estate
13. Jasa Perusahaan
14. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa Lainnya

Sumber: BPS, 2019

**Lampiran 5.15 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  
Indonesia Menurut Provinsi**

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (%)
ACEH	4,61
SUMATERA UTARA	5,18
SUMATERA BARAT	5,14
RIAU	2,34
JAMBI	4,71
SUMATERA SELATAN	6,04
BENGKULU	4,99
LAMPUNG	5,25
KEP, BANGKA BELITUNG	4,45
KEP, RIAU	4,56
DKI JAKARTA	6,17
JAWA BARAT	5,64
JAWA TENGAH	5,32
DI YOGYAKARTA	6,2
JAWA TIMUR	5,5
BANTEN	5,81
BALI	6,35
NUSA TENGGARA BARAT	-4,56
NUSA TENGGARA TIMUR	5,13
KALIMANTAN BARAT	5,06
KALIMANTAN TENGAH	5,64
KALIMANTAN SELATAN	5,13
KALIMANTAN TIMUR	2,67
KALIMANTAN UTARA	6,04
SULAWESI UTARA	6,01
SULAWESI TENGAH	6,3
SULAWESI SELATAN	7,07
SULAWESI TENGGARA	6,42
GORONTALO	6,51
SULAWESI BARAT	6,23
MALUKU	5,94
MALUKU UTARA	7,92
PAPUA BARAT	6,24
PAPUA	7,33

Sumber: BPS, 2019

Lampiran 5.16 Tingkat Inflasi

Tahun/Bulan	Inflasi			
	Umum	Inti	Harga yang Ditetapkan Pemerintah	Barang Volatil
2017m1	0,97	0,56	2,57	0,67
2017m2	0,23	0,37	0,58	-0,36
2017m3	-0,02	0,10	0,37	-0,77
2017m4	0,09	0,13	1,27	-1,26
2017m5	0,39	0,16	0,69	0,91
2017m6	0,69	0,26	2,10	0,65
2017m7	0,22	0,26	0,07	0,17
2017m8	-0,07	0,28	-0,48	-0,87
2017m9	0,13	0,35	0,15	-0,67
2017m10	0,01	0,17	-0,01	-0,53
2017m11	0,20	0,13	0,21	0,38
2017m12	0,71	0,13	0,91	2,46
2018m1	0,62	0,31	-0,15	2,58
2018m2	0,17	0,26	0,07	0,10
2018m3	0,20	0,19	0,20	0,15
2018m4	0,10	0,15	0,24	-0,29
2018m5	0,21	0,21	0,27	0,19
2018m6	0,59	0,24	1,38	0,90
2018m7	0,28	0,41	-0,68	0,90
2018m8	-0,05	0,30	-0,06	-1,24
2018m9	-0,18	0,28	0,00	-1,83
2018m10	0,28	0,29	0,32	0,17
2018m11	0,27	0,22	0,52	0,23
2018m12	0,62	0,17	1,20	1,55
2019m1	0,32	0,30	-0,12	0,97
2019m2	-0,08	0,26	0,06	-1,30
2019m3	0,11	0,16	0,08	-0,02
2019m4	0,44	0,17	0,16	1,59
2019m5	0,68	0,27	0,48	2,18
2019m6	0,55	0,38	-0,09	1,70
2019m7	0,31	0,33	-0,36	0,89
2019m8	0,12	0,43	-0,40	-0,25

Sumber: BPS, 2019

Lampiran 5.17 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tahun	Bulan	TPT
2009	Feb	8,14
	Agt	7,87
2010	Feb	7,41
	Agt	7,14
2011	Feb	6,96
	Agt	7,48
2012	Feb	6,37
	Agt	6,13
2013	Feb	5,88
	Agt	6,17
2014	Feb	5,70
	Agt	5,94
2015	Feb	5,81
	Agt	6,18
2016	Feb	5,50
	Agt	5,61
2017	Feb	5,33
	Agt	5,50
2018	Feb	5,13
	Agt	5,34

Sumber: BPS, 2019

Lampiran 5.18 TPT Menurut Tingkat Pendidikan

Agustus 2019

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Pangsa
Tidak/belum pernah sekolah	31.774	0,45
Tidak/belum tamat SD	326.962	4,67
SD	898.145	12,83
SLTP	1.131.214	16,16
SLTA Umum/SMU	1.930.320	27,57
SLTA Kejuruan/SMK	1.731.743	24,74
Akademi/Diploma	220.932	3,16
Universitas	729.601	10,42
<b>Total</b>	<b>7.000.691</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS, 2019

**Lampiran 5.19 Suku Bunga Kebijakan (7-Days Repo Rate), Interbank Rate, Deposit Rate, dan Working Capital Rate**

Tahun-Bulan	7-days Repo Rate (%)	Interbank Rate (%)	Deposit Rate (%)	Working Capital Rate (%)
2012m1	6,00	5,01	6,68	12,14
2012m2	5,75	4,41	6,52	12,02
2012m3	5,75	4,20	6,31	12,01
2012m4	5,75	4,22	6,00	11,86
2012m5	5,75	4,32	5,89	11,78
2012m6	5,75	4,62	5,76	11,79
2012m7	5,75	4,75	5,67	11,78
2012m8	5,75	4,88	5,61	11,73
2012m9	5,75	4,92	5,69	11,70
2012m10	5,75	4,90	5,66	11,68
2012m11	5,75	4,91	5,81	11,61
2012m12	5,75	4,94	5,76	11,49
2013m1	5,75	4,96	5,89	11,49
2013m2	5,75	4,92	5,92	11,45
2013m3	5,75	4,90	5,64	11,44
2013m4	5,75	4,90	5,73	11,44
2013m5	5,75	4,90	5,68	11,46
2013m6	6,00	5,17	5,72	11,41
2013m7	6,50	5,80	5,99	11,66
2013m8	7,00	6,20	6,16	11,63
2013m9	7,25	6,98	6,56	11,80
2013m10	7,25	7,20	6,95	11,93
2013m11	7,50	7,45	7,30	12,06
2013m12	7,50	7,71	7,61	12,12
2014m1	7,50	7,93	7,95	12,23
2014m2	7,50	8,00	8,03	12,33
2014m3	7,50	8,09	8,28	12,37
2014m4	7,50	8,14	8,34	12,38
2014m5	7,50	8,15	8,90	12,63
2014m6	7,50	8,15	8,34	12,63
2014m7	7,50	8,15	9,19	12,70
2014m8	7,50	8,15	9,45	12,76
2014m9	7,50	8,11	9,38	12,78
2014m10	7,50	7,70	9,25	12,82
2014m11	7,75	7,38	9,02	12,84
2014m12	7,75	7,18	8,95	12,79
2015m1	7,75	7,12	8,91	12,76
2015m2	7,50	7,01	8,94	12,74
2015m3	7,50	6,81	8,81	12,82
2015m4	7,50	6,87	8,59	12,75
2015m5	7,50	6,91	8,50	12,72
2015m6	7,50	6,94	8,27	12,70
2015m7	7,50	7,37	8,13	12,65
2015m8	7,50	7,46	8,06	12,63
2015m9	7,50	7,74	7,95	12,58
2015m10	7,50	8,19	7,99	12,58
2015m11	7,50	8,37	7,90	12,55
2015m12	7,50	8,71	7,99	12,46
2016m1	7,25	8,58	7,90	12,46
2016m2	7,00	8,13	7,97	12,40
2016m3	6,75	7,03	7,75	12,28
2016m4	6,75	6,62	7,27	12,14
2016m5	6,75	6,65	7,21	11,97
2016m6	6,50	7,04	7,00	11,82
2016m7	6,50	7,19	6,98	11,78
2016m8	5,25	7,12	6,94	11,73
2016m9	5,00	7,13	6,84	11,61
2016m10	4,75	7,02	6,75	11,59
2016m11	4,75	6,97	6,69	11,52

2017m3	4,75	6,86	6,69	11,19
2017m4	4,75	6,85	6,64	11,20
2017m5	4,75	6,86	6,62	11,15
2017m6	4,75	6,89	6,62	11,12
2017m7	4,75	6,90	6,56	11,07
2017m8	4,50	6,23	6,54	11,07
2017m9	4,25	5,38	6,46	10,99
2017m10	4,25	5,19	6,32	10,94
2017m11	4,25	5,20	6,17	10,87
2017m12	4,25	5,38	6,11	10,68
2018m1	4,25	5,31	6,03	10,72
2018m2	4,25	5,31	5,97	10,69
2018m3	4,25	5,32	5,88	10,59
2018m4	4,25	5,45	5,83	10,53
2018m5	4,75	6,25	5,79	10,51
2018m6	5,25	7,10	5,83	10,49
2018m7	5,25	7,24	5,99	10,55
2018m8	5,50	7,07	6,12	10,48
2018m9	5,75	7,14	6,26	10,59
2018m10	5,75	7,46	6,42	10,47
2018m11	6,00	7,61	6,59	10,48
2018m12	6,00	7,69	6,84	10,34
2019m1	6,00	7,49	6,91	10,52
2019m2	6,00	7,36	6,91	10,55
2019m3	6,00	7,23	6,85	10,51
2019m4	6,00	7,21	6,83	10,50
2019m5	6,00	7,24	6,79	10,43
2019m6	6,00	7,11	6,79	10,39
2019m7	5,75	6,64	6,78	10,39
2019m8	5,50	-	-	-

Sumber: Bank Indonesia, 2019; FRED St Louis, 2019

#### Lampiran 5.20 Nilai Tukar (Kurs) Rupiah-USD

Tahun	Kurs USD-IDR (Rp.)
2010	8.991
2011	9.068
2012	9.670
2013	12.189
2014	12.440
2015	13.795
2016	13.436
2017	13.548
2018	14.481
2019m1	14.072
2019m2	14.062
2019m3	14.244
2019m4	14.215
2019m5	14.385
2019m6	14.141
2019m7	14.026
2019m8	14.236

Sumber: FRED St Louis, 2019

Lampiran 5.21 Jumlah Uang Beredar *Broad Money* (M2)

miliar rupiah

Tahun-Bulan	M2	Tahun-Bulan	M2	Tahun-Bulan	M2
2014m1	3.652.349	2015m12	4.548.800	2017m11	5.321.432
2014m2	3.635.060	2016m1	4.498.361	2017m12	5.419.165
2014m3	3.652.531	2016m2	4.521.951	2018m1	5.351.685
2014m4	3.721.882	2016m3	4.561.873	2018m2	5.351.650
2014m5	3.780.955	2016m4	4.581.878	2018m3	5.395.826
2014m6	3.857.962	2016m5	4.614.062	2018m4	5.409.089
2014m7	3.887.407	2016m6	4.737.451	2018m5	5.435.083
2014m8	3.886.520	2016m7	4.730.380	2018m6	5.534.150
2014m9	4.010.147	2016m8	4.746.027	2018m7	5.507.792
2014m10	4.024.489	2016m9	4.737.631	2018m8	5.529.452
2014m11	4.076.670	2016m10	4.778.479	2018m9	5.606.780
2014m12	4.173.327	2016m11	4.868.651	2018m10	5.667.512
2015m1	4.174.826	2016m12	5.004.977	2018m11	5.670.975
2015m2	4.218.123	2017m1	4.936.882	2018m12	5.760.046
2015m3	4.246.361	2017m2	4.942.920	2019m1	5.646.421
2015m4	4.275.711	2017m3	5.017.644	2019m2	5.671.462
2015m5	4.288.369	2017m4	5.033.780	2019m3	5.745.062
2015m6	4.358.802	2017m5	5.126.370	2019m4	5.744.154
2015m7	4.373.208	2017m6	5.225.166	2019m5	5.860.641
2015m8	4.404.085	2017m7	5.178.079	2019m6	5.918.515
2015m9	4.508.603	2017m8	5.219.648	2019m7	5.939.771
2015m10	4.443.078	2017m9	5.254.139		
2015m11	4.452.325	2017m10	5.284.320		

Sumber: Bank Indonesia, 2019

Lampiran 5.22 Defisit Neraca Perdagangan

iuta USD

Tahun	Neraca Perdagangan		
	Ekspor	Impor	Defisit/Surplus
2014	175.980,00	178.178,80	-2.198,80
2015	150.366,30	142.694,80	7.671,50
2016	145.186,20	135.652,90	9.533,30
2017	168.828,20	156.985,60	11.842,60
2018	180.012,70	188.711,20	-8.698,60
2019m1	13.927,90	14.991,41	-1.063,51
2019m2	12.555,90	12.226,01	329,89
2019m3	14.121,90	13.451,11	670,79
2019m4	13.113,60	15.399,19	-2.285,59
2019m5	14.825,20	14.606,66	218,54
2019m6	11.792,70	11.495,39	297,31
2019m7	15.454,20	15.518,48	-64,28

Sumber: Kementerian Perdagangan, 2019

Lampiran 5.23 Komposisi Ekspor-Impor Indonesia 2019

juta USD

Tahun-Bulan	Ekspor			Impor			
	Total	Migas	Nonmigas	Total	Bahan Baku	Barang Modal	Barang Konsumsi
2019m1	13.927,90	1.234,70	12.693,20	14.991,41	11.415,87	2.355,59	1.219,95
2019m2	12.555,90	1.110,20	11.445,70	12.226,01	9.025,63	2.189,21	1.011,17
2019m3	14.121,90	1.140,50	12.981,40	13.451,11	10.106,92	2.198,21	1.145,98
2019m4	13.113,60	741,9	12.371,80	15.399,19	11.570,70	2.368,27	1.460,22
2019m5	14.825,20	1.136,80	13.688,40	14.606,66	10.730,75	2.322,72	1.553,19
2019m6	11.792,70	746,2	11.046,60	11.495,39	8.736,16	1.729,46	1.029,77
2019m7	15.454,20	1.605,60	13.848,60	15.518,48	11.272,83	2.780,05	1.465,60

Sumber: Kementerian Perdagangan, 2019

Lampiran 5.24 Defisit Neraca Berjalan

juta USD

Tahun-Kuartal	CAD	Tahun-Kuartal	CAD	Tahun-Kuartal	CAD
2013q1	-6.007	2015q2	-4.279	2017q3	-4.237
2013q2	-10.126	2015q3	-4.224	2017q4	-5.567
2013q3	-8.640	2015q4	-4.703	2018q1	-5.196
2013q4	-4.336	2016q1	-4.634	2018q2	-7.950
2014q1	-4.927	2016q2	-5.570	2018q3	-8.682
2014q2	-9.585	2016q3	-4.951	2018q4	-9.219
2014q3	-7.037	2016q4	-1.797	2019q1	-6.966
2014q4	-5.961	2017q1	-2.023	2019q2	-8.443
2015q1	-4.314	2017q2	-4.369		

Sumber: Bank Indonesia, 2019

Lampiran 5.25 Posisi Cadangan Devisa

juta USD

Tahun-Bulan	Cadangan Devisa
2013	99.387
2014	111.862
2015	105.931
2016	116.362
2017	130.196
2018	120.654
2019m1	120.075
2019m2	123.274
2019m3	124.539
2019m4	124.294
2019m5	120.347
2019m6	123.823
2019m7	125.900
2019m8	126.441

Sumber: Bank Indonesia, 2019

Lampiran 5.26 Postur APBN

triliun rupiah

Tahun		2015	2016	2017	2018	2019*	2020**
<b>Pendapatan Negara</b>		1508	1555,9	1666,4	1943,7	2030,8	2221,5
Pendapatan Dalam Negeri		1496	1546,9	1654,7	1928,1	2029,4	2221
1.	Penerimaan Perpajakan	1240,4	1285	1343,5	1518,8	1643,1	1861,8
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	255,6	262	311,2	409,3	386,3	359,3
Penerimaan Hibah		12	9	11,6	15,6	1,3	0,5
<b>Belanja Negara</b>		1806,4	1864,3	2007,4	2213,1	2341,6	2528,8
1.	Belanja Pemerintah Pusat	1183,3	1154	1265,4	1455,3	1527,2	1670
2.	Transfer ke Daerah dan Dana Desa	623,1	710,3	742	757,8	814,4	858,8
<b>Defisit Anggaran</b>		-298,4	-308,4	-341	-269,4	-310,8	-307,3
<b>% Defisit / PDB</b>		2,59	2,49	2,51	1,82	1,93	1,76

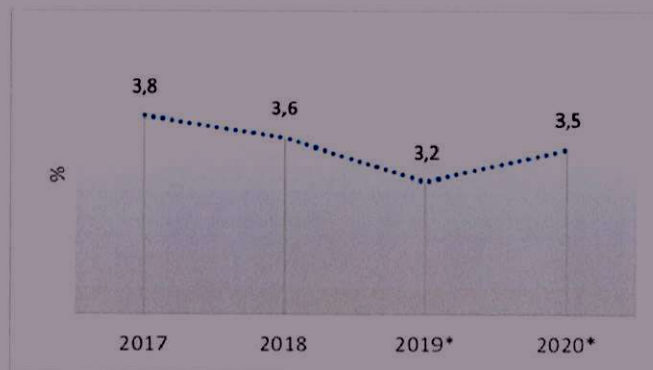
\*) Outlook 2019

\*\*) RAPBN 2020

Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

## LAMPIRAN 6: TAHAPAN KEGIATAN 2.2 DAN 2.3 VISUALISASI DATA DAN ANALISIS SINGKAT

### Lampiran 6.1 Pertumbuhan Ekonomi Dunia



\*) proyeksi  
Sumber: IMF, 2019

#### 6.1 Analisis Singkat:

Pada tahun 2018, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.2 persen, menjadi 3.6 persen, yang disebabkan oleh berbagai permasalahan perekonomian global. Untuk tahun 2019, diproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan lebih melambat dari 2018, dengan nilai prediksi hanya 3.2 persen yang dilatarbelakangi oleh aneka ketidakpastian ekonomi yang masih berlangsung hingga akhir 2019. Pada 2020, diprediksikan kinerja perekonomian dunia akan membaik dan mengarah pada fase *recovery* dan stabilisasi. Oleh karena itu, meskipun belum mampu mengkompensasi anjloknya pertumbuhan ekonomi yang diprediksi (*predicted global economic growth*) pada tahun 2019, proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2020 sedikit membaik hingga pada level 3.5 persen.

Lampiran 6.2 Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia

Tahun	Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia (%)		
	Dunia	Negara Maju	Negara Berkembang
2017	5.5	4.4	7.4
2018	3.7	3.1	4.7
2019*	2.5	2.2	2.9
2020*	3.7	3.1	4.8

\*) proyeksi

Sumber: IMF, 2019

## 6.2 Analisis Singkat:

Tabel di atas menunjukkan pertumbuhan volume perdagangan dunia beserta dengan pertumbuhan untuk kelompok negara maju (*advanced economies*) dan negara berkembang (*developing countries*). Serupa dengan tren pertumbuhan ekonomi dunia di atas, terdapat tren penurunan pertumbuhan volume perdagangan dunia sejak tahun 2017 hingga proyeksi 2019, baik secara global, maupun bagi kelompok negara maju dan berkembang. Namun pada 2020 diproyeksikan akan terjadi perbaikan pada kondisi lintas perdagangan dunia, sehingga diprediksikan pertumbuhan volume perdagangan dunia akan membaik pada 3.7 persen, dengan angka pertumbuhan 3.1 persen untuk negara maju dan 4.8 persen untuk negara berkembang.

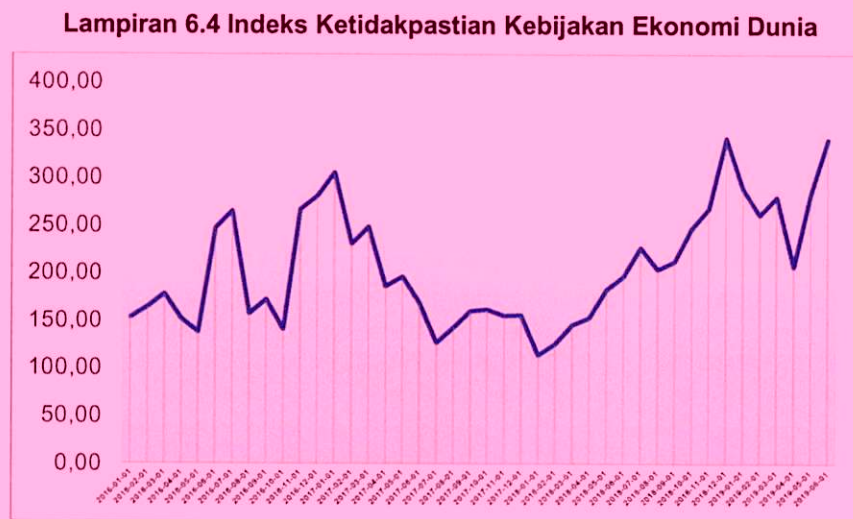
Lampiran 6.3 Harga Minyak Dunia WTI Crude dan Brent



Sumber: FRED St Louis, 2019

### 6.3 Analisis Singkat:

Grafik di atas menunjukkan pergerakan kuartalan harga minyak dunia, baik WTI Crude dan Brent, sejak tahun 2016-pertengahan 2019. Secara umum, terjadi tren kenaikan harga minyak bumi sejak 2016 hingga pertengahan 2018, yang disusul dengan tren penurunan harga yang tajam hingga akhir 2018. Pada awal 2019, terjadi tren peningkatan harga hingga April 2019. Namun melewati April 2019 ini, tren penurunan harga kembali terjadi hingga pada level USD54.84/barel untuk WTI Crude dan USD59.25/barel untuk Brent pada bulan Agustus 2019.



Sumber: *Economic Policy Uncertainty*, 2019

### 6.4 Analisis Singkat:

Grafik di atas mengilustrasikan indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi dunia (*policy-related economic uncertainty index*) yang dikonstruksikan oleh *Economic Policy Uncertainty*. Indeks ini merupakan sebuah proksi untuk mengukur ketidakpastian perekonomian dunia yang terdiri dari 3 komponen; analisis pada media yang membahas ketidakpastian kebijakan ekonomi, jumlah ketetapan kode pajak federal yang akan kedaluwarsa di masa depan, serta ketidaksepakatan antar *economic forecasters*. Indeks ketidakpastian tertinggi terjadi pada akhir

2018-awal 2019. Kemudian pada pertengahan 2019 ini, terjadi tren peningkatan indeks, menunjukkan kondisi perekonomian dunia kembali berada pada *uncertain phase* hingga hampir menyamai angka indeks pada akhir 2018.

**Lampiran 6.5 Pertumbuhan Ekonomi ASEAN**

Tahun/Negara	2018	2019*	2020*
ASEAN	5,1	4,5	4,5
Indonesia	5,2	5	5
Malaysia	4,7	4,4	4
Filipina	6,2	5,6	5,8
Singapura	3,1	0,5	1,5
Thailand	4,1	2,9	3
Vietnam	7,1	6,7	6,3

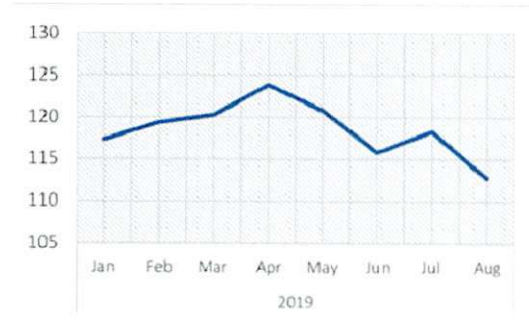
\*) proyeksi

Sumber: ICAEW, 2019

### 6.5 Analisis Singkat:

Pertumbuhan ekonomi ASEAN diprediksi akan mengalami perlambatan dengan *outlook* pertumbuhan ekonomi sebesar 4.5 persen pada 2019 dan 2020, dengan angka realisasi sebelumnya pada 2018 mencapai 5.1 persen. Singapura mengalami penurunan tajam pada pertumbuhan ekonomi, dari 3.1 persen pada 2018 menjadi 0.5 persen pada 2019 dan 1.5 persen pada 2020. Tidak hanya Singapura, Thailand dan Filipina juga merasakan penurunan pertumbuhan ekonomi yang diprediksi pada 2019. Akan tetapi, penurunan tersebut tidak sebesar penurunan yang dialami oleh Singapura. Sementara Indonesia, Vietnam, dan Malaysia tidak menanggung penurunan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

#### Lampiran 6.6 Indeks Harga Global Seluruh Komoditas

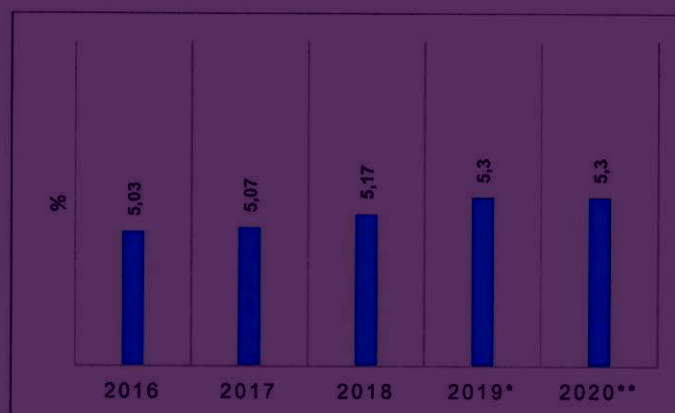


Sumber: FRED St Louis, 2019

#### 6.6 Analisis Singkat:

Indeks harga global untuk seluruh komoditas menunjukkan tren penurunan sejak awal 2019 sebesar 9 persen hingga bulan Agustus 2019. Indeks harga seluruh komoditas sempat menunjukkan tren peningkatan hingga April 2019 sebelum akhirnya mengalami tren penurunan. Pola pergerakan fluktuasi indeks harga global seluruh komoditas selaras dengan pola pergerakan harga minyak mentah dunia, dengan titik balik pada April 2019.

#### Lampiran 6.7 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



\*) APBN 2019

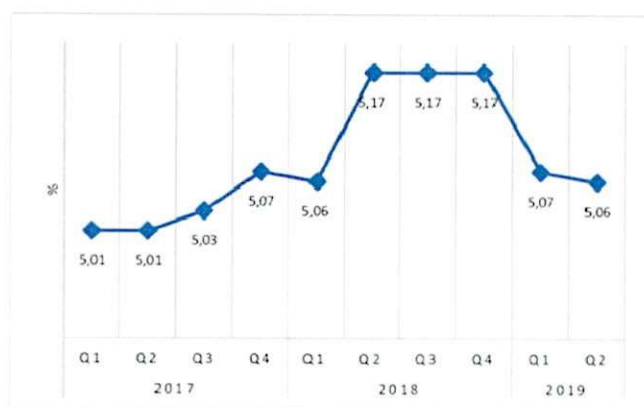
\*\*) RAPBN 2020

Sumber: FRED St Louis, 2019

### 6.7 Analisis Singkat:

Grafik di atas menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur dengan persentase kenaikan PDB tahunan. Sejak tahun 2016, terjadi tren peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, secara umum, pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan pada level 5 persen. Untuk tahun 2019 dan 2020, diproyeksikan angka pertumbuhan akan berada pada 5.3 persen. Angka ini lebih tinggi daripada pencapaian pertumbuhan ekonomi pada 2018, yaitu sebesar 5.17 persen.

Lampiran 6.8 Laju Pertumbuhan PDB Triwulanan

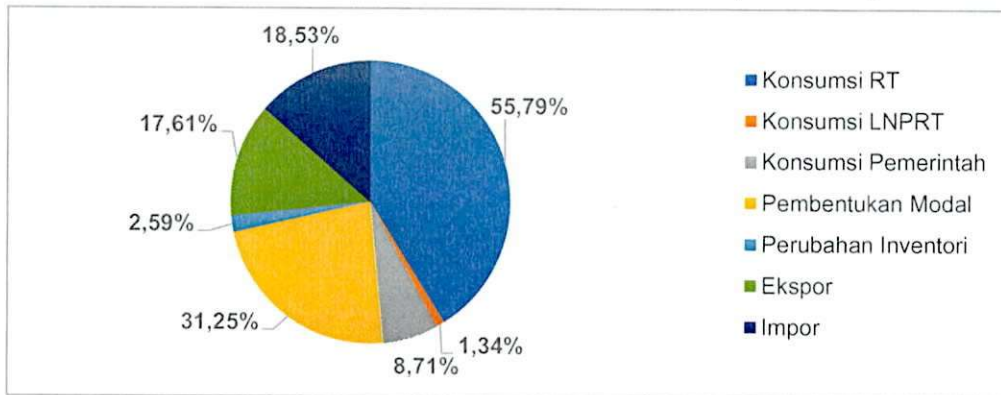


Sumber: BPS, 2019

### 6.8 Analisis Singkat:

Pada triwulan II 2019, terjadi sedikit perlambatan pertumbuhan ekonomi pada level 5.06 persen, dari pencapaian pertumbuhan ekonomi triwulan I 2019 sebesar 5.07 persen. Perlambatan ini dimulai saat memasuki tahun 2019, bagaimana laju pertumbuhan pada triwulan I mengalami penurunan signifikan pada level 5.07 persen, dari sebelumnya mampu menjaga pencapaiannya pada level 5.17 persen selama 3 triwulan terakhir.

**Lampiran 6.9 Distribusi PDB Indonesia Menurut Komponen Pengeluaran**

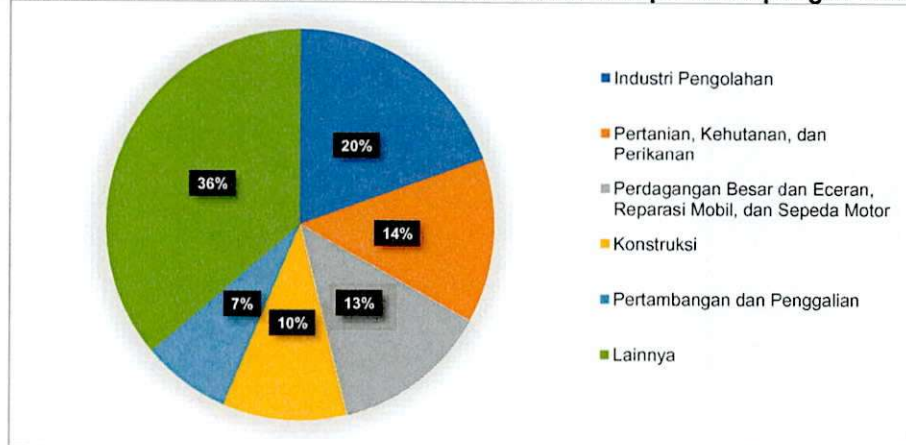


Sumber: BPS, 2019

### **6.9 Analisis Singkat:**

Grafik di atas menggambarkan distribusi PDB Indonesia menurut komponen pengeluaran pada triwulan 2 2019. Secara umum, tidak ada perubahan signifikan pada urutan komposisi pengeluaran yang menyumbang pada PDB Indonesia dari tahun ke tahun. Komponen penyumbang terbesar adalah konsumsi rumah tangga, berkisar pada 56 persen, kemudian pembentukan modal sebesar 31 persen, ekspor dan impor sebesar 18 persen, diikuti oleh konsumsi pemerintah, perubahan inventori, dan konsumsi LNPRT masing-masing sebesar 9 persen, 3 persen, dan 1 persen. Urutan komposisi di atas menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disokong oleh permintaan domestik (*domestic demand-driven growth*).

**Lampiran 6.10 Distribusi PDB Indonesia Menurut Komponen Lapangan Usaha**

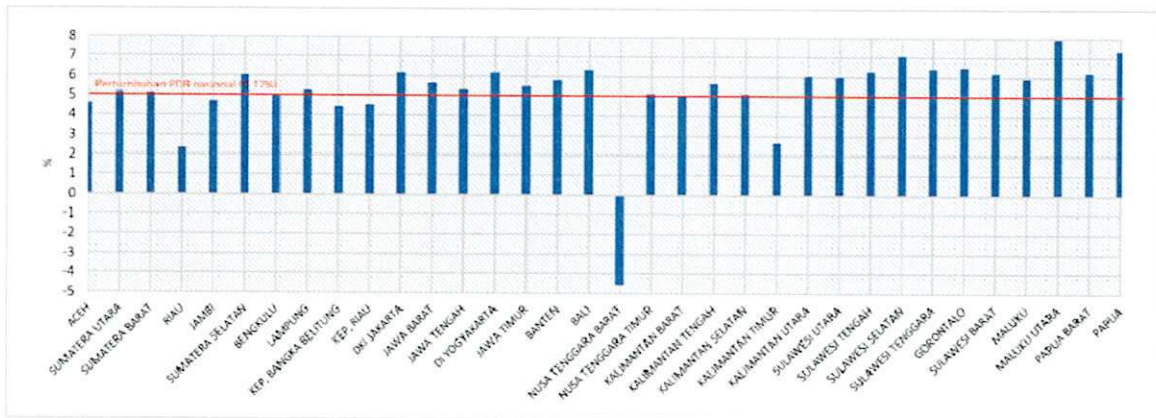


Sumber: BPS, 2019

#### **6.10 Analisis Singkat:**

Grafik di atas mengilustrasikan distribusi PDB Indonesia menurut komponen lapangan usaha pada kuartal 2 2019. Secara umum, komposisi utama lapangan usaha penyumbang PDB Indonesia tidak berubah secara signifikan dari tahun ke tahun. Lapangan usaha penyumbang terbesar adalah industri pengolahan (manufaktur) sebesar 20 persen, diikuti oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan (agrikultur) sebesar 14 persen, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13 persen, konstruksi sebesar 10 persen, pertambangan dan penggalian sebesar 7 persen, dan kontribusi 36 persen disumbang oleh 12 lapangan usaha lainnya, yang mayoritas adalah sektor jasa.

**Lampiran 6.11 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  
Indonesia Menurut Provinsi**

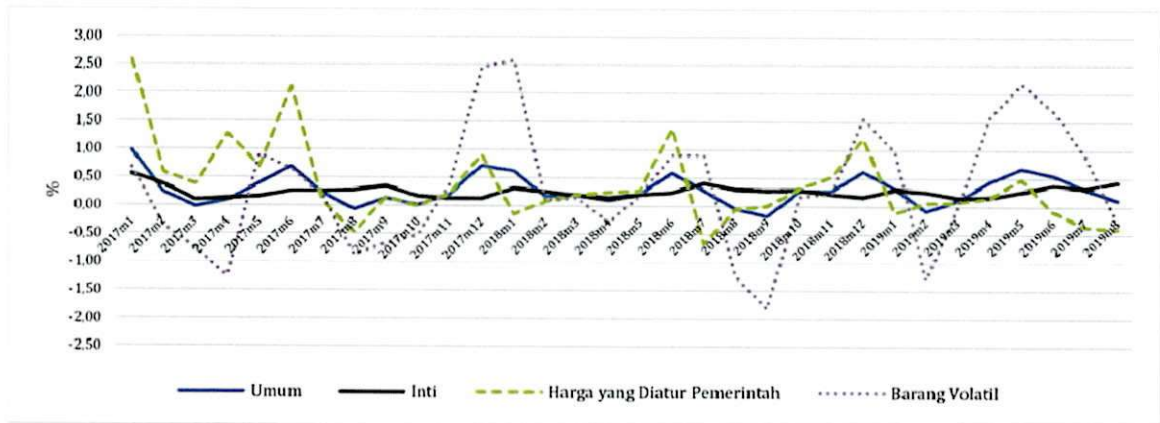


Sumber: BPS, 2019

### 6.11 Analisis Singkat:

Melihat dari pertumbuhan PDRB setiap provinsi, pada tahun 2018, seluruh provinsi di Pulau Jawa menikmati angka pertumbuhan ekonomi lebih dari angka pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak hanya Pulau Jawa, provinsi-provinsi di Wilayah Indonesia Timur (WIT) juga merasakan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sementara itu, NTB mengalami pertumbuhan ekonomi negatif sebesar -4.56 persen akibat bencana gempa bumi pada pertengahan 2018 yang berdampak pada lumpuhnya aktivitas ekonomi untuk beberapa saat.

Lampiran 6.12 Tingkat Inflasi

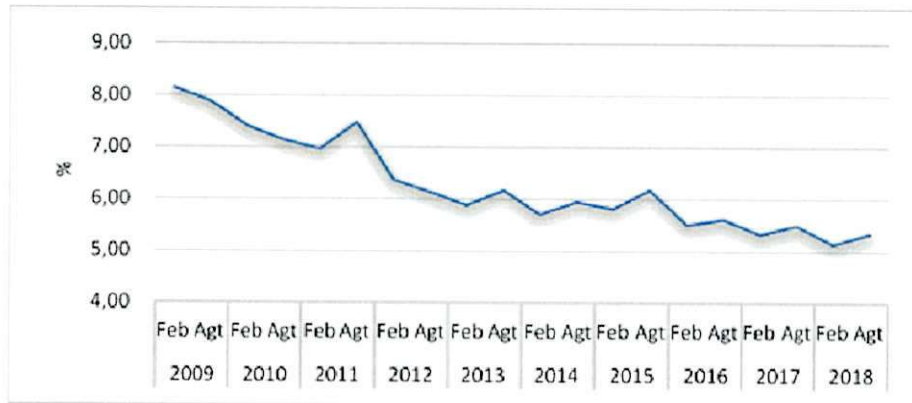


Sumber: BPS, 2019

### 6.12 Analisis Singkat:

Pada bulan Agustus 2019, tercatat tingkat inflasi umum sebesar 0.12 persen, lebih rendah daripada tingkat inflasi Juli 2019 sebesar 0.31 persen. Sejak Juni 2019, tingkat inflasi bulanan cenderung terus menurun. Salah satu komponen pengeluaran penyumbang deflasi Agustus 2019 adalah bahan makanan dengan tingkat deflasi 0.19 persen. Hal ini juga direfleksikan pada inflasi komponen barang volatil (termasuk di dalamnya adalah bahan makanan) sebesar -0.25 persen, lebih rendah dari angka bulan Juli, yaitu sebesar 0.89 persen. Selain karena bahan makanan, komponen transportasi, komunikasi dan jasa keuangan juga mencatat deflasi sebesar -0.55 persen. Hal ini juga tergambar pada inflasi komponen harga yang diatur pemerintah (administered price) sebesar -0.40 persen, lebih rendah dari angka bulan Juli 2019, yaitu sebesar 0.36 persen.

**Lampiran 6.13 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**



Sumber: BPS, 2019

### 6.13 Analisis Singkat:

Sejak tahun 2007, Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat pengangguran menjadi 1 digit di bawah 10 persen. Secara umum, dari tahun tahun terjadi tren penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Data terakhir pada tahun Agustus 2018 menunjukkan TPT Indonesia berada pada angka 5.34 persen.

**Lampiran 6.14 Distribusi TPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

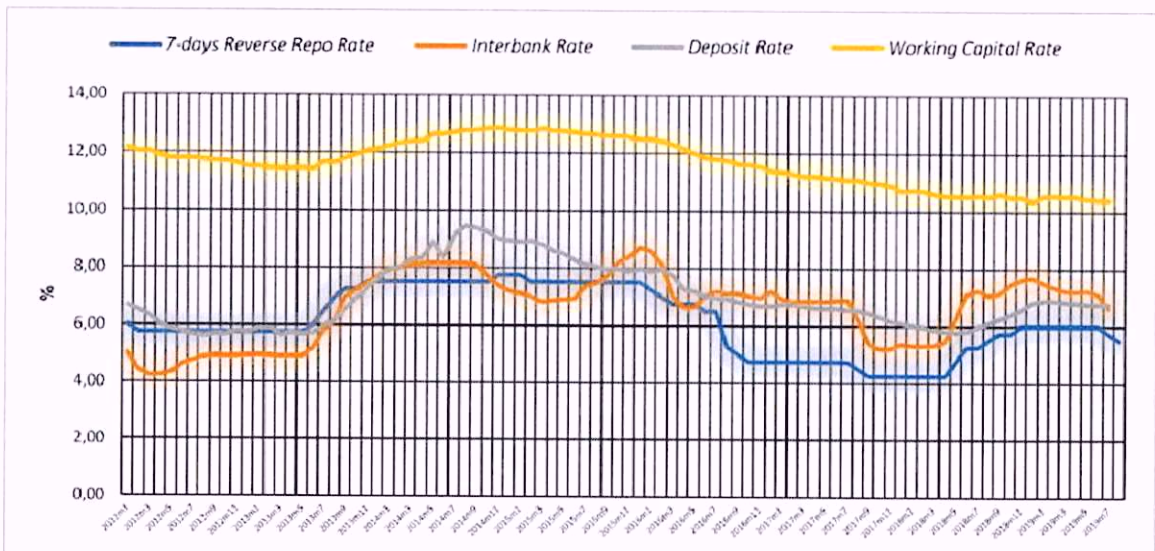
Tingkat Pendidikan	Pangsa (%)
Tidak/belum pernah sekolah	0,45
Tidak/belum tamat SD	4,67
SD	12,83
SLTP	16,16
SLTA Umum/SMU	27,57
SLTA Kejuruan/SMK	24,74
Akademi/Diploma	3,16
Universitas	10,42
<b>Total</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS, 2019

### 6.14 Analisis Singkat:

Tabel di atas menggambarkan distribusi TPT berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh. Kelompok pendidikan yang menyumbang proporsi pengangguran terbesar adalah dari tingkatan pendidikan SLTA Umum/SMU, yaitu sekitar 28 persen, diikuti oleh SLTA Kejuruan/SMK sebesar 25 persen, SLTP sebesar 16 persen, dan SD sebesar 13 persen.

Lampiran 6.15 Tingkat Suku Bunga



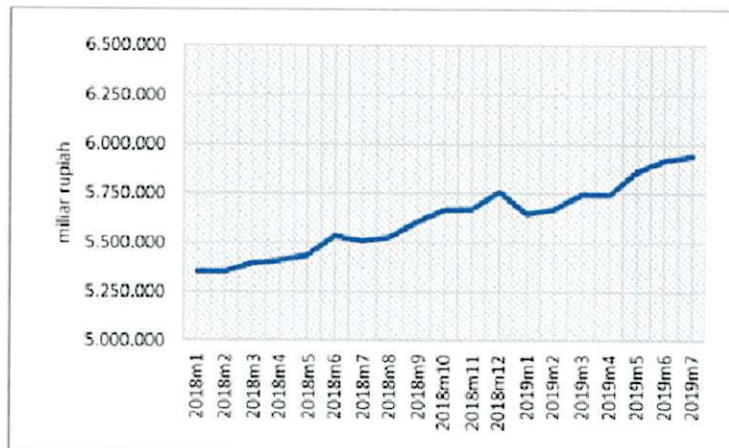
Sumber: Bank Indonesia, 2019; FRED St Louis, 2019

### 6.15 Analisis Singkat:

Grafik di atas menggambarkan tren kuartalan berbagai suku bunga yang berlaku di Indonesia, yaitu *7-days reverse repo rate* sebagai suku bunga kebijakan Bank Indonesia, *interbank rate* (suku bunga pinjaman jangka pendek antarbank), *deposit rate* (suku bunga tabungan), *working capital rate* (suku bunga modal kerja, sebagai proksi dari suku bunga kredit) sejak tahun 2012. Secara umum, semua jenis suku bunga bergerak pada arah dan pola yang sama dengan kecenderungan penurunan sejak awal 2019, akan tetapi *working capital rate* relatif lebih flat dan tidak sefluktuatif

suku bunga lainnya yang disebabkan oleh proses transmisi yang tidak *smooth*.

Lampiran 6.16 Jumlah Uang Beredar *Broad Money* (M2)

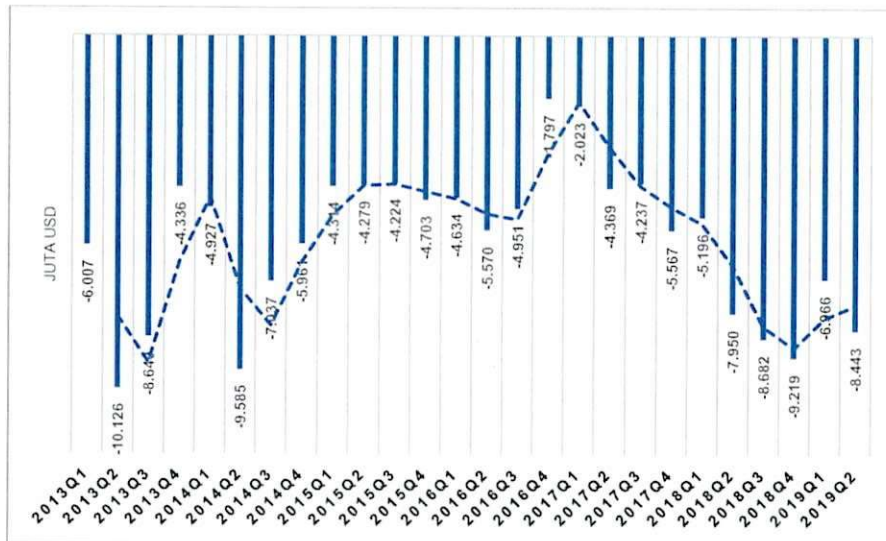


Sumber: Bank Indonesia, 2019

#### 6.16 Analisis Singkat:

Grafik di atas menunjukkan tren jumlah uang beredar di Indonesia yang diukur dengan M2 atau *broad money*. M2 mencakup *cash*, *checking deposits*, dan instrumen *liquid* lainnya, oleh karena itu M2 dianggap mampu menjadi proksi bagi jumlah uang beredar dan menjadi target pencapaian kebijakan moneter dari bank sentral. Data bulanan sejak tahun 2018 hingga pertengahan 2019 menunjukkan tren peningkatan atas jumlah uang yang beredar dengan peningkatan jumlah uang beredar hingga 5.2 persen, dua kali lipat lebih tinggi daripada pertumbuhan jumlah uang beredar pada Januari-Juli 2018.

Lampiran 6.17 Defisit Transaksi Berjalan

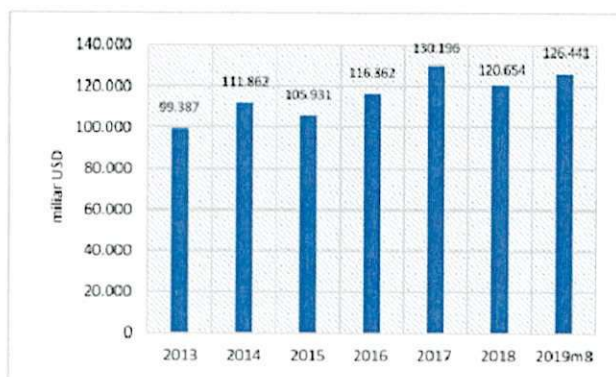


Sumber: Bank Indonesia, 2019

### 6.17 Analisis Singkat:

Grafik di atas memberikan gambaran mengenai perjalanan defisit transaksi berjalan sejak triwulan I 2013. Defisit transaksi berjalan diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai impor dan ekspor untuk barang, jasa, pendapatan investasi, dan pembayaran transfer. Sejak 2013, kondisi transaksi berjalan menunjukkan fluktuasi defisit dengan nilai defisit terendah pada awal 2017. Pada akhir 2018, defisit kembali melebar hingga pada angka USD9.219 juta, namun kemudian *balance* transaksi berjalan menunjukkan perbaikan saat memasuki 2019. Pada triwulan II 2019, terjadi pelebaran defisit transaksi berjalan hingga USD8.443 juta. Pelebaran defisit transaksi berjalan ini meningkat sebesar 21.2 persen dibandingkan dengan defisit transaksi berjalan pada triwulan I 2019 dan memakan proporsi hingga 3 persen dari PDB, dari defisit triwulan I dengan proporsi sebesar 2.6 persen dari PDB.

Lampiran 6.18 Posisi Cadangan Devisa



Sumber: Bank Indonesia, 2019

### 6.18 Analisis Singkat:

Posisi cadangan devisa hingga akhir Agustus 2019 tercatat sebesar USD126.441 miliar atau setara dengan pembiayaan 7.4 bulan impor, atau pembiayaan 7.1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri. Jumlah ini sudah melebihi batas standar kecukupan internasional, yaitu sebesar 3 bulan impor. Apabila dibandingkan dengan posisi cadangan devisa akhir 2018, cadangan devisa Indonesia sudah bertambah sejumlah USD5.8 miliar.

Lampiran 6.19 Postur dan Defisit APBN

Tahun		2015	2016	2017	2018	2019*	2020**
<b>Pendapatan Negara</b>		1508	1555,9	1666,4	1943,7	2030,8	2221,5
Pendapatan Dalam Negeri		1496	1546,9	1654,7	1928,1	2029,4	2221
1.	Penerimaan Perpajakan	1240,4	1285	1343,5	1518,8	1643,1	1861,8
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	255,6	262	311,2	409,3	386,3	359,3
Penerimaan Hibah		12	9	11,6	15,6	1,3	0,5
<b>Belanja Negara</b>		1806,4	1864,3	2007,4	2213,1	2341,6	2528,8
1.	Belanja Pemerintah Pusat	1183,3	1154	1265,4	1455,3	1527,2	1670
2.	Transfer ke Daerah dan Dana Desa	623,1	710,3	742	757,8	814,4	858,8
<b>Defisit Anggaran</b>		-298,4	-308,4	-341	-269,4	-310,8	-307,3
<b>% Defisit / PDB</b>		2,59	2,49	2,51	1,82	1,84	1,76

\*) Outlook 2019

\*\*) RAPBN 2020

Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

### **6.19 Analisis Singkat:**

Tabel di atas mengilustrasikan perkembangan nilai pada pos-pos APBN, baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara. Sejak tahun 2015, pendapatan negara terus mengalami peningkatan, yang disumbang oleh peningkatan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Seiring dengan peningkatan pendapatan negara, belanja negara juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yang disumbang oleh peningkatan belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Di sisi lain, kinerja anggaran pemerintah, dalam hal ini APBN, menunjukkan defisit, yang artinya nilai belanja negara melebihi penerimaan negaranya. Namun sejak 2015, proporsi defisit anggaran terus diusahakan untuk ditekan. Hingga pada 2018, defisit anggaran berhasil ditekan hingga di bawah 2 persen. Untuk tahun 2019, diproyeksikan akan terjadi sedikit peningkatan defisit anggaran menjadi 1.84 persen. Kemudian pada 2020, diprediksikan defisit anggaran ini akan kembali mengalami penurunan pada 1.76 persen dari PDB.

## LAMPIRAN 7: TAHAPAN KEGIATAN 2.4 LAPORAN SINGKAT MENTOR



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

### LAPORAN SINGKAT KONSULTASI DENGAN MENTOR

Hari, tanggal : Kamis, 12 September 2019  
Pukul : 13.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang 603 Pusat Kajian Anggaran  
Kegiatan : Pembahasan data makroekonomi yang digunakan dan pengolahan data

#### I. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Pada sesi konsultasi kedua ini, topik pembahasan yang dilaksanakan adalah mengenal progres pengerjaan aktualisasi pada minggu kedua dan ketiga pelaksanaan, yaitu minggu ke-1 dan ke-2 bulan September 2019. Sejauh ini, progres yang sudah dilakukan adalah pelaksanaan Kegiatan 2, yaitu Pengumpulan dan Pengolahan Data, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. mencari data-data makroekonomi yang dibutuhkan untuk analisis dari sumber sekunder, dan tahapan kegiatan ini sudah dilaksanakan pada 4-6 September 2019 dengan kompilasi data yang terlampir dalam laporan;
2. mengolah data-data yang dibutuhkan untuk analisis dan menyajikannya dalam bentuk grafik/tabel, dan tahapan kegiatan ini berlangsung pada 9-10 September 2019 dengan grafik/tabel hasil olahan data yang terlampir dalam laporan;
3. membuat analisis singkat untuk setiap tabel dan grafik yang telah dibuat, yang dilaksanakan pada 11 September 2019 dengan analisis singkat yang terlampir dalam laporan;
4. melakukan konsultasi dengan mentor mengenai hasil pengolahan data sementara, yang dilaksanakan pada 12 September 2019 dengan Lapsing yang akan terlampir dalam laporan.

Selain itu, pada sesi konsultasi kali ini, dilakukan konsultasi mengenai data makroekonomi yang akan digunakan, antara lain:

Pertumbuhan Ekonomi Dunia	PDB Indonesia Menurut Komponen Pengeluaran	Jumlah Uang Beredar/Broad Money (M2)
Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia	PDB Indonesia Menurut Komponen Lapangan Usaha	Defisit Neraca Perdagangan
Indeks Harga Komoditas Dunia	PDRB Indonesia Menurut Provinsi	Defisit Transaksi Berjalan
Harga Minyak Dunia WTI Crude dan Brent	Tingkat Inflasi	Posisi Cadangan Devisa
Indeks Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi Dunia	Tingkat Pengangguran Terbuka	Postur dan Defisit APBN
Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Indonesia	Tingkat Suku Bunga	
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	Nilai Tukar (Kurs) USD-IDR	

Data-data tersebut telah disajikan dalam bentuk grafik dan tabel yang disertai dengan analisis singkat yang terlampir pada laporan kegiatan aktualisasi.

#### II. PENUTUP

Demikianlah konsultasi dengan mentor dilaksanakan. Konsultasi ini ditutup pada pukul 14.00 WIB

Jakarta, 12 September 2019

Rastri Paramita, S.E., M.M.  
198001262014022002

### ***DRAFT ECONOMIC OUTLOOK 2020***

#### **Tekanan perekonomian global masih kuat**

Ketegangan perang dagang antara US dan China masih terjadi hingga pertengahan 2019 dan diprediksikan masih akan berlangsung hingga memasuki tahun 2020. Pada awal September 2019, US memutuskan untuk membebaskan tarif sebesar 15 persen pada produk konsumen (*consumer products*) dari China senilai USD125 miliar, termasuk di dalamnya adalah produk-produk seperti peralatan elektronik dan pakaian. Tidak hanya itu, berlaku efektif 1 Oktober 2019, US mempertimbangkan akan mengenakan peningkatan tarif dari 25 persen menjadi 30 persen atas produk impor China senilai USD250 miliar, termasuk di dalamnya adalah aneka produk konsumen dan produk nonkonsumen (*non-consumer goods*) seperti mesin, peralatan listrik, dan peralatan bangunan. Kemudian, pada 15 Desember 2019, US juga akan mengenakan tarif sebesar 15 persen pada aneka produk teknologi, seperti telepon genggam dan laptop. Penundaan pengenaan tarif pada produk-produk ini hingga Desember 2019 merupakan salah satu bentuk kebijakan Presiden Trump untuk melindungi konsumen US sebelum musim akhir tahun.

Menanggapi kebijakan pengenaan tarif yang masih terus berlangsung atas produk-produknya, China turut mengenakan tambahan tarif sebesar 5-10 persen atas barang impor US senilai USD75 miliar. Berlaku efektif pada 1 September 2019, China juga akan membebaskan tarif untuk pertama kalinya atas produk minyak mentah dari US sebesar 5 persen. Tidak hanya itu, produk kedelai US juga akan dikenakan tambahan tarif sebesar 5 persen dan produk daging dikenakan tambahan tarif sebesar 10 persen. Sementara untuk menjawab “tantangan” pengenaan tarif atas produk-produknya di akhir 2019, China juga berencana akan kembali mengenakan

tarif atas kendaraan sebesar 25 persen dan suku cadang dari US sebesar 5 persen.

Upaya “balas dendam” yang tidak berhenti antara US dan China dalam pengenaan tarif impor menyebabkan intensitas ketegangan perang dagang antar keduanya tidak kunjung usai. Perang dagang ini tidak hanya berdampak terhadap kinerja perdagangan internasional kedua negara, tetapi juga turut menyebabkan perlambatan pada lalu lintas perdagangan internasional. Perang dagang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekspor dan impor kedua negara, yang kemudian juga berdampak pada pertumbuhan volume perdagangan global, mengingat pentingnya peranan kedua negara tersebut terhadap *global value chains*. Dampak perang dagang antara US-China terhadap perdagangan dunia dapat dilihat dari Tabel 1.

**Tabel 1. Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia**

Tahun	Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia (%)		
	Dunia	Negara Maju	Negara Berkembang
2017	5.5	4.4	7.4
2018	3.7	3.1	4.7
2019*	2.5	2.2	2.9
2020*	3.7	3.1	4.8

\*) proyeksi

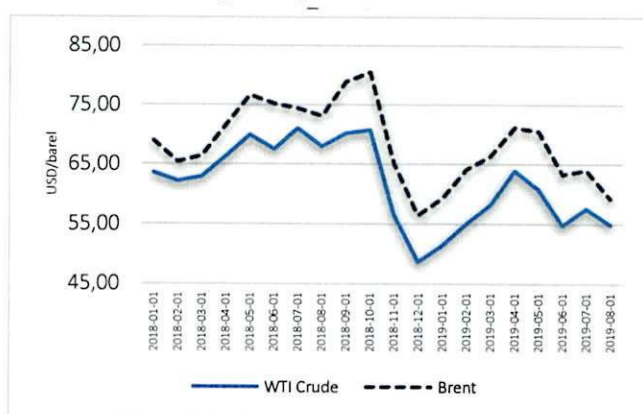
Sumber: IMF, 2019

Pada tahun 2019, diproyeksikan pertumbuhan volume perdagangan dunia akan mengalami penurunan pada level 2.5 persen, lebih rendah dari angka realisasi pada 2018, yaitu sebesar 3.7 persen. Penurunan pertumbuhan volume perdagangan juga dirasakan baik untuk kelompok negara maju (*advanced economies*) dan kelompok negara berkembang (*emerging market and developing economies*). Negara-negara maju akan diprediksikan akan mengalami penurunan pertumbuhan di bawah angka global, yaitu sebesar 2.2 persen. Sementara bagi negara-negara berkembang, penurunan pertumbuhan volume perdagangan pada 2019 diprediksikan akan berada pada 2.9 persen. Untuk tahun 2020, diperkirakan

akan terjadi perbaikan kondisi perekonomian dunia (*recovery*) yang juga akan berdampak bagi lalu lintas perdagangan dunia. Hal ini direfleksikan pada proyeksi angka pertumbuhan volume perdagangan dunia yang membaik pada 2020, baik secara global maupun bagi kelompok negara maju dan berkembang.

Tekanan eksternal tidak hanya datang dari perang dagang US-China,

**Grafik 1. Harga Minyak Dunia: WTI Crude dan**



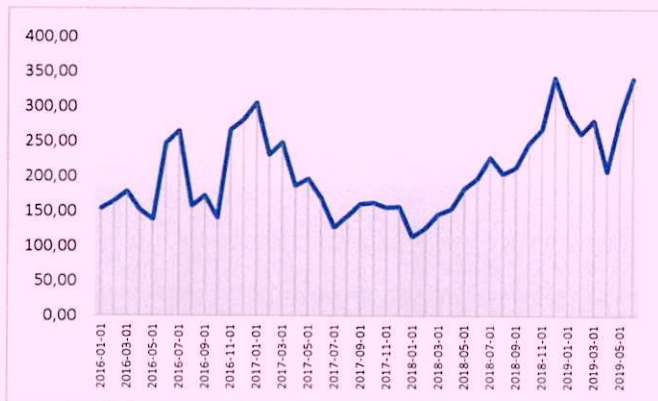
Sumber: FRED St Louis. 2019

tetapi juga fluktuasi harga dan mekanisme pasar dari minyak mentah dunia (*crude oil*). Pada awal 2019, sempat terjadi peningkatan harga minyak hingga April 2019 sebesar 20 persen untuk Brent dan 24 persen untuk WTI

Crude. Namun peningkatan harga minyak tersebut tidak mampu mengkompensasi 40 persen penurunan harga minyak yang signifikan pada Oktober-Desember 2018. Penurunan yang signifikan pada harga minyak di akhir 2018 disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tekanan geopolitik dari negara-negara produsen minyak, perlambatan permintaan terhadap minyak, serta perang dagang antara US-China. Sementara perbaikan harga minyak dunia pada awal 2019 disokong oleh peningkatan stok minyak bumi dari US disertai dengan kesepakatan OPEC dan rekanan untuk mengurangi produksi minyak bumi untuk mengangkat harga. Setelah April 2019, harga minyak bumi cenderung mengalami penurunan, kecuali pada Juli 2019. Tren penurunan harga minyak diprediksi masih akan berlangsung, diiringi dengan perlambatan permintaan minyak dunia. Hal ini direfleksikan dalam penurunan proyeksi harga dan permintaan minyak dunia oleh berbagai lembaga, seperti OPEC dan Morgan Stanley.

Perang dagang US-China serta fluktuasi harga dan mekanisme pasar dari minyak mentah dunia menjadi beberapa faktor penting penyebab tingginya ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainty*) yang terjadi di tahun 2019. Sebuah riset dari *Economic Policy Uncertainty* merilis sebuah indeks, Indeks Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi Dunia (*Economic Policy Uncertainty Index*), sebagai sebuah proksi untuk mengukur ketidakpastian yang terjadi secara global. Pada akhir 2019, perekonomian global mengalami puncak ketidakpastian dengan merosotnya harga minyak mentah dunia disertai dengan ketegangan perang dagang antara US-China. Memasuki tahun 2019, ketidakpastian mulai membaik hingga April 2019. Perbaikan

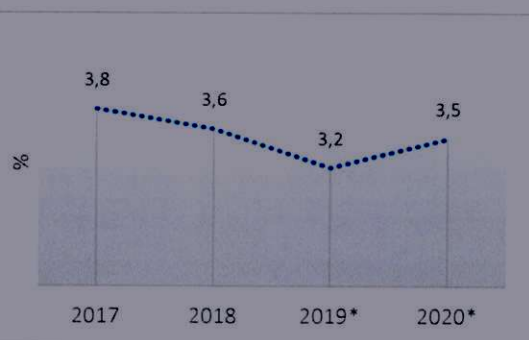
**Grafik 2. Indeks Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi Dunia**



Sumber: *Economic Policy Uncertainty*, 2019

kondisi perekonomian didukung oleh membaiknya kondisi mekanisme pasar dari minyak mentah dunia pada Januari-April 2019. Setelah itu, ketidakpastian kembali terjadi, direfleksikan pada angka indeks yang kembali meningkat pada Mei dan Juni 2019.

**Grafik 3. Pertumbuhan Ekonomi Global**



) proyeksi  
Sumber: IMF, 2019

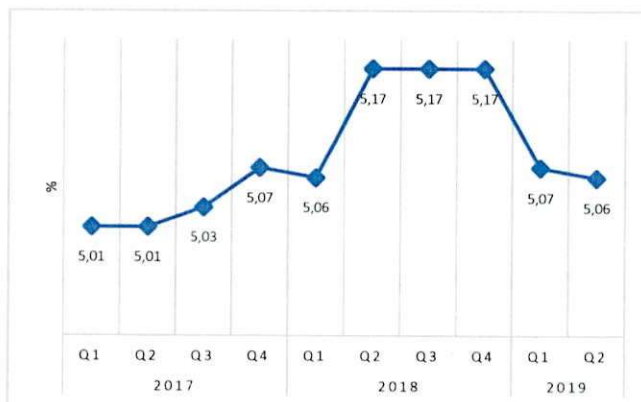
Berbagai permasalahan perekonomian yang terjadi dalam skala global telah menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi dunia. Pada tahun 2018, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.2 persen, menjadi 3.6 persen, yang

disebabkan oleh berbagai permasalahan perekonomian global. Untuk tahun 2019, diproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan lebih melambat dari 2018, dengan nilai prediksi hanya 3.2 persen yang dilatarbelakangi oleh aneka ketidakpastian ekonomi yang masih berlangsung hingga akhir 2019 sebagaimana telah dielaborasi sebelumnya. Pada 2020, diprediksikan kinerja perekonomian dunia akan membaik dan mengarah pada fase *recovery* dan stabilisasi (IMF, 2019). Oleh karena itu, meskipun belum mampu mengkompensasi anjloknya pertumbuhan ekonomi yang diprediksi (*predicted global economic growth*) pada tahun 2019, proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2020 sedikit membaik hingga pada level 3.5 persen.

#### Sektor riil: kestabilan atau terperangkap stagnasi?

Pada triwulan II 2019, terjadi sedikit perlambatan pertumbuhan ekonomi pada level 5.06 persen, dari pencapaian pertumbuhan ekonomi triwulan I sebesar 5.07 persen. Perlambatan ini dimulai saat memasuki tahun 2019, bagaimana laju pertumbuhan pada triwulan I mengalami penurunan signifikan pada level 5.07 persen, dari sebelumnya mampu menjaga pencapaiannya pada level 5.17 persen selama 3 triwulan terakhir. Apabila

**Grafik 4. Laju Pertumbuhan PDB Triwulanan**



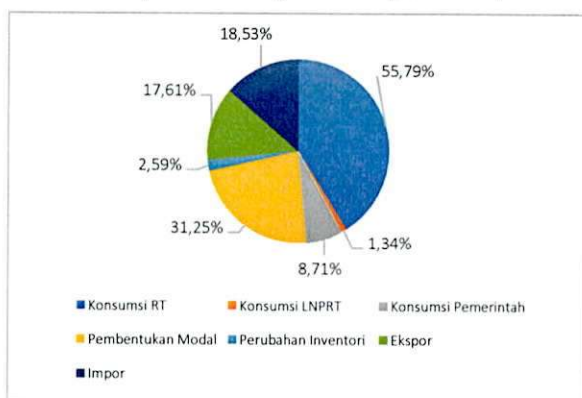
Sumber: BPS, 2019

diuraikan pada komponen pengeluaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2019 disebabkan oleh penurunan angka pertumbuhan konsumsi LNPR, beberapa komponen pembentukan modal tetap domestik, serta ekspor barang migas. Kontraksi komponen pengeluaran paling signifikan terjadi pada ekspor barang migas, dari -9.33

persen pada triwulan I menuju -20.45 persen pada triwulan II. Salah satu penyebabnya adalah kecenderungan penurunan harga komoditas migas pada triwulan II, sebagaimana telah diilustrasikan pada grafik 1.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih disokong oleh

**Grafik 5. Distribusi PDB Menurut Komponen Pengeluaran (Q2 2019)**



Sumber: BPS, 2019

permintaan domestik (*domestic demand-driven growth*). Hal ini terlihat pada Grafik 5, bagaimana hampir 96 persen PDB dibentuk oleh komponen permintaan domestik. Dari tahun ke tahun, komposisi PDB menurut komponen pengeluaran tidak berubah dan diproyeksikan tidak akan mengalami

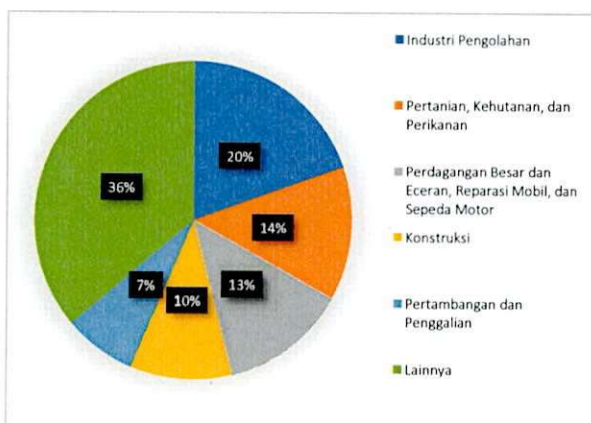
perubahan komposisi yang signifikan dalam waktu dekat.

Apabila diuraikan pada komponen sektor lapangan usaha, perlambatan pertumbuhan ekonomi di triwulan II disebabkan oleh perlambatan di beberapa sektor, seperti pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi makan dan minum; jasa keuangan dan asuransi; serta jasa perusahaan. Perlambatan signifikan pada triwulan II 2019 terjadi di sektor pertambangan penggalian dengan angka pertumbuhan 0.79 persen, dari sebelumnya mencapai 2.32 persen pada triwulan I 2019. Hal ini disebabkan oleh penurunan produksi bijih logam sebesar 25.93 persen. Selain itu, produksi migas dan panas bumi juga mengalami penurunan sebesar 4.11 persen, menyebabkan tersendatnya kinerja sektor pertambangan dan penggalian pada triwulan II 2019. Sementara sektor industri pengolahan dinilai terus mengalami penurunan kinerja sejak triwulan II 2018. Bermula

pada angka pertumbuhan 4.60 persen pada triwulan I 2018, data terakhir pada triwulan II 2019 menunjukkan bahwa industri manufaktur tumbuh pada level 3.70 persen. Di sisi lain, sektor industri manufaktur masih menjadi sektor penyumbang PDB terbesar, yaitu sebesar hampir 20 persen PDB, akan tetapi kontribusi dan pertumbuhannya cenderung mengalami stagnasi, bahkan perlambatan dari waktu ke waktu. Hal ini mengindikasikan urgensi akan kebijakan yang mampu memberikan gebrakan bagi industri manufaktur untuk meningkatkan daya saingnya.

Sementara apabila dilihat dari komponen sektor lapangan usaha, sebagaimana yang telah disinggung pada alinea sebelumnya bahwa industri pengolahan masih menjadi sektor dengan kontribusi terbesar bagi

**Grafik 6. Distribusi PDB Menurut Komponen Lapangan Usaha (Q2 2019)**



Sumber: BPS, 2019

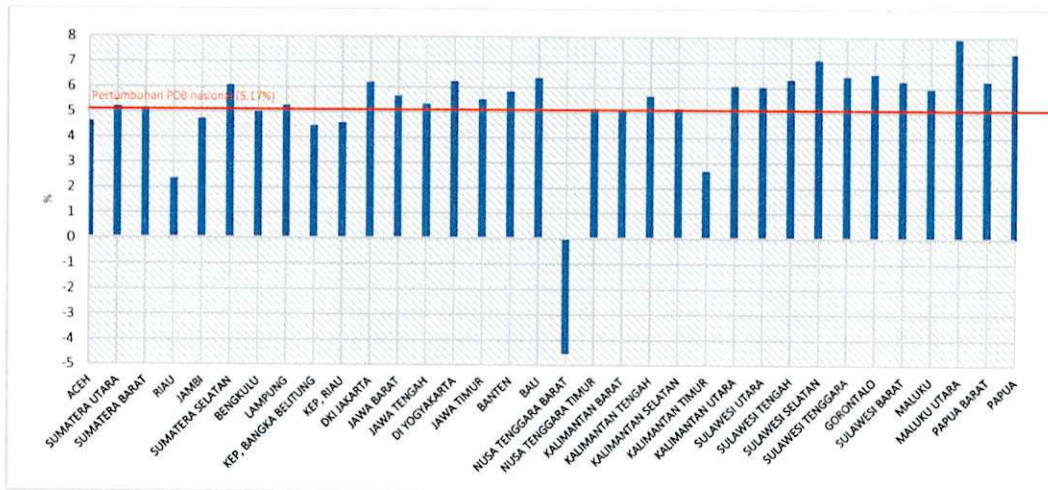
PDB, yaitu pada kisaran 20 persen dari PDB. Menyusul sektor industri pengolahan, sektor perikanan, kehutanan, dan perikanan menyumbang sekitar 14 persen PDB; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13 persen, konstruksi sebesar 10 persen, pertambangan dan penggalan sebesar 7

persen, dan sisanya, 36 persen, merupakan sumbangan aneka sektor jasa. Apabila melihat angka pertumbuhan dari masing-masing sektor, sektor industri pengolahan dinilai mengalami stagnasi, apabila tidak bisa dikatakan sebagai suatu perlambatan, pada kisaran 4 persen sejak triwulan I 2017. Sementara sektor pertanian terus mengalami perlambatan secara konstan dari waktu ke waktu. Di sisi lain, aneka sektor jasa mulai menunjukkan kinerja yang baik, ditunjukkan pertumbuhan positif yang konstan. Hal ini dapat menjadi indikasi awal bahwa ada kemungkinan Indonesia tengah

mengalami transformasi struktural, melihat perlambatan konstan dari sektor primer dan sekunder yang diiringi dengan kemajuan sektor tersier. Namun perlu diperhatikan bahwa ini adalah *early warning* dari *premature deindustrialisation*, yaitu ketika suatu negara mengalami penurunan kontribusi sektor manufaktur di saat level pembangunan ekonomi masih rendah dan kontribusi tersebut belum pernah mencapai titik optimalnya. Dengan kata lain, saat ini Indonesia dinilai tengah menghadapi transformasi struktural yang tidak matang. Menjadi sebuah pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah untuk mendorong kembali sektor manufaktur apabila tidak diinisiasi dalam suatu kerangka kebijakan reformasi industri manufaktur yang komprehensif.

Apabila diuraikan secara regional, dari tahun ke tahun, komposisi PDB Indonesia masih Jawa-sentris, ditunjukkan kontribusi Pulau Jawa konstan mendekati angka 60 persen dari PDB nasional. Melihat dari pertumbuhan PDRB setiap provinsi, pada tahun 2018, seluruh provinsi di Pulau Jawa menikmati angka pertumbuhan ekonomi lebih dari angka pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak hanya Pulau Jawa, provinsi-provinsi di Wilayah Indonesia Timur (WIT) juga merasakan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Grafik 7), dapat mengindikasikan dampak positif dari upaya pemerintah menyelenggarakan pemerataan ekonomi hingga Indonesia Timur. Sementara itu, NTB mengalami pertumbuhan ekonomi negatif sebesar -4.56 persen akibat bencana gempa bumi pada pertengahan 2018 yang berdampak pada lumpuhnya aktivitas ekonomi untuk beberapa saat.

**Grafik 7. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Provinsi (2018)**

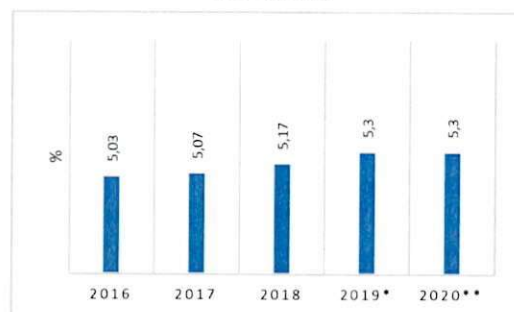


Sumber: BPS, 2019

Untuk pertumbuhan ekonomi 2019 dan 2020, pemerintah dan DPR bersepakat untuk memproyeksikan pada level 5.3 persen yang tertuang pada APBN 2019 dan RAPBN 2020. Angka proyeksi ini lebih tinggi daripada pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018, yaitu sebesar 5.2 persen. Mengingat tekanan eksternal masih kuat hingga akhir 2019, diperparah dengan penurunan kinerja beberapa komponen PDB, misalnya sektor industri manufaktur, maka muncul pertanyaan bagi pemerintah; arah dan langkah kebijakan seperti apa yang akan mampu mendorong

pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 dan 2020 hingga pada level 5.3 persen, sebuah target pencapaian tertinggi dari realisasi pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2014?

**Grafik 8. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**



\*) APBN 2019

\*\*) RAPBN 2020

Sumber: FRED St Louis, 2019

Di sisi lain, lembaga-lembaga internasional telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 akan berada pada kisaran 5.1-5.2 persen, stagnan dari realisasi pertumbuhan ekonomi 2018. Sementara

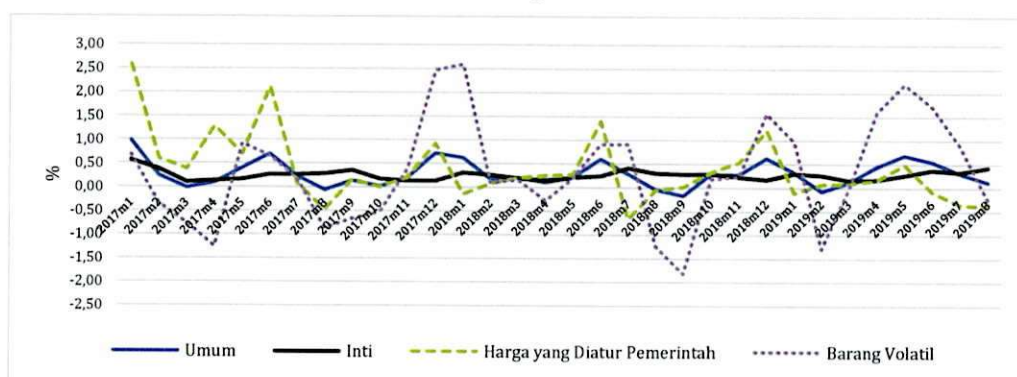
**Tabel 2. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**

Lembaga	2019	2020
ADB	5.2	5.3
World Bank	5.1	5.2
IMF	5.2	5.2

untuk tahun 2020, diprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sedikit lebih tinggi, berada kisaran 5.2-5.3 persen. Fokus pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengarah pada kestabilan di 2019 dan *recovery* pada 2020, sehingga proyeksi dari berbagai lembaga cenderung meningkatkan angka prediksi pertumbuhan ekonominya pada 2020 dibandingkan dengan proyeksi 2019.

Pada bulan Agustus 2019, tercatat tingkat inflasi umum sebesar 0.12 persen, lebih rendah daripada tingkat inflasi Juli 2019 sebesar 0.31 persen. Sejak Juni 2019, secara khusus setelah Idul Fitri berlalu, tingkat inflasi bulanan cenderung terus menurun. Salah satu komponen pengeluaran penyumbang deflasi Agustus 2019 adalah bahan makanan dengan tingkat deflasi 0.19 persen. Hal ini juga direfleksikan pada inflasi komponen barang volatil (termasuk di dalamnya adalah bahan makanan) sebesar -0.25 persen, lebih rendah dari angka bulan Juli, yaitu sebesar 0.89 persen. Selain karena bahan makanan, komponen transportasi, komunikasi dan jasa keuangan juga mencatat deflasi sebesar -0.55 persen, salah satunya

**Grafik 9. Tingkat Inflasi**



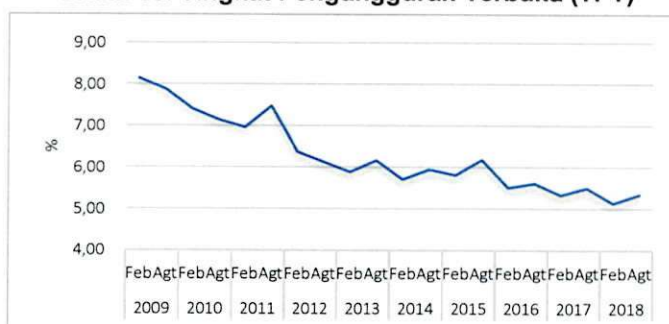
Sumber: BPS, 2019

disebabkan oleh intervensi harga yang dilakukan pemerintah pada harga tiket pesawat. Hal ini juga tergambar pada inflasi komponen harga yang diatur pemerintah (*administered price*) sebesar -0.40 persen, lebih rendah dari angka bulan Juli 2019, yaitu sebesar 0.36 persen. Secara umum, tingkat inflasi akan mengikuti pola musiman (*seasonality*), dan cenderung akan meningkat mendekati akhir tahun dan akan kembali menurun memasuki awal tahun.

Sejak tahun 2015, tingkat inflasi tahunan stagnan pada kisaran level 3 persen, mengindikasikan fokus otoritas moneter untuk menjaga inflasi yang relatif rendah dan stabil. Dalam upaya menjaga tingkat inflasi tersebut, perlu diperhatikan potensi terjadinya *The Fed's Dilemma*, yaitu bagaimana mencapai tingkat inflasi yang ideal bagi perekonomian. Tingkat inflasi tidak boleh terlalu tinggi hingga memberatkan biaya hidup (*cost of living*) dan biaya meminjam (*cost of borrowing*) sehingga menjadikan perekonomian lesu. Tingkat inflasi juga tidak boleh terlalu rendah hingga men-*discourage* konsumsi masyarakat dan ekspansi bisnis yang dilakukan oleh investor. Dalam hal ini, Indonesia perlu mengevaluasi kembali mengenai tingkat inflasi yang paling ideal dan menimbang kemungkinan sedikit peningkatan tingkat inflasi yang mampu memberikan dorongan aktivitas ekonomi namun dengan *cost* yang paling rendah.

Sejak tahun 2007, Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat pengangguran menjadi 1 digit di bawah 10 persen. Secara umum, dari

**Grafik 10. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**



Sumber: BPS, 2019

tahun tahun terjadi tren penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Data terakhir pada tahun Agustus 2018 menunjukkan TPT Indonesia berada pada angka 5.34 persen. Apabila dilihat

**Tabel 3. TPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	Pangsa (%)
Tidak/belum pernah sekolah	0,45
Tidak/belum tamat SD	4,67
SD	12,83
SLTP	16,16
SLTA Umum/SMU	27,57
SLTA Kejuruan/SMK	24,74
Akademi/Diploma	3,16
Universitas	10,42
<b>Total</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS, 2019

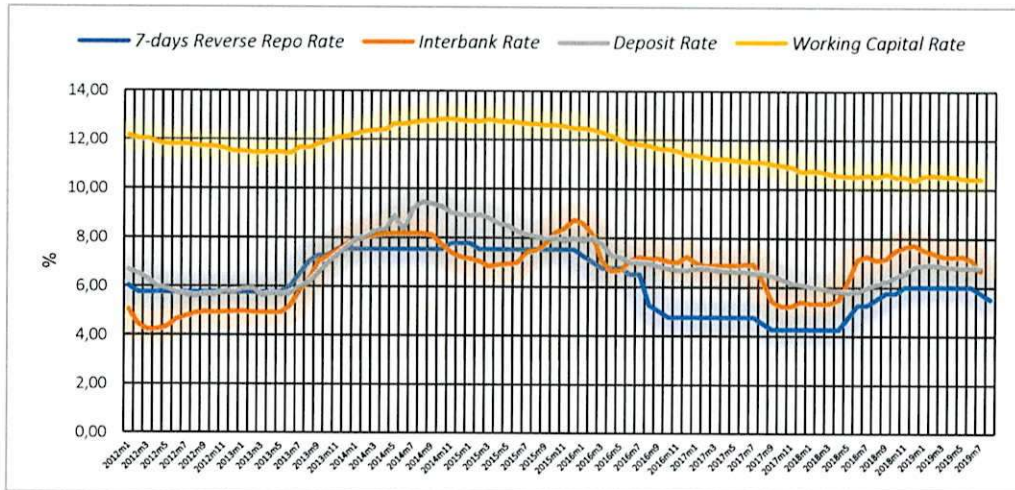
dari tingkat pendidikan yang ditempuh, lulusan SMA menjadi kelompok penyumbang angka pengangguran terbesar di Indonesia, yaitu sebesar 27.57 persen, disusul oleh kelompok lulusan SMK sebesar 24.74 persen. Dengan kata lain, lebih dari 50 persen pengangguran didominasi oleh lulusan

pendidikan menengah atas. Hal ini dapat menjadi *early warning* adanya indikasi tidak adanya kesesuaian (*mismatch*) dalam pasar tenaga kerja, terutama bagi lulusan SMA/SMK, misalnya ketidaksesuaian antara kuantitas dan kualitas tenaga kerja lulusan SMA/SMK yang tersedia dengan kebutuhan industri. Di tahun depan, diproyeksikan angka pengangguran akan stagnan pada level 5 persen dengan proporsi yang besar pada lulusan pendidikan menengah. Hal ini menjadi suatu pekerjaan rumah bagi pemerintah bagaimana mengatasi permasalahan tidak seimbangnya mekanisme pasar tenaga kerja dalam suatu kerangka kebijakan ketenagakerjaan yang komprehensif merangkul peranan institusi pendidikan dan sektor industri (swasta).

### **Kebijakan moneter akomodatif: mendorong pertumbuhan**

Pada September 2019, Bank Indonesia memutuskan untuk kembali menurunkan suku bunga acuan, BI *7-days reverse repo rate*, sebesar 0.25 persen menjadi 5.25 persen dari sebelumnya pada angka 5.50 persen. Sejak awal tahun hingga saat ini, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan sebesar 0.75 persen. Penurunan suku bunga acuan diharapkan mampu menurunkan suku bunga kredit dari perbankan. Akan tetapi, perubahan suku bunga acuan tidak dapat ditransmisikan pada perubahan suku bunga kredit dengan cepat, artinya ada *time lag* yang

**Grafik 11. Transmisi Antar Tingkat Suku Bunga**



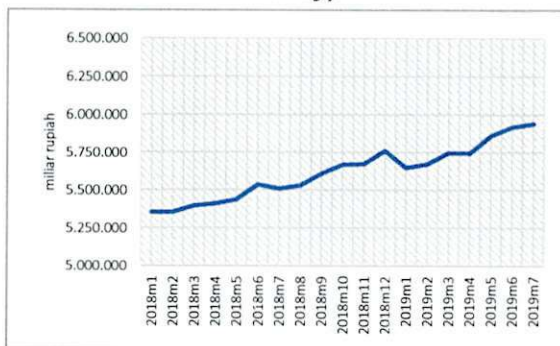
Sumber: Bank Indonesia, 2019; FRED St Louis, 2019

menyertai proses transmisi tersebut. Secara umum, perubahan suku bunga acuan akan cepat direspon oleh suku bunga pasar uang antarbank/PUAB (*interbank rate*, pada Grafik 11). Setelah direspon oleh *interbank rate*, perubahan suku bunga acuan akan mempengaruhi suku bunga deposit (*deposit rate*) dengan waktu transmisi kurang lebih 1 bulan. Setelah *deposit rate*, suku bunga acuan baru akan mempengaruhi suku bunga kredit (pada Grafik 11, suku bunga kredit diproksi dengan suku bunga modal kerja [*working capital rate*]) dengan waktu transmisi kurang lebih 3 bulan. Namun perlu jadi catatan bahwa transmisi menuju suku bunga kredit pun tidak selalu berjalan *smooth* karena keputusan bank untuk mengubah suku bunga kredit menyesuaikan perubahan suku bunga acuan juga bergantung pada faktor-faktor lain, seperti tingkat likuiditas dan risiko kredit tiap bank. Secara umum tergambar pada Grafik 11, bahwa suku bunga PUAB, suku bunga deposit, dan suku bunga kredit bergerak searah dengan tren suku bunga acuan, dengan kecenderungan suku bunga kredit lebih *flat* daripada pergerakan suku bunga lain. Hal ini disebabkan oleh transmisi suku bunga acuan yang tidak langsung direspons secara langsung dan pada *magnitude* yang sebanding.

Secara umum, upaya Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga acuan sejak awal 2019 merupakan salah satu langkah kebijakan moneter akomodatif. Kebijakan moneter akomodatif diselenggarakan untuk meningkatkan gairah perekonomian sehingga mampu membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah perlambatan beberapa komponen penyokong PDB dan tekanan perekonomian global. Upaya ini dilaksanakan dengan dukungan tingkat inflasi yang relatif rendah sepanjang 2019. Hingga akhir 2019, ekspektasi tingkat inflasi akan stabil berada pada kisaran 3 persen, sehingga diproyeksikan masih ada kemungkinan bagi Bank Indonesia untuk kembali menurunkan suku bunga acuan untuk memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif melambat<sup>2</sup>.

Perubahan suku bunga pada umumnya akan berpengaruh terhadap penawaran uang, atau dalam konteks yang lebih mudah disebut juga dengan jumlah uang beredar. Kecenderungan penurunan suku bunga acuan sepanjang 2019 (Januari-Juli)

**Grafik 12. Jumlah Uang Beredar (M2/Broad Money)**



Sumber: Bank Indonesia, 2019

telah meningkatkan jumlah uang beredar hingga 5.2 persen, dua kali lipat lebih tinggi daripada pertumbuhan jumlah uang beredar pada Januari-Juli 2018. Upaya otoritas moneter mengendalikan tingkat inflasi secara tidak langsung telah

<sup>2</sup> *Cost* dari tingkat suku bunga rendah adalah kemungkinan kenaikan tingkat inflasi. Transmisinya adalah sebagai berikut; suku bunga adalah *cost of holding money* (biaya memegang uang). Ketika suku bunga rendah, biaya memegang uang rendah, sehingga masyarakat akan lebih memilih untuk memegang uang, baik untuk konsumsi maupun investasi. Hal tersebut akan menyebabkan kenaikan jumlah uang beredar, sehingga selanjutnya akan menyebabkan kenaikan tingkat inflasi. Ketika tingkat inflasi mampu dijaga rendah dan stabil, maka penurunan tingkat suku bunga akan menyebabkan *cost* yang relatif lebih kecil.

mengurangi dampak peningkatan jumlah uang beredar terhadap tingkat inflasi.

Pada bulan Agustus 2019, data kurs tengah rupiah terhadap USD menunjukkan adanya depresiasi relatif terhadap kurs tengah bulan Juli 2019 sebesar 1.5 persen. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya ketidakpastian global akibat timbulnya ketentuan-ketentuan tarif baru dalam perang dagang China-US, menyebabkan investor kembali beralih pada *safe-haven assets*<sup>3</sup>. Kemudian pada bulan September 2019, kurs harian rupiah kembali melemah seiring kondisi gangguan keamanan di Indonesia. Kecenderungan penurunan suku bunga acuan juga dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah. Suku bunga acuan Bank Indonesia menurun, menyebabkan *rate of return* kurang menarik bagi investasi luar negeri (*foreign investment*). *Rate of return* yang kurang menarik kemudian menyebabkan penurunan pada permintaan akan mata uang rupiah, sehingga nilai rupiah juga relatif menurun. Namun perlu jadi catatan bahwa fluktuasi nilai tukar tidak hanya bergantung pada pergerakan suku bunga, tetapi juga banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhinya, seperti kestabilan ekonomi dan politik, serta transaksi perdagangan luar negeri yang akan dijelaskan pada subbagian berikutnya. Ke depan, diproyeksikan perang dagang masih akan menekan nilai rupiah dan hal ini akan diperparah oleh kondisi kestabilan ekonomi dan politik di Indonesia, seiring dengan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh pergantian pemerintahan setelah Pemilu 2019. Ketidakpastian seperti ini menyebabkan investor memutuskan untuk *wait-and-see* dalam mengadakan transaksi dan berinvestasi dalam mata uang rupiah.

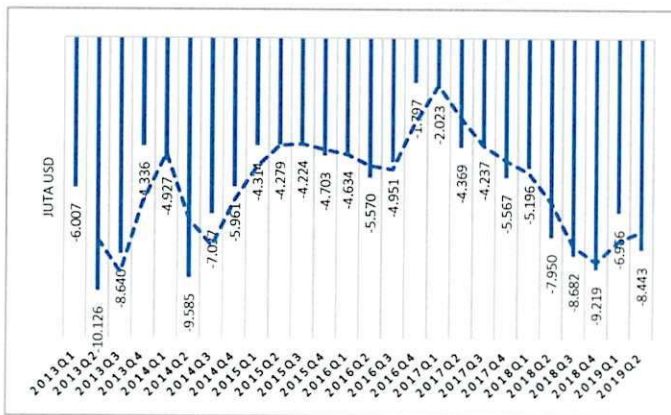
---

<sup>3</sup>*Safe-haven assets* adalah aset investasi yang memiliki kecenderungan mampu bertahan atau bahkan mengalami peningkatan nilai seiring terjadi ketidakpastian dalam pasar. Pada umumnya, aset seperti ini tidak berkorelasi atau bahkan berkorelasi negatif dengan *mainstream* ketika terjadi resesi.

### Defisit transaksi berjalan: sebuah tantangan

Data transaksi berjalan pada triwulan II 2019 menunjukkan pelebaran defisit sejumlah USD8.443 juta, atau meningkat sebesar 21.2 persen dibandingkan dengan defisit transaksi berjalan pada triwulan I 2019.

Grafik 13. Defisit Transaksi Berjalan



Sumber: Bank Indonesia, 2019

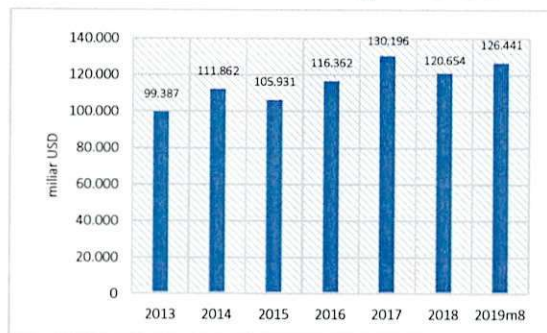
Pelebaran defisit ini memakan proporsi hingga 3 persen dari PDB, dari defisit triwulan I dengan proporsi sebesar 2.6 persen dari PDB. Kondisi ini disebabkan oleh perilaku musiman repatriasi dividen serta pembayaran bunga utang. Tidak hanya itu, defisit transaksi berjalan juga diperparah dengan perlambatan kinerja neraca perdagangan dengan angka defisit neraca perdagangan pada bulan April 2019 mencapai USD2.285,59 juta. Perlambatan indeks harga komoditas global turut menyumbang terhadap pelebaran defisit transaksi berjalan dengan penurunan indeks harga komoditas sebesar 6.5 persen antara April-Juni 2019. Hingga memasuki 2020, diprediksikan bahwa defisit transaksi berjalan akan diupayakan untuk dikendalikan pada kisaran 2.5-3 persen dari PDB di tengah-tengah gempuran perlambatan perekonomian global.

Sementara itu neraca perdagangan Indonesia kembali mencetak defisit sebesar USD64.28 juta setelah dua bulan sebelumnya berhasil mencetak surplus. Namun apabila dibandingkan dengan April 2019, kinerja neraca perdagangan Juni 2019 relatif lebih baik. Melonjaknya defisit neraca perdagangan April 2019 disebabkan oleh meningkatnya defisit neraca perdagangan migas sebesar USD1.490 juta dan nonmigas sebesar USD1.000 juta. Secara umum, ekspor Indonesia masih didominasi oleh ekspor nonmigas sebesar 90 persen, sementara impor Indonesia

didominasi oleh impor *raw materials* (bahan baku dan barang modal) hingga 90 persen, mengindikasikan ketergantungan yang tinggi terhadap *raw materials* impor. Indonesia masih akan terus memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor *raw materials* selama tidak ada gebrakan kebijakan yang mampu mensubstitusi *raw materials* impor.

Sementara posisi cadangan devisa hingga akhir Agustus 2019 tercatat sebesar USD126.441 miliar atau setara dengan pembiayaan 7.4 bulan impor, atau pembiayaan 7.1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri. Jumlah ini sudah melebihi batas standar

**Grafik 14. Posisi Cadangan Devisa**



Sumber: Bank Indonesia, 2019

kecukupan internasional, yaitu sebesar 3 bulan impor. Apabila dibandingkan dengan posisi cadangan devisa akhir 2018, cadangan devisa Indonesia sudah bertambah sejumlah USD5.8 miliar. Untuk ke depannya, Bank Indonesia akan terus menjaga *sustainability* cadangan devisa untuk memastikan stabilitas sektor eksternal dan sistem keuangan.

### **Fokus baru RAPBN 2020**

Pendapatan negara sepanjang periode 2015-2018 terus mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2019, diproyeksikan pendapatan negara akan mengalami pertumbuhan sebesar kurang lebih 5 persen dengan kontribusi terbesar dari pos penerimaan perpajakan sebesar 80.91 persen dan pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 19.02 persen. Penerimaan perpajakan 2019 (*outlook*) diperkirakan akan tumbuh sebesar 8.18 persen dari realisasi 2018. Pertumbuhan penerimaan perpajakan tahun 2019 disokong oleh berbagai kebijakan antara lain program penertiban impor, cukai, ekspor berisiko tinggi (PICE-BT), dan implementasi

*Automatic Exchange of Information/AEol*. Sementara untuk PNBP diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan negatif sebesar -5.62 persen yang disebabkan oleh, antara lain, penurunan penerimaan SDA dan penurunan pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan. Untuk tahun 2020, ditetapkan target pendapatan negara akan tumbuh sebesar 9.23 persen yang disokong dengan pertumbuhan positif dari penerimaan perpajakan sebesar 13.31 persen. Melihat target yang sangat optimis dari pemerintah pada RAPBN 2020, muncul pertanyaan: kebijakan reformasi perpajakan seperti apa yang mampu meningkatkan pendapatan negara, di sisi lain pemerintah juga tengah gencar meluncurkan aneka insentif pajak untuk mendorong aktivitas ekonomi?

**Tabel 4. Postur APBN**

triliun rupiah

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**
<b>Pendapatan Negara</b>	1508	1555,9	1666,4	1943,7	2030,8	2221,5
Pendapatan Dalam Negeri	1496	1546,9	1654,7	1928,1	2029,4	2221
1. Penerimaan Perpajakan	1240,4	1285	1343,5	1518,8	1643,1	1861,8
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	255,6	262	311,2	409,3	386,3	359,3
Penerimaan Hibah	12	9	11,6	15,6	1,3	0,5
<b>Belanja Negara</b>	1806,4	1864,3	2007,4	2213,1	2341,6	2528,8
1. Belanja Pemerintah Pusat	1183,3	1154	1265,4	1455,3	1527,2	1670
2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	623,1	710,3	742	757,8	814,4	858,8
<b>Defisit Anggaran</b>	-298,4	-308,4	-341	-269,4	-310,8	-307,3
<b>% Defisit / PDB</b>	2,59	2,49	2,51	1,82	1,93	1,76

\*) Outlook 2019

\*\*) RAPBN 2020

Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

Sementara belanja negara mengalami pertumbuhan positif secara nominal sepanjang periode 2015-2018. Untuk tahun 2019 (*outlook*), diproyeksikan total belanja negara akan meningkat sebesar 5.81 persen yang didukung oleh pertumbuhan belanja pemerintah pusat sebesar 4.94 persen dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar 7.47 persen. Tahun 2020, pemerintah telah menetapkan kenaikan belanja negara sebesar 8 persen dengan kenaikan belanja pemerintah pusat sebesar 9.35 persen

dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar 5.45 persen. Kegiatan belanja negara 2020 diarahkan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan tema **Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas** dalam kerangka fokus RAPBN 2020 **Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**. Hal ini menyiratkan tantangan bagi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan-kebijakan lama dan merumuskan kebijakan-kebijakan baru yang mampu menjawab kebutuhan sumber daya manusia Indonesia yang unggul untuk meningkatkan daya saing. Aneka kebijakan baru yang akan mewarnai tahun anggaran 2020 antara lain *super deduction tax* bagi industri yang berkontribusi bagi pengembangan vokasi dan litbang, Kartu Indonesia Pintar Kuliah dan Kartu Pra Kerja.

Terkait defisit anggaran, pada September 2019, Kementerian Keuangan mengoreksi *outlook* defisit anggaran menjadi 1.93 persen dari angka *outlook* mula-mula sebesar 1.84 persen. Hal ini disebabkan salah satunya oleh pelemahan perekonomian global yang turut berpengaruh terhadap beberapa pos-pos APBN. Pertumbuhan penerimaan tidak mampu menyamai pertumbuhan belanja negara menyebabkan defisit anggaran diprediksikan akan melebar pada 2019. Sejauh ini, untuk RAPBN 2020, pemerintah menetapkan target defisit anggaran sebesar 1.76 persen dari PDB. Angka target ini, senada dengan target penerimaan perpajakan, dinilai sangat optimis, mengingat angka ini merupakan rasio defisit terendah dalam 5 tahun terakhir. Target ini mensyaratkan upaya-upaya serius dari pemerintah untuk mengelola APBN dengan lebih efektif sehingga mampu menarik keseimbangan primer mendekati angka positif.

#### DAFTAR PUSTAKA

Asian Development Bank. 2019. *Indonesia: Economy*. Diakses melalui <https://www.adb.org/countries/indonesia/economy>

Badan Pusat Statistik. 2019. [Seri 2010] Distribusi PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2014-2019. Diakses melalui

<https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/05/06/828/-seri-2010-distribusi-pdb-triwulanan-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha-persen-2014-2019.html>

Badan Pusat Statistik. 2019. [Seri 2010] Distribusi PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), 2014-2019. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/08/06/835/-seri-2010-distribusi-pdb-triwulanan-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-pengeluaran-persen-2014-2019.html>

Badan Pusat Statistik. 2019. [Seri 2010] Laju Pertumbuhan Kumulatif Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2017 – 2019. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/05/05/1253/-seri-2010-laju-pertumbuhan-kumulatif-produk-domestik-bruto-menurut-lapangan-usaha-persen-2017---2019.html>

Badan Pusat Statistik. 2019. [Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDB menurut Pengeluaran (Persen), 2017 – 2019. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/05/08/1258/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdb-menurut-pengeluaran-persen-2017---2019.html>

Badan Pusat Statistik. 2019. [Seri 2010] Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi, 2010-2018. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/10/07/961/-seri-2010-laju-pertumbuhan-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-provinsi-2010-2018-persen-.html>

Badan Pusat Statistik. 2019. Inflasi Umum, Inti, Harga Yang Diatur Pemerintah, dan Barang Bergejolak Inflasi Indonesia. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/statictable/2012/02/02/908/inflasi-umum-inti-harga-yang-diatur-pemerintah-dan-barang-bergejolak-inflasi-indonesia-2009-2019.html>

Badan Pusat Statistik. 2019. Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 1986 – 2018. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/statictable/2009/04/16/972/pengangguran-terbuka-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-1986---2018.html>

Badan Pusat Statistik. 2019. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi, 1986-2018. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/15/981/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-provinsi-1986---2018.html>

Bank Indonesia. 2019. *BI 7-day (Reverse) Repo Rate*. Diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/moneter/bi-7day-RR/data/Contents/Default.aspx>

Bank Indonesia. 2019. Kurs Tengah Beberapa Mata Uang Utama Terhadap Rupiah di Bank Indonesia. Diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/statistik/seki/terkini/eksternal/Contents/Default.aspx>

- Bank Indonesia. 2019. Neraca Pembayaran Indonesia: Ringkasan. Diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/statistik/seki/terkini/eksternal/Contents/Default.aspx>
- Bank Indonesia. 2019. Posisi Cadangan Devisa. Diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/statistik/seki/terkini/eksternal/Contents/Default.aspx>
- Bank Indonesia. 2019. Suku Bunga Pinjaman Rupiah yang diberikan Menurut Kelompok Bank dan Jenis Penggunaan. Diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/statistik/seki/terkini/moneter/Contents/Default.aspx>
- Bank Indonesia. 2019. Tinjauan Kebijakan Moneter September 2019. Diakses melalui [https://www.bi.go.id/id/publikasi/kebijakan-moneter/tinjauan/Pages/TKM-September\\_2019.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/kebijakan-moneter/tinjauan/Pages/TKM-September_2019.aspx)
- Bank Indonesia. 2019. Uang Beredar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/statistik/seki/terkini/moneter/Contents/Default.aspx>
- Chen, James. 2019, 6 Mei. *Safe Haven*. Investopedia. Diakses melalui <https://www.investopedia.com/terms/s/safe-haven.asp>
- DiChristopher, Tom. 2018, 31 Des. *Oil prices just had their worst year since 2015 — here's what went wrong*. CNBC. Diakses melalui <https://www.cnbc.com/2018/12/31/oil-prices-are-set-for-their-worst-year-since-2015.html>
- Economic Policy Uncertainty. 2019. *Economic Policy Uncertainty Index*. Diakses melalui <https://www.policyuncertainty.com/>
- Farrer, Martin. 2019, 1 Sep. *US and China begin imposing new tariffs as trade war escalates*. *The Guardian*. Diakses melalui <https://www.theguardian.com/business/2019/sep/01/us-and-china-begin-imposing-new-tariffs-as-trade-war-escalates>
- Fauzia, Mutia. 2019, 19 Juli. Penurunan Suku Bunga Acuan BI Bakal Turunkan Bunga Kredit Bank, Kapan?. Kompas. Diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2019/07/19/064400626/penurunan-suku-bunga-acuan-bi-bakal-turunkan-bunga-kredit-bank-kapan->
- IMF. 2019. *3-Month or 90-day Rates and Yields: Interbank Rates for Indonesia*. Diakses melalui FRED St Louis <https://fred.stlouisfed.org/series/IR3TIB01IDM156N>
- IMF. 2019. *Global Price Index of All Commodities*. Diakses melalui FRED St Louis <https://fred.stlouisfed.org/series/PALLFNINDEXM>
- IMF. 2019. *Global price of Brent Crude*. Diakses melalui FRED St Louis <https://fred.stlouisfed.org/series/POILBREUSD>
- IMF. 2019. *Global price of WTI Crude*. Diakses melalui FRED St Louis <https://fred.stlouisfed.org/series/POILWTIUUSD>

- IMF. 2019. *Gross Domestic Product by Expenditure in Constant Prices: Total Gross Domestic Product for Indonesia*. Diakses melalui FRED St Louis <https://fred.stlouisfed.org/series/NAEXKP01IDA657S>
- IMF. 2019. *Other 3-Month Rates: Bank Deposit Rates for Indonesia*. Diakses melalui FRED St Louis <https://fred.stlouisfed.org/series/IR3OBD01IDM156N>
- IMF. 2019. *World Economic Outlook July 2019: Still Sluggish Global Growth*. Diakses melalui <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/07/18/WEOupdateJuly2019>
- Kementerian Keuangan. 2019. Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/uu-apbn-dan-nota-keuangan/uu-apbn-dan-nota-keuangan-2020/>
- Kementerian Perdagangan. 2019. Ekspor Impor. Diakses melalui <https://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/economic-indicators/indonesia-export-import>
- Kementerian Perdagangan. 2019. Neraca Perdagangan Indonesia Total. Diakses melalui <https://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/indonesia-trade-balance>
- Kusnandar, Viva Budy. 2019, 16 Mei. April 2019, Defisit Neraca Perdagangan Indonesia Terdalam Sepanjang Sejarah. Katadata. Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/16/april-2019-defisit-neraca-perdagangan-indonesia-terdalam-sepanjang-sejarah>
- Lawder, David. 2019, 31 Agt. *Factbox: Next rounds of Trump's tariffs on Chinese goods to hit consumers*. Reuters. Diakses melalui <https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-tariffs-factbox/factbox-next-rounds-of-trumps-tariffs-on-chinese-goods-to-hit-consumers-idUSKCN1VL0EX>
- Pankratyeva, Alexandra. 2019, 28 Mei. *Oil price trend 2019: what to expect from the global oil market?*. Capital.com. Diakses melalui <https://capital.com/oil-price-trend-2019>
- Pebrianto, Fajar. 2019, 9 Agt. Penyebab Defisit Transaksi Berjalan Triwulan II 2019 Melebar Lagi. Tempo. Diakses melalui <https://bisnis.tempo.co/read/1234044/penyebab-defisit-transaksi-berjalan-triwulan-ii-2019-melebar-lagi/full&view=ok>
- Sulestyono, Eko. 2019, 5 Agt. Kinerja Pertambangan Kuartal II 2019 Menurun. RRI. Diakses melalui [http://rri.co.id/post/berita/703826/ekonomi/kinerja\\_pertambangan\\_kuartal\\_ii\\_2019\\_menurun.html](http://rri.co.id/post/berita/703826/ekonomi/kinerja_pertambangan_kuartal_ii_2019_menurun.html)
- The Jakarta Post. 2019, 1 Agt. *Indonesia needs to issue more reform packages to spur economic growth, IMF says*. Diakses melalui

<https://www.thejakartapost.com/news/2019/08/01/indonesia-needs-to-issue-more-reform-packages-to-spur-economic-growth-imf-says.html>

World Bank. 2019, 1 Jul. *Indonesia Maintains Steady Economic Growth in 2019*. Diakses melalui <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/07/01/indonesia-maintains-steady-economic-growth-in-2019>



**Lampiran 10.1 Draft Pedoman**

**PEDOMAN PENYUSUNAN *ECONOMIC OUTLOOK*  
TERINTEGRASI DALAM BUKU PREDIKSI ASUMSI DASAR EKONOMI  
MAKRO (PADEM) DENGAN METODE *FINANCIAL PROGRAMMING*  
*POLICY* (FPP)**

**I. Definisi dan Tujuan Metode *Financial Programming Policy***

*Financial Programming Policy* (FPP) adalah sebuah kerangka analisis yang memberikan gambaran mengenai keadaan terkini suatu perekonomian, memproyeksikan arah kinerjanya, serta mengidentifikasi kebijakan-kebijakan ekonomi yang mampu mengubah arah tersebut (edX, 2019). Hal ini tidak jauh berbeda dengan definisi dari IMF, bahwa FPP memberikan penjelasan mengenai: 1) apa yang terjadi dalam suatu perekonomian beserta dengan sebab-akibat yang terjadi di dalamnya (mengembangkan suatu gambaran besar/*big picture*; 2) memproyeksikan arah kinerja perekonomian apabila tanpa intervensi pemerintah (mengembangkan *baseline*); 3) merumuskan kebijakan ekonomi yang mampu menstabilkan perekonomian dan mencegah krisis (mengembangkan skenario kebijakan). Secara umum, FPP terdiri dari berbagai sub-kegiatan analisis:

- a) mengidentifikasi, setidaknya, 4 sektor utama dalam sebuah perekonomian (sektor riil, sektor publik, sektor moneter, dan sektor eksternal) dan memahami hubungan antarsektor;
- b) membaca, menginterpretasi, dan menganalisis data makroekonomi;
- c) mengidentifikasi ketidakseimbangan yang terjadi dalam perekonomian;
- d) memperoleh dan menganalisis data.

Dari penjelasan singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis menggunakan metode FPP akan memberikan gambaran besar mengenai kondisi makroekonomi Indonesia berbasis data makroekonomi terbaru yang disertai dengan proyeksi kinerja perekonomian ke depan. Gambaran seperti dapat menjadi fondasi yang melandasi analisis dan prediksi per variabel ekonomi, sebagaimana yang ada di dalam Buku PADEM. Fondasi ini akan mengarahkan semua tulisan di dalam buku PADEM menjadi lebih konsisten dan komprehensif.

## II. **Template Economic Outlook**

Artikel *Economic Outlook* setidaknya memuat analisis dari 4 sektor utama ekonomi, yaitu sektor riil, sektor publik, sektor moneter, dan sektor eksternal. Namun pada dasarnya *Economic Outlook* dapat memuat analisis dari sektor dan subsektor ekonomi lain yang sekiranya memiliki keterkaitan dengan 4 sektor utama tersebut. Mengutip dari materi pelatihan FPP dari World Bank, secara umum *Economic Outlook* dengan metode FPP memuat:

- a) kondisi perekonomian regional/dunia yang memiliki keterkaitan dengan kondisi perekonomian Indonesia;
- b) kondisi sektor riil;
- c) kondisi sektor moneter;
- d) kondisi sektor eksternal;
- e) kondisi sektor publik;
- f) risiko ekonomi dan fiskal yang akan terjadi di masa yang akan datang.

## III. **Variabel Pengukuran dan Sumber Data**

Sektor	Variabel Pengukuran	Sumber Data
Perekonomian global	Pertumbuhan ekonomi global	IMF
	Pertumbuhan perdagangan global	IMF
	Indeks harga seluruh komoditas	IMF
	Indeks harga komoditas migas	IMF
	Indeks harga komoditas nonmigas	IMF

	Harga dan permintaan minyak mentah dunia	IMF
	Variabel relevan lain yang mampu memberikan gambaran mengenai perekonomian dunia dan memiliki korelasi dengan perekonomian Indonesia, misalnya suku bunga The Fed, indeks ketidakpastian ekonomi, tingkat inflasi global, dan lain-lain	Menyesuaikan
Sektor riil	Pertumbuhan ekonomi beserta dengan struktur dan komponennya	IMF, BPS
	Inflasi beserta dengan struktur dan komponennya	BPS
	Ketenagakerjaan dan pengangguran	BPS
Sektor moneter	Kebijakan berbagai suku bunga	BI, IMF
	Nilai tukar/kurs, terutama mata uang rupiah dengan mata uang internasional	BI
	Jumlah uang beredar/ <i>money supply</i>	BI
	Variabel relevan lain, misalnya berbagai variabel terkait kondisi pasar finansial dan perbankan (posisi pinjaman dan posisi simpanan perbankan, suku bunga surat berharga pemerintah)	Menyesuaikan
Sektor eksternal	Neraca pembayaran	BI
	Neraca berjalan	BI
	Posisi cadangan devisa	BI, IMF
	Ekspor-impor beserta dengan strukturnya	BI, Kementerian Perdagangan, BPS
	Neraca perdagangan	BI, Kementerian Perdagangan, BPS
	Variabel relevan lain misalnya aliran modal masuk/keluar, struktur hutang luar negeri	Menyesuaikan
Sektor publik	Postur RAPBN	Kementerian Keuangan
	Defisit anggaran	Kementerian Keuangan
	Kondisi fiskal	Kementerian Keuangan

Risiko ekonomi dan fiskal	Naratif, menyesuaikan dengan <i>resume</i> proyeksi setiap sektor yang telah dielaborasi sebelumnya	Menyesuaikan
---------------------------	---	--------------

#### IV. **Feature**

*Feature* adalah isu yang menjadi *highlight* dalam *Economic Outlook*. Isu ini berupa permasalahan ekonomi yang penting dan memiliki dampak yang besar bagi arah kinerja perekonomian ke depan. *Feature* ini dapat dimuat dalam bentuk bagian/subbagian/alinea tersendiri, maupun termuat di dalam bagian lain, namun harus tertuang dengan padat dan jelas. *Feature* dapat berupa pernyataan singkat maupun pertanyaan kritis bagi pemerintah. Pada konsep *Economic Outlook 2020*, salah satu isu yang diangkat adalah *premature deindustrialisation* dan komitmen pemerintah untuk merevitalisasi peranan sektor industri manufaktur. Tidak hanya itu, di dalam artikel tersebut juga mempertanyakan target optimistis penerimaan perpajakan dan defisit anggaran pada 2020.

#### V. **Roadmap Pengembangan oleh World Bank**

*Roadmap* ini berisi langkah-langkah strategis yang harus mulai diinisiasi oleh Pusat Kajian Anggaran DPR RI untuk memperkuat kualitas analisis makroekonomi, secara khusus adalah *Economic Outlook* yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun:

- 1) Memperkuat database ekonomi. Diperlukan untuk dibentuk sebuah tim penghimpun dan pengelola data ekonomi yang selalu memperbaharui dan memastikan konsistensi serta validitas data ekonomi. Selain itu, untuk memperkuat sumber daya manusia di Pusat Kajian Anggaran, aneka pelatihan mengenai FPP, permodelan, teori makroekonomi, dan materi lain yang relevan perlu diikuti/diselenggarakan. Langkah ini dilaksanakan dalam kurun waktu 1-1.5 tahun.

- 2) Memperkuat konstruksi model ekonomi dan mengikuti aneka pelatihan dan pengayaan yang lebih *advanced*. Langkah ini dilaksanakan dalam kurun waktu 1-1.5 tahun.
- 3) Membuat konstruksi model ekonomi yang lebih besar, menyusun pedoman *manual* untuk mempermudah transfer pengetahuan, serta meningkatkan kuantitas sumber daya manusia Pusat Kajian Anggaran. Langkah ini dilaksanakan dalam kurun waktu 1-2 tahun.

#### DAFTAR PUSTAKA

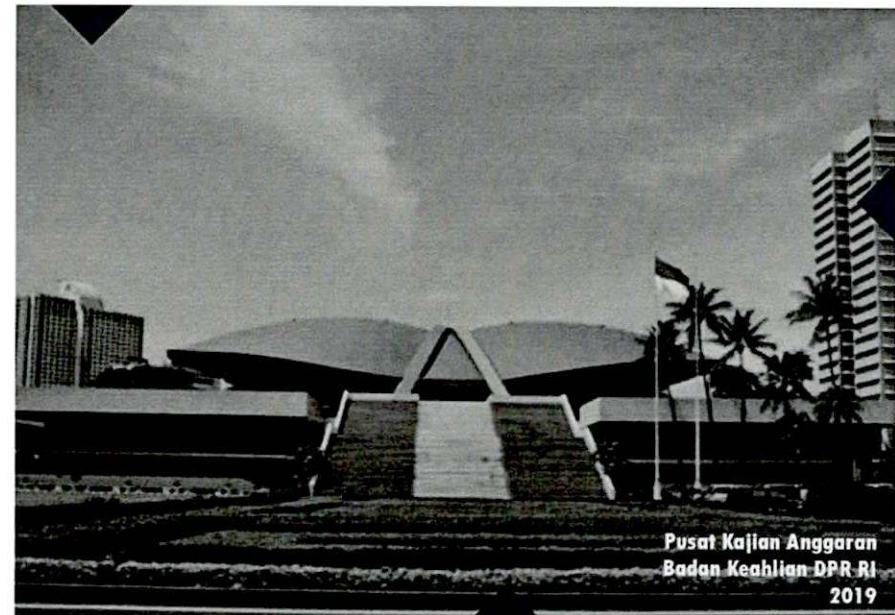
- Dhaniel, Ilyas. 2019. Panduan Untuk Menganalisa Kerangka Makro RAPBN.
- Dhaniel Ilyas. 2019. *Roadmap* Pengembangan Analisis RAPBN Tim Makroekonomi PKA–DPR RI.
- Dhaniel, Ilyas. 2019. *Template Executive Summary* Analisis Kerangka Makro RAPBN 2020.
- edX. 2019. Financial Programming and Policies, Part 1: Macroeconomic Accounts & Analysis. Diakses melalui <https://www.edx.org/course/financial-programming-and-policies-part-1-macroeconomic-accounts-analysis-2>
- Gottschalk, Jan. 2014. Overview to Financial Programming & Policies Workshop. Diakses melalui <https://www.imf.org/external/region/tlm/rr/pdf/I0.pdf>

## Lampiran 10.2 Leaflet Pedoman

Tampilan Depan



Tampilan Belakang



## LAMPIRAN 11: TAHAPAN KEGIATAN 3.4 LAPORAN SINGKAT MENTOR



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWASA, PEMUDA, DAN BAKAT BERBUDI INDONESIA

**LAMPIRAN 12: TAHAPAN KEGIATAN 4.1 SURAT UNDANGAN**



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
JL. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715730 FAX. (021) 5715933 LAMAN : [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

Nomor : PA/105/SETJEN DAN BK DPR RI/09/2019  
Derajat : Segera  
Lampiran :  
Perihal : Undangan Rapat Koordinasi  
Yth.  
Pejabat dan Analis  
Di Lingkungan Pusat Kajian Anggaran  
Jakarta

27 September 2019

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan akan melaksanakan Rapat Koordinasi yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 30 September 2019  
Waktu : Pukul 14.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Kepala Pusat Kajian Anggaran  
Gedung Setjen dan BK lantai 6 Ruang 611  
Acara : Presentasi Nadya Ahda, SE dengan judul "Konsep Ekonomi Outlook 2020 Terintegrasi Buku Padem"

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Kajian Anggaran,

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, SE., M.Si  
NIP. 19710911 199703 1 005

**LAMPIRAN 13: TAHAPAN KEGIATAN 4.2 FILE PRESENTASI, CATATAN NOTULENSI, DAN DAFTAR HADIR**

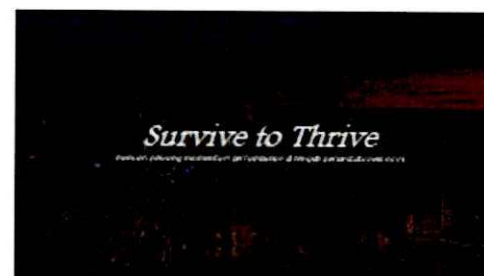
### Lampiran 13.1 *File* Presentasi



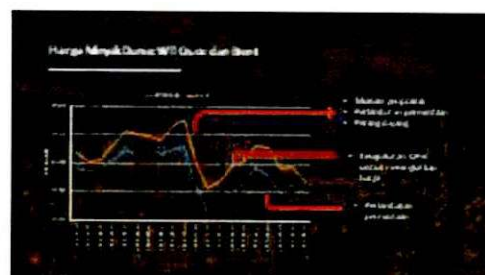
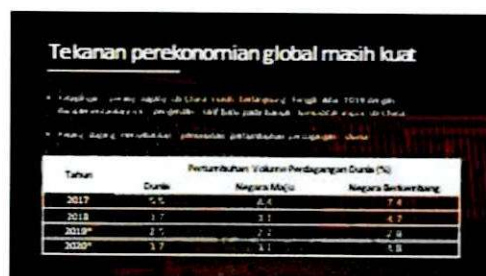
1



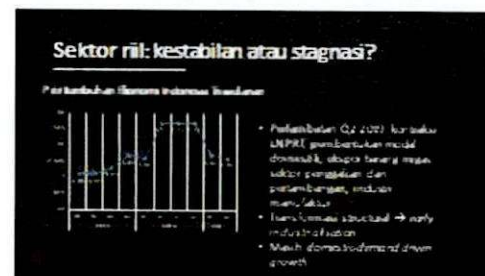
2



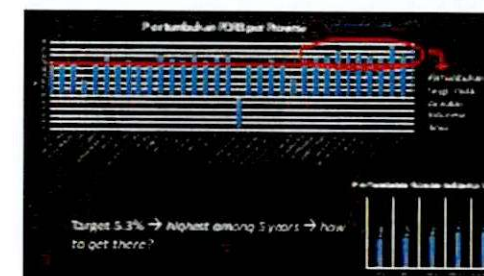
3



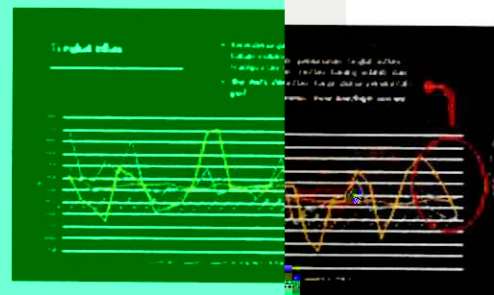
7



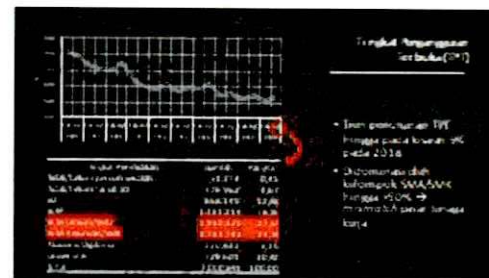
8



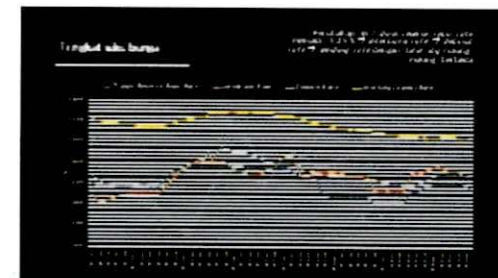
9



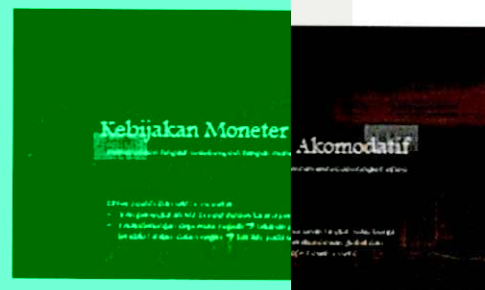
10



11



12



13



14



15

## Lampiran 13.2 Catatan Notulensi Kegiatan Presentasi



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHILIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

### NOTULENSI PELAKSANAAN SESI PRESENTASI INTERNAL PROYEK AKTUALISASI

Hari, tanggal : Senin, 30 September 2019  
Pukul : 14.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat 611 Pusat Kajian Anggaran  
Kegiatan : Presentasi Internal Analisis APBN Pusat Kajian Anggaran  
Mengenal Proyek Aktualisasi Atas Nama Nadya Ahda

#### I. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Sebagai salah satu tahapan kegiatan aktualisasi, presentasi internal dilaksanakan dengan tujuan memperoleh *feedbacks* berupa kritik, saran, dan masukan dari seluruh Analisis APBN Pusat Kajian Anggaran mengenai konsep dan substansi *Economic Outlook* 2020 yang telah disusun sebagai proyek aktualisasi yang akan dikembangkan dengan keberlanjutan sebagai *output* dari Bagian Perencanaan dan Asumsi Dasar Ekonomi Makro, Pusat Kajian Anggaran. Sesi presentasi dimulai pada pukul 14.00 WIB dan dilaksanakan di Ruang Rapat 611 Pusat Kajian Anggaran, dihadiri oleh beberapa Koordinator Bidang dan sejumlah *staff* Analisis APBN. Adapun tanggapan dan pertanyaan yang diajukan pada sesi presentasi internal kali ini, antara lain:

1. Bapak Slamet Widodo, S.E., M.E., selaku Koordinator Bidang Transfer Daerah dan Dana Desa: bagaimana apabila indeks harga komoditas global juga dimasukkan ke dalam analisis perekonomian global di samping analisis mengenai harga minyak mentah dunia?  
**Jawab:** secara singkat, indeks harga komoditas global sudah ada pada analisis perlambatan ekspor-impor Indonesia, akan tetapi akan dipertimbangkan kembali masukan tersebut untuk dimasukkan juga ke dalam analisis perekonomian global.

2. Bapak Robby Alexander Siralt, S.E., M.E., selaku Koordinator Bidang Belanja Pemerintah Pusat: bagaimana apabila memasukkan variabel lain seperti tingkat kemiskinan, rasio GINI, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di samping angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)? Bagaimana bila definisi "kestabilan" itu dikaitkan pada perlunya lompatan pertumbuhan oleh negara berkembang?  
**Jawab:** menurut panduan *Financial Programming Policy* (FPP) dari World Bank Indonesia, tidak ada variabel tersebut dalam analisis sektor riil, sehingga tidak dimasukkan ke dalam *Economic Outlook*-nya. Kemudian, definisi "kestabilan" akan coba dikaitkan pada urgensi negara berkembang untuk melakukan lompatan pertumbuhan.
3. Bapak Dahiri, S.Si., M.Sc., selaku Analisis APBN: bagaimana mendefinisikan "kestabilan" dan "stagnasi"? Harus ada perhitungan dan parameter yang jelas mengenai batas atas dan batas bawahnya. Selain itu, perlu klarifikasi kembali, dimana letak FPP dalam analisis ini?  
**Jawab:** sepengetahuan penulis, kestabilan adalah upaya pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5 persen, sementara stagnasi adalah kondisi *stuck* Indonesia yang tidak bisa keluar dari kisaran 5 persen (konotasi yang lebih negatif dari kestabilan). Mungkin memang perlu dipertimbangkan kembali mengenai pilihan diksi "kestabilan" dan "stagnasi" supaya tidak rancu. Sementara, FPP adalah sebuah metode atau cara analisis makroekonomi yang membahas kondisi perekonomian sekarang, kondisi *baseline*, prediksi makroekonomi ke depan, serta skenario kebijakan. Jadi FPP adalah sebuah cara analisis yang sudah diterapkan pada penyusunan *Economic Outlook* ini.
4. Ibu Rastri Paramita, S.E., M.M., selaku Koordinator Bidang Perencanaan dan Asumsi Ekonomi Makro: bagaimana memasukkan kondisi perekonomian regional, dalam hal ini adalah ASEAN, ke dalam analisis perekonomian global? Bagaimana dengan memasukkan neraca pembayaran Indonesia di samping transaksi berjalan? Selain itu, perlu menguatkan kembali koneksi aneka variabel makroekonomi ke dalam APBN-nya (sensitivitas pada APBN).


**Jawab:** kondisi perekonomian regional ASEAN akan dimasukkan ke dalam analisis perekonomian global. Kondisi neraca pembayaran Indonesia juga akan dimasukkan ke dalam analisis sektor eksternal. Sensitivitas pada APBN juga akan diperkuat.

Secara umum, tanggapan positif didapatkan dari Kepala Pusat Kajian Anggaran dan rekan-rekan Analisis APBN mengenai penyusunan *Economic Outlook* ini dan diharapkan dapat secara rutin dirilis pada siklus pembicaraan pendahuluan APBN.

#### II. PENUTUP

Demikianlah sesi presentasi internal dilaksanakan. Presentasi ditutup pada pukul 15.30 WIB.

Mengetahui,  
Jakarta, 30 September 2019

  
Rastri Paramita, S.E., M.M.  
198001262014022002

## Lampiran 13.3 Daftar Hadir Presentasi Internal



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
JL. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715730 FAX. (021) 5715933 LAMAN : www.dpr.go.id

### DAFTAR HADIR RAPAT TENTANG

"PRESENTASI NADYA AHDA, SE DENGAN JUDUL "KONSEP EKONOMI OUTLOOK 2020  
TERINTEGRASI BUKU PADEM"

Hari/tanggal : Senin, 30 September 2019  
Waktu : Pukul 14.00 WIB - Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Kepala Pusat Kajian Anggaran DPR RI  
Gedung Setjen dan BK Lantai 6

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. Asep Ahmad Saefulch, SE., MSI	Kapus Kajian Anggaran	
2.	Husnul Latifah, S.Sos.	Kepala Subbagian Tata Usaha	
3.	Slamet Widodo, S.E., M.E.	Analisis APBN Ahli Madya	
4.	Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.	Analisis APBN Ahli Pertama	
5.	Rastri Paramita, S.E., M.M.	Analisis APBN Ahli Pertama	
6.	Dwi Resti Pratiwi, S.T., Mpm	Analisis APBN Ahli Pertama	
7.	Manhot Nasution, Se, M.Si	Analisis APBN Ahli Pertama	
8.	Adhi Prasetyo Satrio W., S.M.	Analisis APBN Ahli Pertama	
9.	Martha Carolina, Se, Ak, M.Ak	Analisis APBN Ahli Pertama	
10.	Ratna Christianingrum, S.Si, M.Si	Analisis APBN Ahli Pertama	
11.	Dahini, S.Si., M.Sc	Analisis APBN Ahli Pertama	
12.	Ade Nurul Aida, S.E.	Analisis APBN Ahli Pertama	

13.	Rendy Alvaro, S.Sos	Analisis APBN Ahli Pertama	
14.	Deasy Dwi Ramliyu, S.E.	Analisis APBN	
15.	Ervia Lutuk Zahara, S.E.	Analisis APBN	
16.	Mutiara Shinta Andini, S.E.	Analisis APBN	
17.	Nadya Ahda, S.E.	Analisis APBN	
18.	Rosalina Tineke Kusumawardhani, S.E.	Analisis APBN	
19.	Riza Aditya Syafri, S. Ak.	Analisis APBN	
20.	Satrio Arga Effendi, S.E.	Analisis APBN	
21.	Savitri Wulandari, S.E.	Analisis APBN	
22.	Tio Riyono, S.E.	Analisis APBN	
23.	Damia Liana, S.E.	Analisis APBN	
24.	Memed Sobari	Staf Pusat Kajian Anggaran	
25.	Musbiyatun	Staf Pusat Kajian Anggaran	
26.	Hilda Piska Randini, S.I.P.	Staf Pusat Kajian Anggaran	
27.	Irisisa		
28.	Laras Linthy A.		
29.	Facila Ruli Lenggo Geni		
30.	Muhammad Fauzan		
31.	Hikmatul Fitra		
32.	Dyah Mawisrah		
33.	Dhani Yandera Bangun		
34.	Fransiska Holida Nohudin		
35.	Enyilia Octaviana		
36.	Riko. W.	Analisis APBN	
37.	Gita Hic Amusfina	Analisis APBN	

## Indonesia Economic Outlook 2020

## Survive to Thrive

Mencari peluang momentum pertumbuhan di tengah perlambatan ekonomi

## Abstrak

Kondisi perekonomian global pada 2019 semakin memburuk seiring menguatnya intensitas perang dagang antara US-China, distorsi mekanisme pasar dari komoditas minyak mentah dunia, dan juga pada seluruh komoditas pada umumnya. Hal ini menyebabkan ketidakpastian ekonomi global semakin tinggi dan menurunkan outlook pertumbuhan ekonomi dunia pada 2019 dan 2020. Pada pertengahan 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat akibat penurunan kinerja berbagai sektor. Sebagai contoh adalah industri manufaktur, mengindikasikan sebuah potensi *early deindustrialisation*. Stagnasi pertumbuhan ekonomi pada keseimbangan baru 5 persen memunculkan urgensi untuk mengupayakan lompatan pertumbuhan ekonomi, mengingat utilisasi faktor produksi di Indonesia masih belum optimal. Tingkat inflasi terjaga stabil pada kisaran 3 persen, sementara masalah *mismatch* ketenagakerjaan masih menjadi permasalahan. Kebijakan moneter diselenggarakan dengan akomodatif untuk mendorong permintaan domestik sehingga mampu mengkompensasi dampak buruk dari gangguan perekonomian global. Kinerja neraca pembayaran Indonesia masih menjadi tantangan bagaimana menekan defisit sekecil mungkin. RAPBN 2020 berfokus pada pembangunan sumber daya manusia dengan target pada pos-pos APBN yang sangat optimistis, mensyaratkan upaya serius dari pemerintah untuk mengelola APBN dengan efisien.

## Tekanan perekonomian global masih kuat

Ketegangan perang dagang antara US dan China masih terjadi hingga pertengahan 2019 dan diprediksi masih akan berlangsung hingga memasuki tahun 2020. Pada awal September 2019, US memutuskan untuk membebankan tarif sebesar 15 persen pada produk konsumen (*consumer products*) dari China senilai USD125 miliar, termasuk di dalamnya adalah produk-produk seperti peralatan elektronik dan pakaian. Tidak hanya itu, berlaku efektif 1 Oktober 2019, US mempertimbangkan akan mengenakan peningkatan tarif dari 25 persen menjadi 30 persen atas produk impor China senilai USD250 miliar, termasuk di dalamnya adalah aneka produk konsumen dan produk nonkonsumen (*non-consumer goods*) seperti mesin, peralatan listrik, dan peralatan bangunan. Kemudian, pada 15 Desember 2019, US juga akan mengenakan tarif sebesar 15 persen pada aneka produk teknologi, seperti telepon genggam dan laptop. Penundaan pengenaan tarif pada produk-produk ini hingga Desember 2019 merupakan salah satu bentuk kebijakan Presiden Trump untuk melindungi konsumen US sebelum musim akhir tahun.

Menanggapi kebijakan pengenaan tarif yang masih terus berlangsung atas produk-produknya, China turut mengenakan tambahan tarif sebesar 5-10 persen atas barang impor US senilai USD75 miliar. Berlaku efektif pada 1 September 2019, China juga akan membebankan tarif untuk pertama kalinya atas produk minyak mentah dari US sebesar 5 persen.

Tidak hanya itu, produk kedelai US juga akan dikenakan tambahan tarif sebesar 5 persen dan produk daging dikenakan tambahan tarif sebesar 10 persen. Sementara untuk menjawab "tantangan" pengenaan tarif atas produk-produknya di akhir 2019, China juga berencana akan kembali mengenakan tarif atas kendaraan sebesar 25 persen dan suku cadang dari US sebesar 5 persen.

Upaya "balas dendam" yang tidak berhenti antara US dan China dalam pengenaan tarif impor menyebabkan intensitas ketegangan perang dagang antar keduanya tidak kunjung usai. Perang dagang ini tidak hanya berdampak terhadap kinerja perdagangan internasional kedua negara, tetapi juga turut menyebabkan perlambatan pada lalu lintas perdagangan internasional. Perang dagang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekspor dan impor kedua negara, yang kemudian juga berdampak pada pertumbuhan volume perdagangan global, mengingat pentingnya peranan kedua negara tersebut terhadap *global value chains*. Dampak perang dagang antara US-China terhadap perdagangan dunia dapat dilihat dari Tabel 1.

Tabel 1. Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia

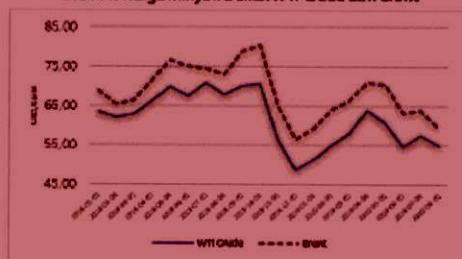
Tahun	Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia (%)		
	Dunia	Negara Maju	Negara Berkembang
2017	5.5	4.4	7.4
2018	3.7	3.1	4.7
2019*	2.5	2.2	2.9
2020*	3.7	3.1	4.8

\*proyeksi  
Sumber: IMF, 2019

Pada tahun 2019, diproyeksikan pertumbuhan volume perdagangan dunia akan mengalami penurunan pada level 2.5 persen, lebih rendah dari angka realisasi pada 2018, yaitu sebesar 3.7 persen. Penurunan pertumbuhan volume perdagangan juga dirasakan baik untuk kelompok negara maju (*advanced economies*) dan kelompok negara berkembang (*emerging market and developing economies*). Negara-negara maju akan diprediksi akan mengalami penurunan pertumbuhan di bawah angka global, yaitu sebesar 2.2 persen. Sementara bagi negara-negara berkembang, penurunan pertumbuhan volume perdagangan pada 2019 diprediksi akan berada pada 2.9 persen. Untuk tahun 2020, diprediksi akan terjadi perbaikan kondisi perekonomian dunia (*recovery*) yang juga akan berdampak bagi lalu lintas perdagangan dunia. Hal ini direfleksikan pada proyeksi angka pertumbuhan volume perdagangan dunia yang membaik pada 2020, baik secara global maupun bagi kelompok negara maju dan berkembang.

Tekanan eksternal tidak hanya datang dari perang dagang US-China, tetapi juga fluktuasi harga dan mekanisme pasar dari minyak mentah dunia (*crude oil*). Pada awal 2019, sempat terjadi peningkatan harga minyak hingga April 2019 sebesar 20 persen untuk Brent dan 24 persen untuk WTI Crude. Namun peningkatan harga minyak tersebut tidak mampu mengkompensasi 40 persen penurunan harga minyak yang signifikan pada Oktober-Desember 2018. Penurunan yang

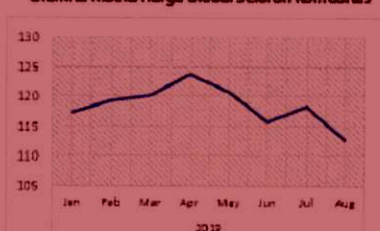
Grafik 1. Harga Minyak Dunia: WTI Crude dan Brent



Sumber: FRED St. Louis, 2019

signifikan pada harga minyak di akhir 2018 disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tekanan geopolitik dari negara-negara produsen minyak, perlambatan permintaan terhadap minyak, serta perang dagang antara US-China. Sementara perbaikan harga minyak dunia pada awal 2019 disokong oleh kesepakatan OPEC dan rekanan untuk mengurangi produksi minyak bumi untuk mengangkat harga. Setelah April 2019, harga minyak bumi cenderung mengalami penurunan, kecuali pada Juli 2019. Tren penurunan harga minyak diprediksi masih akan berlangsung, diiringi dengan perlambatan permintaan minyak dunia. Hal ini diindikasikan dalam penurunan proyeksi harga dan permintaan minyak dunia oleh berbagai lembaga, seperti OPEC dan Morgan Stanley.

Grafik 2. Indeks Harga Global Seluruh Komoditas

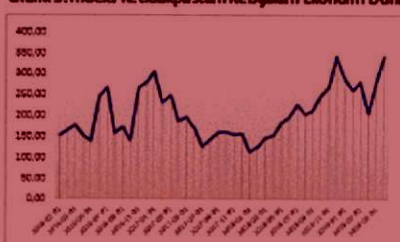


Sumber: FRED St. Louis, 2019

Secara umum, indeks harga global untuk seluruh komoditas menunjukkan tren penurunan sejak awal 2019 sebesar 9 persen hingga bulan Agustus 2019. Indeks harga seluruh komoditas sempat menunjukkan tren peningkatan hingga April 2019 sebelum akhirnya mengalami tren penurunan. Pola pergerakan fluktuasi indeks harga global seluruh komoditas selaras dengan pola pergerakan harga minyak mentah dunia, dengan titik balik pada April 2019. Peristiwa ini juga turut menyebabkan perlambatan bagi kinerja ekspor berbagai negara, termasuk di dalamnya adalah Indonesia, di samping intensitas perang dagang US-China yang semakin kuat.

Perang dagang US-China serta fluktuasi harga dan mekanisme pasar dari minyak mentah dunia menjadi beberapa faktor penting penyebab tingginya ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainty*) yang terjadi di tahun 2019. Sebuah riset dari *Economic Policy Uncertainty* merilis sebuah indeks, Indeks Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi Dunia (*Economic Policy Uncertainty Index*), sebagai sebuah proksi untuk mengukur ketidakpastian yang terjadi secara global. Pada akhir 2018,

Grafik 3. Indeks Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi Dunia



Sumber: Economic Policy Uncertainty, 2019

perekonomian global mengalami puncak ketidakpastian dengan melesotnya harga minyak mentah dunia disertai dengan ketegangan perang dagang antara US-China. Memasuki tahun 2019, ketidakpastian mulai membaik hingga April 2019. Perbaikan kondisi perekonomian didukung oleh membaiknya kondisi mekanisme pasar dari minyak mentah dunia pada Januari-April 2019. Setelah itu, ketidakpastian kembali terjadi, diindikasikan pada angka indeks yang kembali meningkat pada Mei dan Juni 2019.

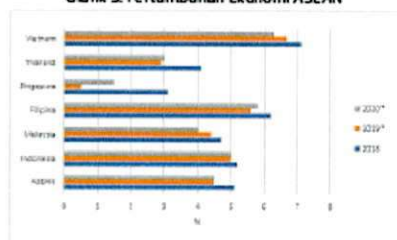
Grafik 4. Pertumbuhan Ekonomi Global

\*) proyeksi  
Sumber: IMF, 2019

Berbagai permasalahan perekonomian yang terjadi dalam skala global telah menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi dunia. Pada tahun 2018, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.2 persen, menjadi 3.6 persen, yang disebabkan oleh berbagai permasalahan perekonomian global. Untuk tahun 2019, diproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan lebih melambat dari 2018, dengan nilai prediksi hanya 3.2 persen yang dilatarbelakangi oleh aneka ketidakpastian ekonomi yang masih berlangsung hingga akhir 2019 sebagaimana telah dielaborasi sebelumnya. Pada 2020, diprediksikan kinerja perekonomian dunia akan membaik dan mengarah pada fase *recovery* dan stabilisasi. Oleh karena itu, meskipun belum mampu mengkompensasi anjloknya pertumbuhan ekonomi yang diprediksi (*predicted global economic growth*) pada tahun 2019, proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2020 sedikit membaik hingga pada level 3.5 persen.

Apabila sekilas melihat kondisi perekonomian regional ASEAN, secara umum pertumbuhan ekonomi ASEAN diprediksi juga akan mengalami perlambatan dengan outlook pertumbuhan ekonomi sebesar 4.5 persen pada 2019 dan 2020, dengan angka realisasi sebelumnya pada 2018 mencapai 5.1 persen. Perlambatan perdagangan dunia yang disebabkan oleh perang

Grafik 5. Pertumbuhan Ekonomi ASEAN



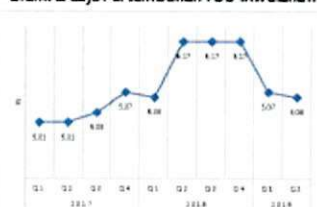
\*proyeksi  
Sumber: IOEW, 2019

dagang US-China, selaku pasar terbesar dari ekspor negara-negara ASEAN, menyebabkan adanya proyeksi perlambatan untuk 2019 dan 2020. Dampak terbesar dirasakan oleh negara-negara yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap komponen ekspor, seperti Singapura. Singapura mengalami penurunan tajam pada pertumbuhan ekonomi, dari 3.1 persen pada 2018 menjadi 0.5 persen pada 2019 dan 1.5 persen pada 2020. Tidak hanya Singapura, Thailand dan Filipina juga merasakan dampak dari perlambatan perdagangan dunia yang ditandai dengan penurunan pertumbuhan ekonomi yang diprediksi pada 2019. Akan tetapi, penurunan tersebut tidak sebesar penurunan yang dialami oleh Singapura. Sementara Indonesia, Vietnam, dan Malaysia tidak menanggung biaya yang besar dari perlambatan perdagangan global karena dampak buruknya terkompensasi oleh masih cukup kuatnya permintaan domestik menopang pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk lebih mendongkrak permintaan domestik, mayoritas bank sentral dari negara-negara anggota ASEAN diproyeksikan akan menurunkan tingkat suku bunga dan hal ini sudah dilakukan oleh Bank Indonesia selama tahun 2019 dengan mengeluarkan kebijakan moneter yang akomodatif<sup>1</sup>.

#### Pertumbuhan ekonomi Indonesia: sebuah keseimbangan baru

Pada triwulan II 2019, terjadi sedikit perlambatan pertumbuhan ekonomi pada level 5.06 persen, dari pencapaian pertumbuhan ekonomi triwulan I 2019 sebesar 5.07 persen. Perlambatan ini dimulai saat memasuki tahun 2019, bagaimana laju pertumbuhan pada triwulan I mengalami penurunan signifikan pada level 5.07 persen, dari sebelumnya mampu menjaga pencapaiannya pada level 5.17 persen selama 3 triwulan terakhir. Apabila diuraikan pada komponen pengeluaran,

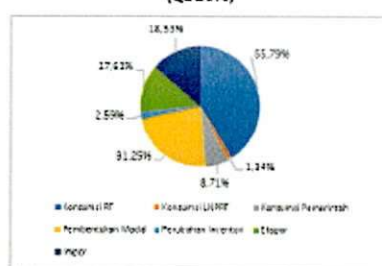
Grafik 6. Laju Pertumbuhan PDB Triwulanan



Sumber: BPS, 2019

perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2019 disebabkan oleh penurunan angka pertumbuhan konsumsi LNPRT, beberapa komponen pembentukan modal tetap domestik, serta ekspor barang migas. Kontraksi komponen pengeluaran paling signifikan terjadi pada ekspor barang migas, dari -9.33 persen pada triwulan I menuju -20.45 persen pada triwulan II. Salah satu penyebabnya adalah kecenderungan penurunan harga komoditas migas pada triwulan II, sebagaimana telah diilustrasikan pada Grafik 1.

Grafik 7. Distribusi PDB Menurut Komponen Pengeluaran (Q2 2019)



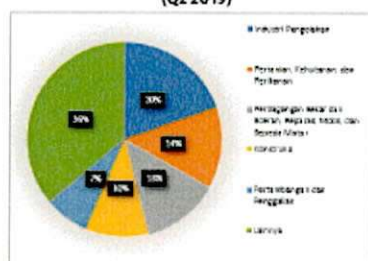
Sumber: BPS, 2019

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih disokong oleh permintaan domestik (*domestic demand-driven growth*). Hal ini terlihat pada Grafik 7, bagaimana hampir 96 persen PDB dibentuk oleh komponen permintaan domestik. Dari tahun ke tahun, komposisi PDB menurut komponen pengeluaran tidak berubah dan diproyeksikan tidak akan mengalami perubahan komposisi yang signifikan dalam waktu dekat.

Apabila diuraikan pada komponen sektor lapangan usaha, perlambatan pertumbuhan ekonomi di triwulan II disebabkan oleh perlambatan di beberapa sektor, seperti pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi makan dan minum; jasa keuangan dan asuransi; serta jasa perusahaan. Perlambatan signifikan pada triwulan II 2019 terjadi di sektor pertambangan penggalian dengan angka pertumbuhan 0.79 persen, dari sebelumnya mencapai 2.32 persen pada triwulan I 2019. Hal ini disebabkan oleh penurunan produksi bijih logam sebesar 25.93 persen. Selain itu, produksi migas dan panas bumi juga mengalami penurunan sebesar 4.11 persen, menyebabkan tersendatnya kinerja sektor pertambangan dan penggalian pada triwulan II 2019. Sementara sektor industri pengolahan dinilai terus mengalami penurunan kinerja sejak triwulan II 2018. Bermula pada angka pertumbuhan 4.60 persen pada triwulan I 2018, data terakhir pada triwulan II 2019 menunjukkan bahwa industri manufaktur tumbuh pada level 3.70 persen. Di sisi lain, sektor industri manufaktur masih menjadi sektor penyumbang PDB terbesar, yaitu sebesar hampir 20 persen PDB, akan tetapi kontribusi dan pertumbuhannya cenderung mengalami stagnasi, bahkan perlambatan dari waktu ke waktu. Hal ini mengindikasikan urgensi akan kebijakan yang mampu memberikan gebrakan

bagi industri manufaktur untuk meningkatkan daya saingnya.

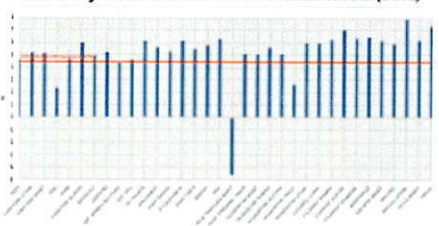
Grafik 8. Distribusi PDB Menurut Komponen Lapangan Usaha (Q2 2019)



Sumber: BPS, 2019

Sebagaimana yang telah disinggung pada alinea sebelumnya bahwa industri pengolahan masih menjadi sektor dengan kontribusi terbesar bagi PDB, yaitu pada kisaran 20 persen dari PDB. Menyusul sektor industri pengolahan, sektor perikanan, kehutanan, dan perikanan menyumbang sekitar 14 persen PDB, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13 persen, konstruksi sebesar 10 persen, pertambangan dan penggalan sebesar 7 persen, dan sisanya, 36 persen, merupakan sumbangan aneka sektor jasa. Apabila melihat angka pertumbuhan dari masing-masing sektor, sektor industri pengolahan dinilai mengalami stagnasi, apabila tidak bisa dikatakan sebagai suatu perlambatan, pada kisaran 4 persen sejak triwulan I 2017. Sementara sektor pertanian terus mengalami perlambatan secara konstan dari waktu ke waktu. Di sisi lain, aneka sektor jasa mulai menunjukkan kinerja yang baik, ditunjukkan pertumbuhan positif yang konstan. Hal ini dapat menjadi indikasi awal bahwa ada kemungkinan Indonesia tengah mengalami transformasi struktural, melihat perlambatan konstan dari sektor primer dan sekunder yang diiringi dengan kemajuan sektor tersier. Namun perlu diperhatikan bahwa ini adalah *early warning* dari *premature deindustrialisation*, yaitu ketika suatu negara mengalami penurunan kontribusi sektor manufaktur di saat level pembangunan ekonomi masih rendah dan kontribusi tersebut belum pernah mencapai titik optimalnya. Dengan kata lain, saat ini Indonesia dinilai tengah menghadapi transformasi struktural yang tidak matang. Menjadi sebuah pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah untuk mendorong kembali sektor manufaktur apabila tidak diinisiasi dalam suatu kerangka kebijakan reformasi industri manufaktur yang komprehensif.

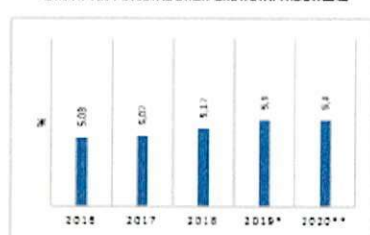
Grafik 9. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Provinsi (2018)



Sumber: BPS, 2019

Apabila diuraikan secara regional, dari tahun ke tahun, komposisi PDB Indonesia masih Jawa-sentris, ditunjukkan kontribusi Pulau Jawa konstan mendekati angka 60 persen dari PDB nasional. Melihat dari pertumbuhan PDRB setiap provinsi, pada tahun 2018, seluruh provinsi di Pulau Jawa menikmati angka pertumbuhan ekonomi lebih dari angka pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak hanya Pulau Jawa, provinsi-provinsi di Wilayah Indonesia Timur (WIT) juga merasakan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Grafik 9), dapat mengindikasikan dampak positif dari upaya pemerintah menyelenggarakan pemerataan ekonomi hingga Indonesia Timur. Sementara itu, NTB mengalami pertumbuhan ekonomi negatif sebesar -4.56 persen akibat bencana gempa bumi pada pertengahan 2018 yang berdampak pada lumpuhnya aktivitas ekonomi untuk beberapa saat.

Grafik 10. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



\*APBN 2019

\*\*RAPBN 2020

Sumber: FRED St Louis, 2019

Untuk pertumbuhan ekonomi 2019 dan 2020, pemerintah dan DPR bersepakat untuk memproyeksikan pada level 5.3 persen yang tertuang pada APBN 2019 dan RAPBN 2020. Angka proyeksi ini lebih tinggi daripada pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018, yaitu sebesar 5.2 persen. Mengingat tekanan eksternal masih kuat hingga akhir 2019, diperparah dengan penurunan kinerja beberapa komponen PDB, misalnya sektor industri manufaktur, maka muncul pertanyaan bagi pemerintah, arah dan langkah kebijakan seperti apa yang akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 dan 2020 hingga pada level 5.3 persen, sebuah target pencapaian tertinggi dari realisasi pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2014?

Apabila melihat realisasi pencapaian angka pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berada pada kisaran 5 persen sejak 2013, hal ini mengindikasikan Indonesia tengah memasuki sebuah keseimbangan (*equilibrium*) baru, setelah "terpental" dari keseimbangan 6 persen selama 2007-2012<sup>2</sup>. Melihat realita stagnasi pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun terakhir, tentu sudah menjadi urgensi bagi Indonesia untuk mendorong lompatan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemanfaatan faktor-faktor produksi di Indonesia yang masih belum efisien, menyisakan ruang yang besar bagi Indonesia untuk mengupayakan lompatan pertumbuhan.

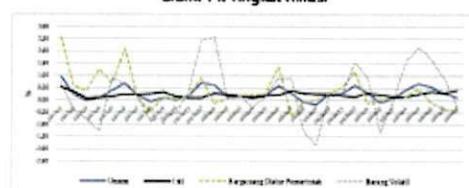
Di sisi lain, lembaga-lembaga internasional juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 akan stagnan pada kisaran 5.1-5.2 persen, tidak ada perubahan yang signifikan dari realisasi pertumbuhan ekonomi 2018.

Tabel 2. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Lembaga	2019	2020
ADB	5.2	5.3
World Bank	5.1	5.2
IMF	5.2	5.2

Sementara untuk tahun 2020, diprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sedikit lebih tinggi, berada kisaran 5.2-5.3 persen. Fokus pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengarah pada kestabilan di 2019 dan *recovery* pada 2020, sehingga proyeksi dari berbagai lembaga cenderung meningkatkan angka prediksi pertumbuhan ekonominya pada 2020 dibandingkan dengan proyeksi 2019.

Grafik 11. Tingkat Inflasi



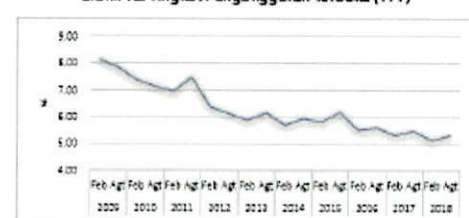
Sumber: BPS, 2019

Pada bulan Agustus 2019, tercatat tingkat inflasi umum sebesar 0.12 persen, lebih rendah daripada tingkat inflasi Juli 2019 sebesar 0.31 persen. Sejak Juni 2019, secara khusus setelah Idul Fitri berlalu, tingkat inflasi bulanan cenderung terus menurun. Salah satu komponen pengeluaran penyumbang deflasi Agustus 2019 adalah bahan makanan dengan tingkat deflasi 0.19 persen. Hal ini juga direfleksikan pada inflasi komponen barang volatil (termasuk di dalamnya adalah bahan makanan) sebesar -0.25 persen, lebih rendah dari angka bulan Juli, yaitu sebesar 0.89 persen. Selain karena bahan makanan, komponen transportasi, komunikasi dan jasa keuangan juga mencatat deflasi sebesar -0.55 persen, salah satunya disebabkan oleh intervensi harga yang dilakukan pemerintah pada harga tiket pesawat. Hal ini juga tergambar pada inflasi komponen harga yang diatur pemerintah (*administered price*) sebesar -0.40 persen, lebih rendah dari angka bulan Juli 2019, yaitu sebesar 0.36 persen. Secara umum, tingkat inflasi akan mengikuti pola musiman (*seasonality*), dan cenderung akan meningkat mendekati akhir tahun dan akan kembali menurun memasuki awal tahun.

Sejak tahun 2015, tingkat inflasi tahunan stagnan pada kisaran level 3 persen, mengindikasikan fokus otoritas moneter untuk menjaga inflasi yang relatif rendah dan stabil. Dalam upaya menjaga tingkat inflasi tersebut, perlu diperhatikan potensi terjadinya *The Fed's Dilemma*, yaitu bagaimana mencapai tingkat inflasi yang ideal bagi perekonomian. Tingkat inflasi tidak boleh terlalu tinggi hingga memberatkan biaya hidup (*cost of living*) dan biaya meminjam (*cost of borrowing*) sehingga menjadikan perekonomian lesu. Tingkat inflasi juga tidak boleh terlalu rendah hingga men-*discourage* konsumsi masyarakat dan ekspansi bisnis yang dilakukan oleh investor. Dalam hal ini, Indonesia perlu mengevaluasi kembali mengenai tingkat inflasi yang paling ideal dan menimbang kemungkinan sedikit

peningkatan tingkat inflasi yang mampu memberikan dorongan aktivitas ekonomi namun dengan *cost* yang paling rendah.

Grafik 12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



Sumber: BPS, 2019

Sejak tahun 2007, Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat pengangguran menjadi 1 digit di bawah 10 persen. Secara umum, dari tahun-tahun terjadi tren penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Data terakhir pada tahun Agustus 2018 menunjukkan TPT Indonesia berada pada angka 5.34 persen. Apabila dilihat dari tingkat pendidikan yang ditempuh, lulusan SMA menjadi kelompok penyumbang angka pengangguran terbesar di Indonesia, yaitu sebesar 27.57 persen, disusul oleh kelompok lulusan SMK sebesar 24.74 persen. Dengan kata lain, lebih dari 50 persen pengangguran didominasi oleh lulusan pendidikan menengah atas. Hal ini dapat menjadi *early warning* adanya indikasi tidak adanya kesesuaian (*mismatch*) dalam pasar tenaga kerja terutama bagi lulusan SMA/SMK, misalnya ketidaksesuaian antara kuantitas dan kualitas tenaga kerja lulusan SMA/SMK yang tersedia dengan kebutuhan industri. Di tahun depan, diproyeksikan angka pengangguran akan stagnan pada level 5 persen dengan proporsi yang besar pada lulusan pendidikan menengah. Hal ini menjadi suatu pekerjaan rumah bagi pemerintah bagaimana mengatasi permasalahan tidak selimbangnya mekanisme pasar tenaga kerja dalam suatu kerangka kebijakan ketenagakerjaan yang komprehensif merangkul peranan institusi pendidikan dan sektor industri (swasta).

Tabel 3. TPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan

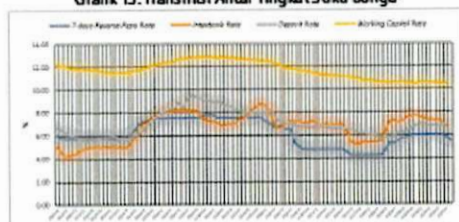
Tingkat Pendidikan	Jumlah	Pangsa
Tidak/belum pernah sekolah	31.774	0,45
Tidak/belum tamat SD	326.962	4,67
SD	898.145	12,83
SLTP	1.131.214	16,16
SLTA Umum/SMU	1.930.320	27,57
SLTA Kejuruan/SMK	1.731.743	24,74
Akademi/Diploma	220.932	3,16
Universitas	729.601	10,42
Total	7.000.691	100,00

Sumber: BPS, 2019

#### Kebijakan moneter akomodatif: mendorong pertumbuhan

Pada September 2019, Bank Indonesia memutuskan untuk kembali menurunkan suku bunga acuan, *Bi 7-days reverse repo*

Grafik 13. Transmisi Antar Tingkat Suku Bunga



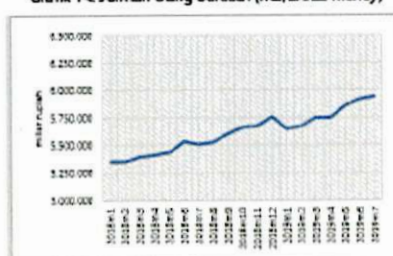
Sumber: Bank Indonesia, 2019; FRED St Louis, 2019

rate, sebesar 0.25 persen menjadi 5.25 persen dari sebelumnya pada angka 5.50 persen. Sejak awal tahun hingga saat ini, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan sebesar 0.75 persen. Penurunan suku bunga kredit dari perbankan. Akan tetapi, perubahan suku bunga acuan tidak dapat ditransmisikan pada perubahan suku bunga kredit dengan cepat, artinya ada *time lag* yang menyertai proses transmisi tersebut. Secara umum, perubahan suku bunga acuan akan cepat direspon oleh suku bunga pasar uang antarbank/PUAB (*interbank rate*, pada Grafik 13). Setelah direspon oleh *interbank rate*, perubahan suku bunga acuan akan mempengaruhi suku bunga deposit (*deposit rate*) dengan waktu transmisi kurang lebih 1 bulan. Setelah *deposit rate*, suku bunga acuan baru akan mempengaruhi suku bunga kredit (pada Grafik 13, suku bunga kredit diwakili dengan suku bunga modal kerja (*working capital rate*) dengan waktu transmisi kurang lebih 3 bulan. Namun perlu jadi catatan bahwa transmisi menuju suku bunga kredit pun tidak selalu berjalan *smooth* karena keputusan bank untuk mengubah suku bunga kredit menyesuaikan perubahan suku bunga acuan juga bergantung pada faktor-faktor lain, seperti tingkat likuiditas dan risiko kredit tiap bank. Secara umum tergambar pada Grafik 13, bahwa suku bunga PUAB, suku bunga deposit, dan suku bunga kredit bergerak searah dengan tren suku bunga acuan, dengan kecenderungan suku bunga kredit lebih *flat* daripada pergerakan suku bunga lain. Hal ini disebabkan oleh transmisi suku bunga acuan yang tidak langsung direspon secara langsung dan pada *magnitude* yang sebanding.

Secara umum, upaya Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga acuan sejak awal 2019 merupakan salah satu langkah kebijakan moneter akomodatif. Kebijakan moneter akomodatif diselenggarakan untuk meningkatkan gairah perekonomian sehingga mampu membantu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah perlambatan beberapa komponen penyokong PDB dan tekanan perekonomian global. Upaya ini dilaksanakan dengan dukungan tingkat inflasi yang relatif rendah sepanjang 2019. Hingga akhir 2019, ekspektasi tingkat inflasi akan stabil berada pada kisaran 3 persen, sehingga diproyeksikan masih ada kemungkinan bagi Bank Indonesia untuk kembali menurunkan suku bunga acuan untuk memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif melambat<sup>3</sup>.

Perubahan suku bunga pada umumnya akan berpotensi akan berpengaruh terhadap penawaran uang, atau dalam konteks yang lebih mudah disebut juga dengan jumlah uang beredar. Kecenderungan penurunan suku bunga acuan sepanjang 2019

Grafik 14. Jumlah Uang Beredar (M2/Broad Money)



Sumber: Bank Indonesia, 2019

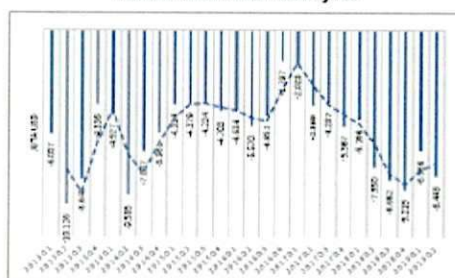
(Januari-Juli) berjalan seiringan dengan peningkatan jumlah uang beredar hingga 5.2 persen, dua kali lipat lebih tinggi daripada pertumbuhan jumlah uang beredar pada Januari-Juli 2018. Upaya otoritas moneter mengendalikan tingkat inflasi secara tidak langsung telah mengurangi dampak peningkatan jumlah uang beredar terhadap tingkat inflasi.

Pada bulan Agustus 2019, data kurs tengah rupiah terhadap USD menunjukkan adanya depresiasi relatif terhadap kurs tengah bulan Juli 2019 sebesar 1.5 persen. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya ketidakpastian global akibat timbulnya ketentuan-ketentuan tarif baru dalam perang dagang China-US, menyebabkan investor kembali beralih pada *safe-haven assets*<sup>4</sup>. Kemudian pada bulan September 2019, kurs harian rupiah kembali melemah seiring kondisi gangguan keamanan di Indonesia. Kecenderungan penurunan suku bunga acuan juga dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah. Suku bunga acuan Bank Indonesia menurun, menyebabkan *rate of return* kurang menarik bagi investasi luar negeri (*foreign investment*). *Rate of return* yang kurang menarik kemudian menyebabkan penurunan pada permintaan akan mata uang rupiah, sehingga nilai rupiah juga relatif menurun. Namun perlu jadi catatan bahwa fluktuasi nilai tukar tidak hanya bergantung pada pergerakan suku bunga, tetapi juga banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhinya, seperti kestabilan ekonomi dan politik, serta transaksi perdagangan luar negeri yang akan dijelaskan pada subbagian berikutnya. Ke depan, diproyeksikan perang dagang masih akan menekan nilai rupiah dan hal ini akan diperparah oleh kondisi kestabilan ekonomi dan politik di Indonesia, seiring dengan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh pergantian pemerintahan setelah Pemilu 2019. Ketidakpastian seperti ini menyebabkan investor memutuskan untuk *wait-and-see* dalam mengadakan transaksi dan berinvestasi dalam mata uang rupiah.

#### Defisit transaksi berjalan: masih menjadi tantangan

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI)/*balance of payments* triwulan II 2019 menunjukkan angka defisit sebesar USD2.000 juta. Hal ini merupakan penurunan kinerja NPI karena apabila dibandingkan dengan realisasi triwulan I 2019, NPI mampu memberikan surplus sebesar USD400 juta. Defisit NPI kali ini disebabkan oleh pelebaran defisit transaksi berjalan yang tidak mampu diimbangi dengan kinerja baik dari neraca transaksi modal dan finansial. Defisit transaksi berjalan melebar hingga USD8.443 juta. Pelebaran defisit transaksi berjalan ini meningkat

Grafik 15. Defisit Transaksi Berjalan



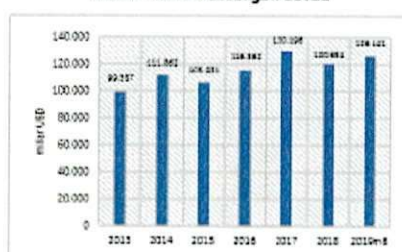
Sumber: Bank Indonesia, 2019

sebesar 21.2 persen dibandingkan dengan defisit transaksi berjalan pada triwulan I 2019 dan memakan proporsi hingga 3 persen dari PDB, dari defisit triwulan I dengan proporsi sebesar 2.6 persen dari PDB. Kondisi ini disebabkan oleh perilaku musiman repatriasi dividen serta pembayaran bunga utang. Tidak hanya itu, defisit transaksi berjalan juga diperparah dengan perlambatan kinerja neraca perdagangan dengan angka defisit neraca perdagangan pada bulan April 2019 mencapai USD2.285,59 juta. Perlambatan indeks harga komoditas global turut menyumbang terhadap pelebaran defisit transaksi berjalan dengan penurunan indeks harga komoditas sebesar 6.5 persen antara April-Juni 2019. Hingga memasuki 2020, diprediksikan bahwa defisit transaksi berjalan akan diupayakan untuk dikendalikan pada kisaran 2.5-3 persen dari PDB di tengah-tengah gempuran perlambatan perekonomian global. Sementara neraca transaksi modal dan finansial berhasil mencetak surplus sebesar USD7.051 juta yang disokong oleh aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi langsung dan portofolio. Akan tetapi, akibat dari perlambatan ekonomi mendekati pertengahan 2019, surplus yang dicapai pada triwulan II 2019 tidak mampu menyamai jumlah surplus pada triwulan I 2019, yaitu sebesar USD9.928 juta.

Sementara itu neraca perdagangan Indonesia kembali mencetak defisit sebesar USD64.28 juta setelah dua bulan sebelumnya berhasil mencetak surplus. Namun apabila dibandingkan dengan April 2019, kinerja neraca perdagangan Juni 2019 relatif lebih baik. Melonjaknya defisit neraca perdagangan April 2019 disebabkan oleh meningkatnya defisit neraca perdagangan migas sebesar USD1.490 juta dan nonmigas sebesar USD1.000 juta. Secara umum, ekspor Indonesia masih didominasi oleh ekspor nonmigas sebesar 90 persen, sementara impor Indonesia didominasi oleh impor *raw materials* (bahan baku dan barang modal) hingga 90 persen, mengindikasikan ketergantungan yang tinggi terhadap *raw materials* impor. Indonesia masih akan terus memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor *raw materials* selama tidak ada kebijakan yang mampu mensubstitusi *raw materials* impor.

Sementara posisi cadangan devisa hingga akhir Agustus 2019 tercatat sebesar USD126.441 miliar atau setara dengan pembiayaan 7.4 bulan impor, atau pembiayaan 7.1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri. Jumlah ini sudah melebihi batas standar kecukupan internasional, yaitu sebesar 3 bulan impor. Apabila dibandingkan dengan posisi cadangan devisa

Grafik 16. Posisi Cadangan Devisa



Sumber: Bank Indonesia, 2019

akhir 2018, cadangan devisa Indonesia sudah bertambah sejumlah USD5.8 miliar. Untuk ke depannya, Bank Indonesia akan terus menjaga *sustainability* cadangan devisa untuk memastikan stabilitas sektor eksternal dan sistem keuangan.

### Fokus baru RAPBN 2020

Pendapatan negara sepanjang periode 2015-2018 terus mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2019, diproyeksikan pendapatan negara akan mengalami pertumbuhan sebesar kurang lebih 5 persen dengan kontribusi terbesar dari pos penerimaan perpajakan sebesar 80.91 persen dan pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 19.02 persen. Penerimaan perpajakan 2019 (*outlook*) diperkirakan akan tumbuh sebesar 8.18 persen dari realisasi 2018. Pertumbuhan penerimaan perpajakan tahun 2019 disokong oleh berbagai kebijakan antara lain program penertiban impor, cukai, ekspor berisiko tinggi (PICE-BT), dan implementasi *Automatic Exchange of Information/AEOI*. Sementara untuk PNBP diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan negatif sebesar -5.62 persen yang disebabkan oleh, antara lain, penurunan penerimaan SDA dan penurunan pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan. Untuk tahun 2020, ditetapkan target pendapatan negara akan tumbuh sebesar 9.23 persen yang disokong dengan pertumbuhan positif dari penerimaan perpajakan sebesar 13.31 persen. Melihat target yang sangat optimis dari pemerintah pada RAPBN 2020, muncul pertanyaan: kebijakan reformasi perpajakan seperti apa yang mampu meningkatkan pendapatan negara, di sisi lain pemerintah juga tengah gencar meluncurkan aneka insentif pajak untuk mendorong aktivitas ekonomi? Apakah reformasi perpajakan tersebut akan mampu mendorong target pertumbuhan ekonomi yang optimistik pada level 5.3 persen? Sementara, pertumbuhan negatif dari pos PNBP masih diprediksikan terjadi pada 2020, sejalan dengan kecenderungan penurunan indeks harga komoditas dan depresiasi nilai rupiah.

Sementara belanja negara mengalami pertumbuhan positif secara nominal sepanjang periode 2015-2018. Untuk tahun 2019 (*outlook*), diproyeksikan total belanja negara akan meningkat sebesar 5.81 persen yang didukung oleh pertumbuhan belanja pemerintah pusat sebesar 4.94 persen dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar 7.47 persen. Tahun 2020, pemerintah telah menetapkan kenaikan belanja negara sebesar 8 persen dengan kenaikan belanja pemerintah pusat sebesar 9.35 persen dan transfer ke daerah dan dana

desa sebesar 5,45 persen didukung proyeksi stabilitas inflasi yang mengkompensasi kecenderungan depresiasi nilai rupiah. Kegiatan belanja negara 2020 diarahkan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan tema Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas dalam kerangka fokus RAPBN 2020 Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Hal ini menyiratkan tantangan bagi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan-kebijakan lama dan merumuskan kebijakan-kebijakan baru yang mampu menjawab kebutuhan sumber daya manusia Indonesia yang unggul untuk meningkatkan daya saing. Aneka kebijakan baru yang akan mewarnai tahun anggaran 2020 antara lain *super deduction tax* bagi industri yang berkontribusi bagi pengembangan vokasi dan litbang, Kartu Indonesia Pintar Kuliah dan Kartu Pra Kerja.

Tabel 4. Postur APBN

Tahun	2007	2008	2009	2010	2011*	2012**
Pendapatan Pajak	2558	3350,9	3696,9	1044,7	2030,8	2222,5
- Pendapatan Pajak Negara	1476	1842,9	2049	1545,3	3296,1	3121
- Pendapatan Pajak Daerah	1082,4	1507,9	1647,9	10,18	1044,7	1101,5
- Pajak Bumi dan Bangunan Rejan Pajak	225,9	352	531,6	480,5	580,5	558,3
- Penerbitan Utang Hibah	12	9 <sup>a</sup>	13,6	12,6	1,3	0,1
Penerima Sisa	1880,4	1984,3	7070,4	7723,5	1941,6	3120,8
- Saluran Pembiayaan Pusat	1313,3	1154	1205,4	1409,3	1512,7	1629,1
- Saluran Pembiayaan Daerah	567,1	730,3	496,5	75,18	18,44	89,8
- Saluran Pembiayaan Luar Daerah	0	106,6	168,4	129,1	110,4	181,9
Unsur Lain-Lain	2,00	2,00	5,1	1,80	1,00	2,00

\*5 Outlook 2019

\*\* RAPBN 2020

Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

Terikat defisit anggaran, pada September 2019, Kementerian Keuangan mengoreksi outlook defisit anggaran menjadi 1,93 persen dari angka outlook mula-mula sebesar 1,84 persen. Hal ini disebabkan salah satunya oleh pelemahan perekonomian global yang turut berpengaruh terhadap beberapa pos-pos APBN. Pertumbuhan penerimaan tidak mampu menyamai pertumbuhan belanja negara menyebabkan defisit anggaran diprediksikan akan melebar pada 2019. Sejalan ini, untuk RAPBN 2020, pemerintah menetapkan target defisit anggaran sebesar 1,76 persen dari PDB. Angka target ini, senada dengan target penerimaan perpajakan, dinilai sangat optimis, mengingat angka ini merupakan rasio defisit terendah dalam 5 tahun terakhir. Target ini menyuarikan upaya-upaya serius dari pemerintah untuk mengelola APBN dengan lebih efektif sehingga mampu menarik keseimbangan primer mendekati angka positif.

**Catatan kaki:**

<sup>1)</sup> Akan dijelaskannya pada bagian sektor moneter.

<sup>2)</sup> Terkecuali pada 2009. Pada 2009, realisasi angka pertumbuhan ekonomi Indonesia turun drastis menjadi 4,6 persen yang disebabkan oleh krisis perekonomian global pada akhir 2008.

1) Cost dari tingkat suku bunga rendah adalah kemungkinan kenaikan tingkat inflasi. Transmisi ini adalah sebagai berikut, suku bunga rendah adalah *cost of holding money* (bayar memegang uang). Ketika suku bunga rendah, biaya memegang uang rendah, sehingga masyarakat akan lebih memilih untuk memegang uang, baik untuk konsumsi maupun investasi. Hal tersebut akan menyebabkan kenaikan jumlah uang beredar, sehingga salanjutnya akan menyebabkan kenaikan tingkat inflasi. Ketika tingkat inflasi masiayudaya rendah dan stabil, maka penurunan tingkat suku bunga akan menyebabkan *cost* yang relatif lebih kecil.

4) Safe-haven assets adalah aset investasi yang memiliki kecenderungan mampu bertahan atau bahkan mengalami peningkatan nilai seiring terjadi ketidakpastian dalam pasar. Pada umumnya, aset seperti ini tidak berkorelasi atau bahkan berkorelasi negatif dengan mainstream ketika terjadi resesi.

#### DAFTAR PUSTAKA

Asian Development Bank, 2019. Indonesia Economy Diakses melalui <https://www.adb.org/countries/Indonesia/economy>

Badan Pusat Statistik, 2019. (Serai 2010) Distribusi PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Pernan), 2014-2019. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/dinamika/cabla/2014/5/0/6/8/28/-serai-2010-distribusi-pdb-triwulanan-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha-perman-2014-2019.html>

Badan Pusat Statistik. 2019. (Serai 2010) Distribusi PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Perman), 2014-2019. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/dinamistable/2019/5/8/0/6/8/35/-serai-2010-distribusi-pdb-triwulanan-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-pengeluaran-perman-2014-2019.html>

Badan Pusat Statistik. 2019. (Seri 2010) Laju Pertumbuhan Kumulatif Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2017 – 2019. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/dynami/cabiz/2017/05/05/1253/-seri-2010-laju-pertumbuhan-kumulatif-produk-domestik-bruto-menurut-lapangan-usaha-persen-2017-2019.html>

Badan Pusat Statistik. 2019. (Serai 2010) Laju Pertumbuhan PDB menurut Pengeluaran (Persen), 2017 – 2019. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/dynami/csttable/2017/05/08/1258/-serai-2010-laju-pertumbuhan-ptdb-menurut-pengeluaran-persen-2017-2019.html>

Badan Pusat Statistik. 2019. [Seri 201 0] Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi, 2010-2018. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/dynamictable/2019/5/1/0-07/9/61/-seri-201-0-laju-pertumbuhan-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-provinsi-2010-0-2018-pe-ran.html>

Badan Pusat Statistik. 2019. Inflasi Umum, Inflasi Harga Yang Diatur Pemerintah, dan Barang Bergepok. Inflasi Indonesia di Diakses melalui <https://www.bps.go.id/statistika/2019/2020/2908/inflasi-umum-inflasi-harga-yang-diatur-pemerintah-dan-barang-bergepok-inflasi-indonesia-2019-2019.html>

Badan Pusat Statistik. 2019. Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Didapatkan 1986 - 2018. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/statistik/tabel/200904116972/pengangguran-terbuka-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-didapatkan-1986-2018.html>

Badan Pusat Statistik. 2019. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi, 1986-2018. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/statistika/2019/4/9/1/598/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-provinsi-1986-2018.html>

Bank Indonesia. 2019. BI 7-day (Reverse) Repo Rate. Diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/monev/BI-7day-RR/Ata/Content/Default.aspx>

Bank Indonesia. 2019. Kurs Tengah Beberapa Mata Uang Utama Terhadap Rupiah di Bank Indonesia Diakses melalui <https://www.bi.go.id/statistik/skpd/bankindonesia/kominfo/Content/Default.aspx>

Bank Indonesia. 2019. Laporan Harian Pembiayaan Indonesia Realisasi Triwulan II 2019. Diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/pu/dukasi/informasi-pembiayaan/Pages/realtriw2019.aspx>

Bank Indonesia. 2019. Neraca Pembayaran Indonesia Ringkasan. Diakses melalui <https://www.bi.go.id/statistik/skpd/bankindonesia/Content/Default.aspx>

Bank Indonesia. 2019. Posisi Cadangan Devisa Diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/statistik/suku-baru/kurir/kurir/Content/Default.aspx>

Bank Indonesia. 2019. Suku Bunga Pinjaman Rupiah yang diberlakukan Menurut Kelompok Bank dan Jenis Penggunaan. Diakses melalui [https://www.bi.go.id/stafid/sid/sid\\_ban/informasi/Contents/Default.aspx](https://www.bi.go.id/stafid/sid/sid_ban/informasi/Contents/Default.aspx)

Bank Indonesia. 2019. Tinjauan Kebijakan Moneter September 2019. Diakses melalui [https://www.bi.go.id/id/publikasi/Pelaksanaan-monev/tinjauan/Pages/TM-September\\_2019.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/Pelaksanaan-monev/tinjauan/Pages/TM-September_2019.aspx)

Bank Indonesia, 2019). Uang Beredar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/statistik/kelangkaan/monev/Contents/DaftarUang.aspx>

Chen, James. 2019, 6 Mei. Safe Haven. Investopedia. Diakses melalui <https://www.investopedia.com/terms/s/safe-haven.asp>

DChristopher Tom, 2018, 31. Does Q1 prices just had their worst year since 2015 — here's what went wrong. CNBC. <https://www.cnbc.com/2018/01/23/q1-hd-prices-set-for-their-worst-year-since-2015.html>

Economic Policy Uncertainty, 2019. Economic Policy Uncertainty Index. Dallas: Federal Reserve Bank of Dallas. <https://www.policyuncertainty.com/>

Pankasnyova, Alexandra. 2019. 28 Mar. Oil price trend 2019: what to expect from the global oil market? Capital.com. Dukes media. <https://capital.com>

## LAMPIRAN 15: TAHAPAN KEGIATAN 4.4 LAPORAN SINGKAT MENTOR



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

### LAPORAN SINGKAT KONSULTASI DENGAN MENTOR

Hari, tanggal : Rabu, 2 Oktober 2019  
Pukul : 15.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Batam, Kepulauan Riau  
Kegiatan : Pembahasan progres revisi *draft Economic Outlook 2020*

#### I. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Pada sesi konsultasi keempat ini, topik pembahasan yang dilaksanakan adalah mengenai progres pengerjaan aktualisasi pada kelima dan keenam pelaksanaan, yaitu minggu ke-5 bulan September 2019 dan minggu ke-1 bulan Oktober 2019. Sejalan ini, progres yang sudah dilakukan adalah pelaksanaan Kegiatan 4, yaitu Presentasi Internal Pusat Kajian Anggaran, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. mengundang seluruh Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran untuk menghadiri presentasi internal sebagai bentuk *peer-review*, dan tahapan kegiatan ini sudah dilaksanakan pada 27 September 2019 dengan surat undangan yang terlampir dalam laporan;
2. melakukan presentasi internal di depan seluruh Analis APBN Pusat Kajian Anggaran, dan tahapan kegiatan ini berlangsung pada 30 September 2019 dengan *file* presentasi dan notulensi yang terlampir dalam laporan;
3. melakukan revisi atas saran dan masukan dari *peers* Analis APBN Pusat Kajian Anggaran apabila ada, yang dilaksanakan pada 1 Oktober 2019 dengan *revised draft* yang terlampir dalam laporan;
4. konsultasi dengan mentor mengenai artikel akhir yang sudah direvisi, yang dilaksanakan pada 2 Oktober 2019 dengan Lapsing yang akan terlampir dalam laporan.

Selain itu, pada sesi konsultasi kali ini, dilakukan konsultasi mengenai *revised draft Economic Outlook* yang berisi masukan, kritik, dan saran dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat sesi presentasi, sebagaimana tercantum pada Lapsing Notulensi Presentasi Internal.

#### II. PENUTUP

Demikianlah konsultasi dengan mentor dilaksanakan. Konsultasi ini ditutup pada pukul 15.30 WIB

Jakarta, 2 Oktober 2019

Bastri Paramita, S.E., M.M.  
198001262014022002

## LAMPIRAN 16: TAHAPAN KEGIATAN 5.3 CATATAN HASIL PENYERAHAN LAPORAN



### CATATAN HASIL PENYERAHAN LAPORAN AKTUALISASI KEPADA ATASAN DAN MENTOR

Hari, Tanggal	: Senin, 7 Oktober 2019
Pukul	: 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Analis APBN Pusat Kajian Anggaran Gedung Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI
Acara	: CPNS Menyerahkan Laporan Aktualisasi Kepada Atasan dan Mentor
Narasumber	: 1. Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si. 2. Rastri Paramita, S.E., M.M.

#### I. PEMBUKAAN

CPNS yang telah menyelesaikan laporan aktualisasi menyerahkan laporan aktualisasinya kepada atasan dan mentor sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan aktualisasi yang telah dilakukan. Proses penyerahan Laporan ini dilakukan pada hari Senin, 7 Oktober 2019 pukul 13.00 WIB, bertempat di Ruang Analis APBN Pusat Kajian Anggaran. Atasan dan mentor menerima laporan aktualisasi yang telah dibuat oleh CPNS.

#### II. POKOK-POKOK HASIL PEMBAHASAN

Adapun dari pokok-pokok hasil konsultasi yang dilakukan tersebut, penulis mendapatkan beberapa saran dan masukan untuk perbaikan, antara lain:

- Atasan dan mentor menerima laporan aktualisasi yang telah dilaksanakan oleh CPNS;
- Atasan dan mentor memberikan masukan dan pertanyaan seputar laporan aktualisasi yang dibuat oleh CPNS;

#### 3. PENUTUP

Demikianlah catatan atas hasil penyerahan laporan aktualisasi atas nama Nadya Ahda dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran, dan Koordinator Bidang Perencanaan dan Asumsi Dasar Ekonomi Makro yang juga sekaligus mentor.

Jakarta, 7 Oktober 2019

Mengetahui,  
Mentor

Rastri Paramita, S.E., M.M.  
NIP. 198001262014022002

Mengetahui,  
Kepala Pusat Kajian Anggaran

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.  
NIP. 197109111997031005